

# JURNAL KAJIAN WILAYAH

Volume 8

Nomor 1, Juni 2017

## DAFTAR ISI

TRANSNATIONAL MIGRATION AND ETHNIC ENTREPRENEURSHIP AMONG THE CHAM DIASPORA IN MALAYSIA <b>Betti Rosita Sari</b> .....	1-15
‘COME TO HOLLAND’: TOURISM PROMOTION OF THE NETHERLANDS FOR DUTCH EAST INDIES AND INDONESIA <b>Achmad Sunjayadi</b> .....	17-32
DIASPORA DAN IDENTITAS KOMUNITAS EKSIL ASAL INDONESIA DI BELANDA <b>Gusnelly</b> .....	33-44
KUDETA YANG (DIRANCANG) GAGAL DAN KONSOLIDASI REZIM (NEO) ATATURK? HIZMET GULEN, PARALEL STATE, DAN AMBISI TERSELUBUNG ERDOGAN <b>Nuruddin Al Akbar</b> .....	45-62
REPRODUKSI KULTURAL MITOS “PEREMPUAN IDEAL” JEPANG MELALUI SERIAL TV OSHIN KARYA SUGAKO HASHIDA TAHUN 1983 <b>Yusnida Eka Puteri dan Yusy Widarahesty</b> .....	63-74
<b>RINGKASAN HASIL PENELITIAN</b> MIGRASI TRANSNASIONAL DAN IDENTITAS DIASPORA DI KOTA-KOTA PERBATASAN DI ASIA TENGGARA STUDI KASUS THAILAND DENGAN MYANMAR DAN LAOS <b>Amorisa Wiratri, Betty Rosita Sari, Yekti Maunati, Lamijo</b> .....	75-81
TINJAUAN BUKU ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT IN AFRICA, UNDERSTANDINGS TRENDS AND PROSPECTS <b>Muzzar Kresna</b> .....	83-85



# JURNAL KAJIAN WILAYAH

Volume 8

Nomor 1, Juni 2017

---

**DDC: 302.4**

**Betti Rosita Sari**

## **MIGRASI TRANSNASIONAL DAN KEWIRAUSAHAAN DIASPORA CHAM DI MALAYSIA**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 8 (1) Juni 2017: 1-15

### **ABSTRAK**

Artikel ini berkaitan dengan diaspora Cham di Malaysia, yang mempertahankan hubungan transnasional dengan tanah asal mereka “Kampong Cham” di Kamboja. Dengan proses perpindahan dan pemukiman kembali, komunitas ini menghadapi tantangan nyata dan harus mengembangkan cara hidup baru di lingkungan baru. Dari bentuk tradisional pertanian dan perikanan, yang merupakan sumber utama dukungan ekonomi mereka di Kamboja, orang-orang ini mengubah kegiatan tradisional utama mereka untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berorientasi komersial di pemukiman baru mereka. Makalah ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan, pertama, bagaimana migran menggunakan hubungan klien patron untuk bertahan dan mengejar kehidupan mereka di Malaysia. Kedua, bagaimana Cham diaspora di Malaysia yang mengambil peran pengusaha etnik atau pelindung membantu migran lainnya untuk menegosiasikan ruang transnasional dan karena itu memfasilitasi transnasionalisme. Jaringan etnik ini memegang peranan penting dalam bisnis etnik dan strategi bertahan hidup ekonomi mereka, baik bagi pendatang migran migran sebelumnya maupun pendatang baru. Makalah ini berkontribusi pada isu kontemporer Cham diaspora di Malaysia, salah satu etnis minoritas di Kamboja dan strategi mereka untuk menghadapi globalisasi dengan membangun jaringan transnasional.

**Kata kunci:** Diaspora, Cham, migrasi transnasional, kewirausahaan, jaringan etnik, Malaysia.

---

**DDC: 959.8**

**Achmad Sunjayadi**

## **‘COME TO HOLLAND’: PROMOSI PARIWISATA BELANDA BAGI HINDIA-BELANDA DAN INDONESIA**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 8 (1) Juni 2017: 17-32

### **ABSTRAK**

Hubungan antara Indonesia dengan Belanda dalam sektor kepariwisataan sudah terjalin lama. Hubungan tersebut terjalin sejak Indonesia masih Hindia-Belanda dan berada di bawah kepemimpinan

Belanda hingga Indonesia merdeka. Hubungan di sektor kepariwisataan itu sempat terputus pada masa awal Perang Dunia II hingga tahun 1950-an. Artikel ini membahas jejak hubungan dan situasi kontemporer sektor kepariwisataan di kedua negara. Bahasan dititikberatkan pada Belanda sebagai negara tujuan wisata bagi penduduk Hindia Belanda yang ketika itu disebut *verlofgangers* (orang yang mengambil cuti) dan wisatawan Indonesia pada saat ini. Pertanyaan yang akan dijawab pada studi ini adalah bagaimana Belanda mempromosikan negerinya serta alasan di balik promosi itu. Sumber yang digunakan adalah arsip surat kabar dan majalah pada periode tersebut, arsip dari lembaga pariwisata di Belanda, serta surat kabar kontemporer terbitan Belanda.

**Kata kunci:** Belanda, Indonesia, Hindia-Belanda, kepariwisataan, promosi

---

**DDC: 305.8**

**Gusnelly**

**DIASPORA DAN IDENTITAS KOMUNITAS EKSIL ASAL INDONESIA DI BELANDA**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 8 (1) Juni 2017: 33-44

### **ABSTRAK**

Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang migrasi orang Indonesia yang fokus pada diaspora komunitas eksil di Belanda. Tujuan untuk membahas masalah ini adalah untuk menceritakan tentang keberadaan komunitas Indonesia yang sejak puluhan tahun terbuang dari tanah air dan menjadi *stateless* atau kehilangan kewarganegaraan, sebab pasportnya dicabut oleh pemerintah Indonesia. Mereka merupakan anak bangsa dari satu generasi yang terpaksa pindah ke beberapa negara dan memilih mencari suaka ke berbagai negara Eropa Barat pascaruntuhnya Uni Soviet. Sejarah keberadaan mereka di luar negeri sebagai akibat dari peristiwa G30S tahun 1965. Mereka sedang berada di luar negeri ketika terjadi peristiwa G30S di dalam negeri. Kepergian mereka ke luar negeri yaitu di negara-negara beraliran kiri (sosialis) di pertengahan tahun 60-an bukan karena hanya karena urusan politik, tetapi untuk berbagai kepentingan, namun pada kenyataannya disangkutpautkan dengan terjadinya peristiwa G30S tahun 1965 tersebut. Pada tahun 1989 dengan kejatuhan komunisme dan berakhirnya perang dingin setelah keruntuhan negara adi kuasa Uni Soviet sebagian besar mereka telah mendaftarkan diri menjadi pencari suaka ke beberapa negara di Eropa Barat, termasuk ke Belanda. Sebagai warga negara Belanda, anak keturunannya mendapatkan pendidikan dan bekerja di Belanda. Anak-anak keturunannya merasa Belanda atau Eropa adalah identitasnya akan tetapi orang eksil tetap menjaga nasionalisme mereka buat tanah airnya yaitu Indonesia. Kami menyebutnya dengan *nasionalisme jarak jauh*.

**Kata Kunci:** Belanda, diaspora, komunitas eksil, suaka, kewarganegaraan.

---

**DDC: 320.9**

**Nuruddin Al Akbar**

**KUDETA YANG (DIRANCANG) GAGAL DAN KONSOLIDASI REZIM (NEO) ATATURK? HIZMET GULEN, PARALEL STATE, DAN AMBISI TERSELUBUNG ERDOGAN**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 8 (1) Juni 2017: 45-62

### **ABSTRAK**

Studi ini berupaya melakukan pembacaan kritis upaya kudeta sejumlah kalangan militer yang berlangsung di tahun 2016. Kegagalan kudeta militer yang terjadi dapat dibaca bukan sebagai

kemenangan demokrasi tetapi justru upaya kondolidasi yang terus dibangun rezim Erdogan untuk semakin mencengkramkan kuasanya di semua lini kehidupan masyarakat. Studi ini berpijak pada wacana resmi yang disuarakan oleh pemerintah Turki bahwasanya gerakan Hizmet Gulen memegang peranan penting dalam upaya kudeta. Akan tetapi rezim Erdogan telah membaca langkah Gulen dan merancang operasi kontra kudeta sedemikian rupa untuk: pertama, menumpas upaya kudeta yang terjadi sehingga memastikan rezim Erdogan tetap bertahan; Kedua, memastikan upaya kudeta dalam level tertentu tetap berjalan sehingga dapat dimanfaatkan sedemikian rupa bagi kepentingan rezim erdogan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana dengan kerangka analisis yang didasarkan pada teori Rossa dan Nugroho Notosusanto mengenai peristiwa G30S di Indonesia (yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk membaca upaya kudeta di Turki). Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini sepenuhnya mendasarkan pada sumber sekunder, baik pemberitaan media internasional dan Turki sendiri mengenai jalannya kudeta tersebut, ditunjang dengan berbagai artikel yang ditulis oleh berbagai analis mengenai kejadian tersebut.

**Kata Kunci:** Erdogan, Gulen, Paralel State, Kudeta, Neo Ataturk

---

**DDC: 305.4**

**Yusnida Eka Puteri dan Yusy Widarahesty**

**REPRODUKSI KULTURAL MITOS “PEREMPUAN IDEAL” JEPANG MELALUI SERIAL TV *OSHIN* KARYA SUGAKO HASHIDA TAHUN 1983**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 8 (1) Juni 2017: 63-74

**ABSTRAK**

Jepang merupakan masyarakat matriarkal yang cukup sejajar hingga datangnya pemikiran Konfusian dari China. Pemikiran ini mendefinisikan masyarakat Jepang sampai akhir Perang Dunia II. Integrasi strukturhierarkis Konfusian dengan dominasi peran gender laki-laki mengalihkan ke dalam sistem patriarki. Peran gender ditentukan oleh budaya dan bukan perbedaan fisik antara pria dan wanita. Nilai tradisional Jepang yang membentuk idealisme wanita Jepang berlanjut hingga masa modern awal. Nilai itu dikenal sebagai “ryousai kenbo” (istri yang baik dan ibu yang bijak). Isu gender ini juga banyak terlihat dalam budaya populer manga Jepang, anime hingga drama, dengan salah satu drama populer dan legendaris adalah Oshin. Oshin adalah nama pahlawan drama televisi yang keluar dua kali sehari di Waku-waku Channel selama setahun. Oshin lebih dari sekadar lambang istri yang baik dan ibu yang bijak, dia pemberani, pekerja keras dan penjaga. Penelitian ini secara khusus dilakukan dengan melihat dinamika isu gender Jepang melalui serial drama drama Oshin dengan menggunakan reproduksi budaya oleh Pierre Bourdieu.

**Kata Kunci:** Reproduksi Budaya, Wanita Ideal, Oshin, Jepang

---

**DDC: 302.4**

**Amorisa Wiratri, Betty Rosita Sari, Yekti Maunati, Lamijo**

**RINGKASAN HASIL PENELITIAN**

**MIGRASI TRANSNASIONAL DAN IDENTITAS DIASPORA DI KOTA-KOTA PERBATASAN DI ASIA TENGGARA: STUDI KASUS THAILAND DENGAN MYANMAR DAN LAOS**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 8 (1) Juni 2017: 75-81

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan di kota-kota perbatasan Asia Tenggara, yaitu Thailand, Laos, dan Myanmar yang berbatasan langsung dengan China. Kota perbatasan merupakan lokasi strategis bagi pergerakan transnasional baik manusia, barang, informasi, dan ide-ide, sekaligus sebagai wilayah yang menghubungkan antara dua atau tiga negara yang berbeda di Asia Tenggara. Ekspansi ekonomi China dan pergerakan manusia dari negara-negara tetangga mempengaruhi dinamika ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di perbatasan. Fokus penelitian ini adalah menggali proses migrasi transnasional, identitas budaya diaspora, dan aktivitas ekonomi skala kecil kelompok diaspora di wilayah perbatasan Thailand utara dengan Myanmar dan Laos.

**Kata Kunci:** migrasi transnasional, identitas budaya diaspora, kota perbatasan

---

## **TINJAUAN BUKU**

**DDC: 383.9**

**Muzzar Kresna**

### **PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DI AFRIKA, MEMAHAMI TREND DAN PROSPEK**

Chitonge, H. 2015. *Economic Growth and Development in Africa, Understanding trends and prospects*. New York, NY: Routledge. 294 pages + xv  
Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 8 (1) Juni 2017: 83-85

# JURNAL KAJIAN WILAYAH

Volume 8

Nomor 1, Juni 2017

---

**DDC: 302.4**

**Betti Rosita Sari**

**TRANSNATIONAL MIGRATION AND ENTREPRENEURSHIP  
AMONG THE CHAM DIASPORA IN MALAYSIA**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 8 (1) Juni 2017: 1-15

***ABSTRACT***

*This article is concerned with the Cham diaspora in Malaysia, who maintain transnational ties to their home land of “Kampong Cham” in Cambodia. With the process of movement and resettlement, this community confronted real challenges and had to develop new ways of life in a new milieu. From traditional forms of farming and fishing, which had been their main sources of economic support in Cambodia, these people transformed their main traditional activities to develop commercially-oriented economic activities in their new settlement. This paper aimed to answer two questions, first, how migrants use patron client relationships to survive and pursue their life in Malaysia. Second, how Cham diaspora in Malaysia who take the role of ethnic entrepreneur or patron help other migrants to negotiate transnational space and therefore facilitate transnationalism. This ethnic network plays an important role in their ethnic businesses and economic survival strategy, both for the previous migrant and new comer migrants. This paper contributes to a contemporary issue of Cham diaspora in Malaysia, one of ethnic minority in Cambodia and their strategy to face globalization by establishing transnational networking.*

*Keywords: Diaspora, Cham, transnational migration, entrepreneurship, ethnic network, Malaysia*

---

**DDC: 959.8**

**Achmad Sunjayadi**

**‘COME TO HOLLAND’: TOURISM PROMOTION OF THE NETHERLANDS FOR  
DUTCH EAST INDIES AND INDONESIA**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 8 (1) Juni 2017: 17-32

***ABSTRACT***

*Relation between Indonesia and The Netherlands, particularly in the tourism sector has been established long time ago. The relation has been built since Indonesia still part of Dutch colony until now. Relation in the tourism sector had disconnected between the beginning of Second World War until the 1950s. This article tries to trace the relation and the contemporary situation of the tourism sector*

*in Netherland. The discussion focuses on the Netherlands as a tourism destination for the Dutch East Indies' verlofgangers (those who furlough) and for Indonesian tourists. The question is how Netherlands promote their country as tourist destination and the reason why they promote their country to Dutch East Indies and Indonesian tourists. The data sources for this article are from Dutch's newspapers and magazines during the colonial period, archives of tourism agencies in the Netherlands as well as Dutch contemporary newspapers,.*

**Keywords:** *The Netherlands, Indonesia, Dutch East Indies, tourism, promotion*

---

**DDC: 305.8**

**Gusnelly**

## **DIASPORA AND IDENTITY OF EXCILE COMMUNITY FROM INDONESIA IN THE NETHERLANDS**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 8 (1) Juni 2017: 33-44

### **ABSTRACT**

*This paper is a result of research on Indonesian migration that focuses on the diaspora of the exile community in the Netherlands. The purpose to discuss this issue is to tell about the existence of an Indonesian community that has been exiled from the country for decades and became stateless or lost citizenship, because its passport was revoked by the Indonesian government. They are the generation who have been forced to move to several countries and choose to seek asylum in various Western European countries after the collapse of the Soviet Union. The history of their existence abroad as a result of the event of G30S/1965. They were abroad when the G30S occurred in the country. Their departure abroad was in the leftist (socialist) countries of the mid-1960s not because of political affairs but for various interests, but in fact it was related to the occurrence of the G30S/1965. In 1989 with the fall of communism and the end of the cold war after the collapse of the superpower of the Soviet Union, most of them have registered themselves as asylum seekers to several countries in Western Europe, including to the Netherlands. As a Dutch citizen, their descendants get education and work in the Netherlands. Their descendants feel that the Dutch or Europeans are his identity but the exiles keep their nationalism for Indonesia. We call that with long-distance nationalism.*

**Keywords:** *Dutch, diaspora, exile community, asylum, citizenship.*

---

**DDC:320.9**

**Nuruddin Al Akbar**

## **COUP D'ETAT THAT (DESIGNED TO) FAIL AND (NEO) ATATURK'S REGIME CONSOLIDATION? HIZMET GULEN, PARALLEL STATE AND ERDOGAN'S HIDDEN AMBITIONS**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 8 (1) Juni 2017: 45-62

### **ABSTRACT**

*This study seeks to undertake critical reading of a number of military coup d'etat attempts that took place in 2016. The failure of the military coup d'etat can be read not as a victory of democracy, but rather as the consolidation effort that is continuously formed by Erdogan's regime to increasingly exert his power in all areas of Turks life. This study rests on official discourse voiced by the Turkish government that states Gulen Hizmet movement plays an important role in the coup d'etat attempt. Unfortunately, Erdogan's regime has acknowledged Gulen steps. Then, he designed a counter-coup*

operation in such a way in order to, firstly, quell the coup d'état attempts that occur thus ensuring Erdogan's regime persisted; second, make sure the coup d'état attempt at certain level is still running so that it can be utilized for the benefit of Erdogan's regime. The research method used in this research is discourse analysis with analytical framework based on Rossa and Nugroho Notosusanto theory about G30S event in Indonesia (which has been modified to read coup attempt in Turkey). The data sources used in this study are based entirely on secondary sources, including international and Turkish media coverage of the course of the coup. Includes various articles written by various experts / analysts about the incident.

**Keywords:** Erdogan, Gulen, Paralel State, Coup d'état, Neo Ataturk

---

**DDC: 305.54**

**Yusnida Eka Puteri dan Yusy Widarahesty**

**REPRODUCTION OF CULTURAL MYTH ON JAPANESE "IDEAL WOMAN" THROUGH OSHIN TV SERIES BY SUGAKO HASHIDA 1983**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 8 (1) Juni 2017: 63-74

**ABSTRACT**

*Japan was a fairly equitable matriarchal society until Confucian ideas immigrated from China. These ideas defined Japanese society up until the end of World War II. The integration of Confucian hierarchical structures where male domination shifted gender roles into a patriarchal system. Gender roles are defined by culture rather than physical differences between men and women. Japan traditional values that form the idealism of Japanese women continued until the early modern period. Those values known as "ryousai kenbo" (good wife and wise mother). This gender issues also widely seen in popular culture of the Japanese manga, anime to drama, one of the legendary popular drama is Oshin. Oshin is the name of the heroine of television drama that went out twice a day in Waku-waku Channel for a year. Oshin is much more than the epitome of the good wife and wise mother, she is courageous, hard working and preserving. This research is specifically conducted by looking at the dynamic of Japan gender issues through the serial movie of drama Oshin using cultural reproduction by Pierre Bourdieu.*

**Key Words:** Cultural Reproduction, Ideal Women, Oshin, Japan

---

**DDC: 302.4**

**Amorisa Wiratri, Betty Rosita Sari, Yekti Maunati, Lamijo**

**RESEARCH SUMMARY**

**TRANSNATIONAL MIGRATION AND DIASPORA IDENTITY IN BORDER CITIES IN SOUTHEAST ASIA: CASE STUDY OF THAILAND WITH MYANMAR AND LAO PDR**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 8 (1) Juni 2017: 75-81

**ABSTRACT**

*This research has done in the border cities in Southeast Asia, namely Thailand, Lao PDR and Myanmar that straight bordered with China. Border cities are strategic locations for transnational migration, including the mobility of human, goods, information and transfer of ideas, where at the same time also contributed as bridge that linked between two or three different countries in Southeast Asia. China's economic expansion and people migration from neighbouring countries has influenced the dynamic of economic, social and culture for people who live in border areas, especially in North*

*Thailand. This research focus on the process of transnational migration, the identity of diaspora, and small scale economic activity among diaspora groups in border areas between north Thailand and Myanmar and also Lao PDR.*

**Keywords:** *transnational migration, diaspora identity, border cities*

---

**BOOK REVIEW**

**DDC: 383.9**

**Muzzar Kresna**

**ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT IN AFRICA, UNDERSTANDINGS TRENDS AND PROSPECTS**

Chitonge, H. 2015. *Economic Growth and Development in Africa, Understanding trends and prospects.* New York, NY: Routledge. 294 pages + xv  
Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 8 (1) Juni 2017: 83-85

# TRANSNATIONAL MIGRATION AND ETHNIC ENTREPRENEURSHIP AMONG THE CHAM DIASPORA IN MALAYSIA<sup>1</sup>

## MIGRASI TRANSNASIONAL DAN KEWIRAUSAHAAN DIASPORA CHAM DI MALAYSIA

**Betti Rosita Sari**

Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences

*Email: betty.rositasari@gmail.com*

Diterima: 11-4-2017

Direvisi: 5-5-2017

Disetujui: 31-5-2017

### ABSTRAK

*Artikel ini berkaitan dengan diaspora Cham di Malaysia, yang mempertahankan hubungan transnasional dengan tanah asal mereka “Kampong Cham” di Kamboja. Dengan proses perpindahan dan pemukiman kembali, komunitas ini menghadapi tantangan nyata dan harus mengembangkan cara hidup baru di lingkungan baru. Dari bentuk tradisional pertanian dan perikanan, yang merupakan sumber utama dukungan ekonomi mereka di Kamboja, orang-orang ini mengubah kegiatan tradisional utama mereka untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berorientasi komersial di pemukiman baru mereka. Makalah ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan, pertama, bagaimana migran menggunakan hubungan klien patron untuk bertahan dan mengejar kehidupan mereka di Malaysia. Kedua, bagaimana Cham diaspora di Malaysia yang mengambil peran pengusaha etnis atau pelindung membantu migran lainnya untuk menegosiasikan ruang transnasional dan karena itu memfasilitasi transnasionalisme. Jaringan etnik ini memegang peranan penting dalam bisnis etnik dan strategi bertahan hidup ekonomi mereka, baik bagi pendatang migran migran sebelumnya maupun pendatang baru. Makalah ini berkontribusi pada isu kontemporer Cham diaspora di Malaysia, salah satu etnis minoritas di Kamboja dan strategi mereka untuk menghadapi globalisasi dengan membangun jaringan transnasional.*

**Kata kunci:** *Diaspora, Cham, migrasi transnasional, kewirausahaan, jaringan etnik, Malaysia.*

### ABSTRACT

This article is concerned with the Cham diaspora in Malaysia, who maintain transnational ties to their home land of “Kampong Cham” in Cambodia. With the process of movement and resettlement, this community confronted real challenges and had to develop new ways of life in a new milieu. From traditional forms of farming and fishing, which had been their main sources of economic support in Cambodia, these people transformed their main traditional activities to develop commercially-oriented economic activities in their new settlement. This paper aimed to answer two questions, *first*, how migrants use patron client relationships to survive and pursue their life in Malaysia. *Second*, how Cham diaspora in Malaysia who take the role of ethnic entrepreneur or patron help other migrants to negotiate transnational space and therefore facilitate transnationalism. This ethnic network plays an important role in their ethnic businesses and economic survival strategy, both for the previous migrant and new comer migrants. This paper contributes to a contemporary issue of Cham diaspora in Malaysia, one of ethnic minority in Cambodia and their strategy to face globalization by establishing transnational networking.

**Keywords:** Diaspora, Cham, transnational migration, entrepreneurship, ethnic network, Malaysia

---

<sup>1</sup> Some content of this paper were presented during the 13<sup>th</sup> Asia Pacific Sociological Association (APSA) Conference “Globalization, Mobility, and Borders: Challenges and Opportunities in the Asia Pacific”, 24-25 September 2016 at Royal University of Phnom Penh, Cambodia

## INTRODUCTION

The era of globalization is characterized by dynamic interactions linking more countries and more people than ever before, resulting in a proliferation of studies on the various driving forces in the process of globalization, such as the state, capital, interesting groups, etc. Diasporas, characterized by a strong cultural identity, the maintenance of links with the country of origin and transnational identity, have begun to play a role of increasing relevance in the global society, where non-state actors emerge in the first instance with an increasing economic weight and in some cases also political weight.

This article is concerned with the Cham diaspora in Malaysia who migrate in the period of 1975 until present who still maintain transnational ties to their home land in Cambodia. With the process of movement and resettlement, the Cham community confronted real challenges and had to develop new ways of life in a new milieu. From traditional forms of farming and fishing, which had been their main sources of economic support in Cambodia, these people transformed their main traditional activities to develop commercially-oriented economic activities in their new settlement. The Cham's entrepreneurship cannot be separated from economic networking among the Cham diaspora in Malaysia and Cambodia. In this paper I argue that even though the Cham diaspora live in different countries, but they still have strong ethnic relationship and kinship.

This paper aimed to answer two questions, first, how migrants use patron client relationships to survive and pursue their life projects in Malaysia. Second, how Cham diaspora in Malaysia who take the role of ethnic entrepreneur or patron help other migrants to negotiate transnational space and therefore facilitate transnationalism. To answer these questions, this paper utilized the anthropological, economic, and historical approaches in order to understand how traditional pattern of patron-clientism found in Malacca and Kelantan, Malaysia are adapted to fit transnational circumstances.

For data collection and analysis, we employed the qualitative data analysis method,

such as the semi-structured in-depth interviews with Cham traders (both men and women), Cham businessman and their labour in clothing business, and Cham public figures in Malacca and Kelantan. We have also carefully interviewed several scholars in universities, like the University of Malaya as well as the University Kebangsaan Malaysia, concerned with Cham people. Moreover, we also carried out observations of on-going activities of the Cham community in Kota Bharu, Kampong Bunga Mas, Penambang, and Kampong Banggol, PCB in Kelantan and the Cham in Tanjung Minyak and *Taman Sri Champa* in Malacca. Field works in Malacca was conducted in May-June 2012 and Kelantan's field work in June-July 2013.

## THE CHAM DIASPORA IN MALAYSIA: HISTORICAL OVERVIEW

Diasporic communities have been emerging along with the rapid transnational movements witnessed by the migrations in Southeast Asia. Cham people, who originally came from the Kingdom of Champa in Central Vietnam, have migrated to Cambodia and Malaysia in several stages. We need to understand the meaning of diaspora that is often used by scholars. Gabrielle Sheffer defines a diaspora as:

A social-political formation, created as the result of either forced or voluntary migration, whose members regard themselves as of the same ethno-national origin and who permanently reside as minorities in one or several host countries. Members of such entities maintain regular or occasional contacts with what they regard as their homelands and with individuals and groups of the same background residing in other host countries. Thus, globalization has engendered the possibility for diasporans to live a transnational community life, psychologically identifying and socially interacting simultaneously with their countries of origin/heritage and their countries of residence if they are interested and willing to do so. As a result, globalization has broadened the set of actors that potentially have a stake in national development to not only include local residents but also emigrants and their descendants as well – if they can be engaged, enabled and empowered to do so.

The first wave of Cham diaspora to Malay Peninsula had caused by the falling of Vijaya, the

capital of Champa Kingdom by the Vietnamese in 1471. Malay Peninsula, particularly Malacca, Kelantan, and Johor was one of destination in the post-1471 Cham diaspora, while others took refuge to Cambodia, Laos, and further away to the Malay Archipelago in Sumatra and Borneo; and to Hainan island in China (Collins, 2009; Mohd. Zain Musa, 2003; Ysa, 2010).<sup>2</sup> During that time, Malacca and Kelantan became main destination for Cham refugees since they had emotional connection, mainly due to ethno-cultural considerations (Wong Tze Ken, 1994).

Quoting from *The Sejarah Melayu* (Malay Annals), Marrison mentions the presence of Cham in Malacca during the reigns of the Malay sultans. They were known to be political refugees who had arrived in Malacca after 1471 (Marrison, 1951). They were well received by the rulers of Malacca, who appointed some Cham noblemen to official positions in the court. The Cham played a very important role in establishing trade links between the Melaka straits area and Indochina where one of the Champa sea captains from Champa Kingdom (nakhoda Campa) had high position in Melaka as important traders (Nishio, 1997). Trade contacts between Champa and Malay traders occurred since 13<sup>th</sup> century. The *Sejarah Melayu* (Melayu annals) also noted that several Cham's vessels were anchored in Malacca, Banten, Makasar, Petani, Kelantan and Java port (P.Y. Manguin, 1979). It shows that the people movement of the Champa Kingdom in Indochina to the Malay Peninsula seemed to be frequent and even lasting.

The second wave of Cham migration from Indochinese to Malay Peninsula took place in 1975-1990s (Sari, 2012). The flow of Cham's migration from Cambodia then go to Thailand and finally to Malaysia as a result of both rebellion and terrible political situation on Cambodia during Pol Pot regime. Since then, refugees from Cambodia and Vietnam fled their country to neighbouring countries,

---

<sup>2</sup> The *Sejarah Melayu* mentions that the presence of Chams in Malacca (Champa Melaka) during the reigns of Sultan Mansyur Syah. They come from descendant of Prince *Indera Berma Syah*, a Cham prince who escaped from Champa after defeated by King of Kuci (Vietnamese) in 1471. They were well received by the rulers of Malacca, who appointed some Cham noblemen to official positions in the court.

such as Thailand, Malaysia, Indonesia, and Western countries. When the Communist regime took control in Cambodia, they were afraid of living under what they considered oppressive government. During the Khmer Rouge regime, they tried to eliminate Cham's culture, tradition and identity because they believed that it should be only one race in Cambodia which is the Khmer (Ysa, 2010). Cham Muslim people were forced to abandon their religious traditions; names related to Islam were eliminated; mosques and madrasah were destroyed and other religious practices abolished. Al Qur'an and other religious readings were wiped out. People were also forced to move out from the Muslim community, or expelled to the jungles and mountains. Culture in the form of activities, clothing, food and accessories was also decimated. As a result, many Cham Muslim people were not familiar with Islam, not good at Arabic and ignorant of Cham culture. Pol Pot eroded Islamic identity of Cham Muslim people (Fauzi, 2011). In a similar vein, Danny Wong mentions that another reason why some people fled Cambodia to Malaysia was because they were enemies of the Communists as they had taken part in the fighting against the regime (Wong Tze Ken, 2013).

Our previous study mentions that Kelantan attracted the largest number of Cham refugees at that time due to several reasons. Firstly, family relations since there were a marriage between princess of Kelantan and Champa regent. A few Cham claimed that they have ancestors from Kelantan since there were mix marriage between Kelantanese and Cham people of Cambodia (Fatimah, Mohd. Zain and Farid, 2009). Secondly, majority of the Kelantanese community was Muslim and they have strong Islamic education connection since long time ago. According to Nik Mohamad, the Cambodian Cham comes to Kelantan in order to pursue their religious study in *pondok-pondok* or *pesantren* in Sungai Pinang, Jalan Merbau, and Atas Banggol which well known as *Surau Kemboja*. Even, several Islamic teachers or *Syeh* from Kelantan went to Cambodia to teach Islam in 19 century (Fatimah, Mohd. Zain and Farid, 2009). The Cham regard Kelantan as Mecca or *Serambi Mekah* because they view Kelantan as center of Islamic education

(*pusat keilmuan*), center of da'wah (*pusat dakwah*) and center of economy. Thirdly, Cham language has affinity with Kelantan language. People carrying such titles as “Nik” and “Wan” in Kelantan and Terengganu, for example, are said to be the descendants of Champa Kingdom. Many Cham also share cultural, religious values similar to the Malays. Finally, Kelantan's east coast was face to face with Gulf of Thailand, so it made easier for the Cham refugees from Cambodia to cross to Malay Peninsula.<sup>3</sup>

The Cham refugees from Cambodia have entered Malaysia from Thailand by overland through Sungai Golok-Rantau Panjang, in the border of Malaysia-Thailand. With the assistance of Thailand government, they left Bangkok by train to Narathiwat in Southern Thailand then cross the border to Kelantan. As reported by actors who take place as informant, their first arrival in Kelantan was the end of a complicated evacuation process and a long struggle for survival at which they were taken away by bus from refugee camps at Thailand-Cambodia border to Bangkok and then by train to be settled in Pangkalan Tujuh and Pangkalan Chepa camps in Kelantan (Manan, 2012). Meanwhile, another group made their own way by sea route with boat or small vessels from Cambodia (Koh Kong) to Trat harbor in Thailand or from Cau Doc (Vietnam) to east coast of Malay Peninsula, namely Kelantan, Trengganu, Pahang, and farther away to Indonesia, Philippines, Taiwan, Hong Kong, and China (Sari, 2012).

By the end of June 1975 to 1988 about 10,722 refugees of Malay Cham ancestry have entered Malaysia and were placed in refugee camps in Kemumin, Pengkalan Chepa, Kota Bahru, Kelantan for one to two years (Nik Mohamed Nik Mohd Solleh. 2004).<sup>4</sup> In the beginning the Cham refugees in Malaysia were paid attention to with feelings of sympathy, but then it became a dilemmatic issue due to the disturbance of the socio economic balance and security issues of the country (Arzura, 2001). Then they have a policy that only Cham refugees

<sup>3</sup> Field interview with Prof. Anis, UM, July 7, 2012.

<sup>4</sup> The camp was later renamed Taman Putra, Kemumin which was administered by PERKIM.

who were mainly Muslim permitted to remain in Malaysia by the government, even after all the refugee camps were closed.<sup>5</sup> Almost 40 years the Cham diaspora live in Malaysia and their number is increasing since Cham migration to Malaysia in fact is still continuing until today. The Cham community can be found in Kelantan (Kota Bharu and Pasir Mas); Terengganu (Kuala Terengganu and Dungun); Pahang (Pekan and Rompin); Johor (Ulu Tiram, Kota Tinggi, and Muar); Melaka (Tanjung Minyak and Bukit Rambai); Negeri Sembilan (Seremban); Selangor (Klang, Banting, Sungai Buluh, Kajang, and Bukit Belacan); Perak (Ipoh, Parit Buntar, and Kuala Kangsar); Pulau Pinang (Nibong Tebal); Kedah (Alor Star); and Perlis (Kangar) (Awang, 2011).

However, until today there is no exact record of the number of the Cham population in Kelantan. According to the Kelantan statistic, the Cham are included under other categories, and some of them might be included under Non-Citizens of Malaysia or others. However, Musa estimated that the Cham people in Kelantan almost 3.000 people, mainly located in Kota Bharu, Phaya Rambai, Kampong Tendung, PCB, Penambang, and Pasir Mas (Musa, 2011: 45).

## **TRANSNATIONAL MIGRATION OF THE CHAM IN MALAYSIA**

At the turn of the last century, many immigrants experienced what is now called transnationalism. In the global economy, changes in transportation and communication (jet air travel, faxes, electronic mail, videos) have enabled immigrants to maintain closer and more frequent contact with their home country and to participate both actually and vicariously in its life, so that they “take actions, make decisions, and develop subjectivities and identities embedded in networks of relationships that connect them simultaneously to two or more nations” (Basch et al. 1994, 7). For example, Italian and Russian immigrants also kept ties of sentiment and connection with family back home by living in

<sup>5</sup> Compared to the Vietnamese, the Cham refugees of Cambodia were given two options by the Malaysian government. The first option was to transit in Malaysia and resettle in third world countries like the one offered to the Vietnamese refugees, and second option was to settle Cham refugees in Malaysia and integrate them into Malaysian society (UNHCR, 1978).

what today are called “transnational households.” In these, family members are scattered across households and they send remittances back home, including political contributions for particular causes, such as the Irish support for the nationalist cause.

In similar vein, as reported by Patterson (2006), the Chinese Diaspora in the US can influence political affairs in the home country. Furthermore: “Strategic transnationalism of brain circulation on the part of Chinese, Koreans, Indians and more recently Mexicans is a form of politico economic agency to stem the predominance of the West” (Patterson, 2006: 1895). As Choi (2003) points out:

*“Ethnic Koreans have contributed to the development of the South Korean economy by transferring their knowledge and skills - which they obtained and strengthened in the more advanced countries of their residence - to their homeland.” (p .25) The South Korean state has long maintained a network of direct and indirect means of influencing the diaspora (Patterson, 2006, 1898).*

Transnational migrants are “immigrants who develop and maintain multiple relationships (familial, economic, social, organizational, religious and political) that span borders” (Basch et al. 1994, 7). Transnational migrants forge a complex matrix of social relationships that connect two localities in two different nation-states. Thus, many migrants go to a receiving area and, rather than severing their social relationships in the sending area, maintain intense ties (Adler, R. 2002). The process of transnational migration emphasizes the deterritorialization of space by showing how migrants are able to create social networks that bind two places, separated by political borders and other boundaries, into one social space (Adler, 2002, 132-33). The experiences of the movements of immigrants are often linked with family ties.

Cham people of Malaysia have encountered a long and winding road to be successful in Malaysia. Fleeing from Cambodia with no money has been experienced by most of the Cham people. Working hard is the main strategy to survive and to live in prosperous life, enough food, clothes,

and house. There have been many sad stories, starting from being able to flee from Cambodia which was in deep trouble, reaching Malaysia, struggling for survive, to being able to have own income for living. Often, informants could not stand when they told their sad experiences. The Cham refugees at that time tried to survive by linking or looking for patron could be local people of Malaysia or families/ relatives who live in Malaysia before. More limited employment opportunities available for Cham refugees due to the language barriers, no capital and skill, and also discrimination have been observed to drive them to self-employment or work to their patron that secures their livelihood. How the Cham refugees use patron client as survival strategy will be illustrated in the paragraph below.

As mention previously, the Cham refugees from Cambodia were placed in the refugee camp in Pangkalan Chepa, Kelantan for at least one-two years. They had nothing and all of their necessities, such as food, clothes, and other necessities were provided by PERKIM (Malaysian Islamic Service Organization) on behalf of the Malaysian government (An interview with Ismail, Malacca, June 2012). They would be allowed to leave the camp only if they had a guarantor/ sponsors that provided them with jobs in batik factories or as farmers in plantation fields, either they stayed together with sponsors or separated from them. At that time, the guarantor was local people (a Kelantanese) or Cham people who lived in Malaysia for long time (*penduduk Melayu tempatan*). After getting sponsorship, they lived with the guarantor to look for a job and live temporary in Malaysia. Some of the guarantors were owners of Batik factories, estate owners, farmers or rice planters who need a work force during harvesting seasons. They were allowed to work in *kilang*, guarantor’s farm of palm oil, and to sell fabric and cloth door to door (*berniaga*). Some of them work as domestic servant as well. In case that those who wish to stay separated from sponsors will get a financial assistance of amount around RM400 from PERKIM (Mohd. Zain Musa, 2006). With the financial assistance they can purchase any kinds of goods such as clothing, household utensils from plastic, cradle and other necessities

and start a new business by selling from door to door (Abdullah, Musa and Mat Zain, 2009, 138).

After left the refugee camps in Kelantan or Pahang, many Cham refugees were tried to look for a better life in other states in Malaysia including Malacca. Beside economic purposes, another reason to move to Malacca was family reunification or follows the previous immigrants. One of our informant, Haji Husein with his family moved to Malacca because his sponsor was his uncle who have been reside in Malacca. He stayed together with his uncle in Malacca and assisted him in running a small business on selling clothes. From his uncle, he got experiences how to sell clothes, create clothes trading network and collect some money to run his own businesses. While Mrs. Fatimah could leave the camp due to her older brother who lived in Malacca since 1979 became her sponsor. From 1984 until now, she lives in Tanjung Minyak, Malacca helps his brother to take care of his clothing shop (*kedai baju*) in Masjid Tanah trading center.

Different reason was mentioned by Mr. Azhari bin Abdullah who entered Malaysia in 1989, he said:

*“I followed my brother in Malaysia and assisted my uncle (mak cik) to sell clothes (niaga kain). Thus, I had worked in factory (kilang) in Syah Alam, Selangor for 9 years. I have been living in Malacca for 5 years and married with Cham Malay in Malacca”.*

From the cases above, network, particularly ethnic networks have been formed between migrants and natives in the host country and between migrants and their home country. In the migratory process, network based on personal relationship, family or common place of origin help in social and cultural matters such as to provide shelter, work, assistance in coping with bureaucratic procedures and support in personal difficulties, such as in obtaining credit, and/or adaptation to a new environment (see Castles, Stephen and Mark J. Miller, 1998; Wahlbeck, 1996). The migration networks also provide the basis of processes of settlement and community formation in the immigration area. Even, migrant groups develop their own social and economic infrastructure, such as worship place, association,

shops, cafes, etc (Castles, Stephen and Mark J. Miller, 1998).

The Cham people reside in groups in Malacca and they can be found in *Taman Sri Champa*, Kampung Datuk Bin, Malacca. However, they are also formed groups in other place, like in Serkam, Bukit Rambai and Masjid Tanah. The *Taman Sri Champa* was located 15 kilometer from Malacca city (*Bandar raya*). The pioneer of this community was Haji Thayib (he was a Cham refugee from Cambodia) who bought 3 Ha (ekar) of land for RM 36.000 from the Chinese. Previously it was *tanah bajak* or land loan from the government, so there had no land title. After clearing of the land and establishing the community, Haji Thayib was followed by his families and relatives who have started to live in *Taman Sri Champa*. They built 22 houses for 22 Cham families which has square 13.5 meters for wide and 35 meters for length per house (Field interview with H. Husein, Kampong Datok Bin, Tanjung Minyak, Malaka, June 12, 2012). Until today, this community was inhabited by 500 of Cham people or 70 households from Cambodia, both the Cham refugees in 1975 and recent migrants who moves to Malaysia voluntarily for economic reasons (Field interview with Ahmad, Kampong Datok Bin, Tanjung Minyak, Malaka, June 12, 2012).

Based on interview with Cham people in Kelantan, Cham communities could be found in many kampongs or areas, including Kampong Banggol, PCB and Kampong Bunga Mas, Penambang. They can be divided into “orang lama” or old people (migrant who moved to Malaysia since 1975) and “orang baru” or new people (Cham people who moves to Malaysia in 2000s till present time). From interview with Cham people in Kampong Banggol, PCB, some of them are rent a house from the local Kelantan and others have their own house. Their houses are behind the Malay house which is quite far from the main road. Only 3-4 families of Malays are living together with the Cham in this kampong. Kampong Banggol located in the PCB road, along the river bank, so they can catch fish easily for daily consumption or growing fish farm in the cages. I can see the river stream from the window. Similar in Cambodia, the Cham people cannot

be separated from the river and they prefer to eat fish than meat (interview with Haji Yakoob, Kelantan).

In my observation in Kampong Banggol, in the daily live they used to gather in the coffee shop and food stalls which become a meeting centres for men, women and children every morning, since the Cham women usually did not prepare breakfast for the family members. Every morning, men and children went to the coffee shop or stall to buy ready cooked food for their breakfast, such as Cambodian mie soup or *nasi air* (porridge) before going to work or school. In the coffee shop in Kampong Banggol, Cham men usually chat to each other and share experiences, such as the problems they were facing, how to expand their market for clothes business. In this place, those who are newcomers can collect information from the previous migrant about job opportunities, temporary settlement, immigration processes, and transportation to get around, place to shop and to eat, and so forth. Sometimes, they also discuss the politic and economic change that has happening in Cambodia. Soon after the men and children left the village, the second group, usually women and men who worked within the village, had their breakfast, such as Cambodian mie soup. The villagers had a number of choices; they could buy breakfast in Ramli's coffee shop, Cik Fatimah or Aini's stalls because these premises operated every morning serving a breakfast to either Cambodian or Malaysian taste.

From discussion with Cham men in the coffee shop, I can conclude that there are some reasons why the new Cham migrants choose Kelantan to settle, not Johor Bharu or other states in Malaysia. Firstly, live in Kelantan is easy or "selesa" to live. Mostly the local people in Kelantan are old people, so they do not have a high competition to get a job or to earn money. In addition the local Kelantanese are very welcome with new migrants, especially similar Muslim fellows. Secondly, they can take their children to get Islamic education in Kelantan. It is very easy for them to send their children to Islamic school and mostly the Kelantanese are very helpful. Thirdly, the situation or environment in Kelantan is not so far different in Kampong Cham in Cambodia. As we know that Kelantan is the

least developed states in Malaysia if we compare with other states. So there is a few shopping mall or modern live. According to them, Kelantan is really Islamic city, in terms of religiousity. They have a public holiday on Friday, not Sunday because Friday is a big day for Muslim. Every woman should wear *baju kurung* with hijab. Fourthly, it is easy to find halal food, masjid, or preacher (majelis taklim) in Kelantan and they are really accepted us. Finally, there are a lot of Cham who reside in Kelantan so they feel like a home because they can gather with their relatives, family, and other neighbour from Cambodia.

Moreover, for Cham people, networking-building among them, specialty with their families and relatives, is very important not only with those who living in Malaysia but also those who living in Cambodia and other countries. For the beginning, a contact and communication among them has been done by those who stay overseas through collecting any information about Cham people, their brothers, sisters and relatives in Malaysia with assistance from national and international concerning agencies on refugees. If collected information is relatively enough, a trip agenda to Malaysia then is made in order to find and meet their families and relatives. A number of informants explained that Cham people living outside Malaysia have no any handicaps or problems about cost spent for overseas travelling, as governments where they stay always support the elder residents with welfare assistance program.

The relationship with Cham people in Cambodia has been initiated by Malaysian Cham due to their very bad collective memory in the past and strong willingness to assist those who living in poverty. Even though Cambodia after Pol Pot regime has changed in many aspects and it is now in developing process, most Cham people are found still marginalized (An interview with Ismail, Malacca, June 2012). Variety of assistance has been drop in the past and it looks likes will be continued in the future. However, the activities do not only involve the Cham Muslims, but also some Malay and Chinese people in Malaysia. This happened long before the 1990s, but grew even more remarkably starting 1993 and became dynamic in the 2000s. The activities can

be divided as follows: humanitarian or charitable work, visiting families or genocide sites, religious education and mosque construction, business or trade relations, and marriages across countries (So, 2014).

The most visible forms of relationship are those established through humanitarian or charitable work, especially through *Qurban* (sacrifices), religious sacrifices feast and donation in the form of money, food, and medicines during Ramadhan (fasting month) from Cham Muslim in Malaysia both individually and collectively to receiver by certain Cham Muslim in Cambodia. According to Awang (2011, 197), sending money to family in Cambodia is very important for bonding amongst the family. The spirit of being 'Cambodian' is also expressed in this kind of remittance built by Cham people in Malaysia with their families in Cambodia. The close relationship between the Cham in Malaysia and the Cham in Cambodia is also acknowledged by the informant, Haji Thayib. who told us that the Cham in Malacca still have close relatives in Cambodia with whom they keep in contact. Thanks to the budget airline services, people can fly from Kuala Lumpur to Phnom Penh and vice versa. Though they have painful memories of Cambodia, Cambodia is still important to them. When we visited Pak Haji, his family was watching a Cambodian TV Channel; to keep up with what is happening in that country.

In her research on Cham Diaspora in Malaysia and Thailand, So (2014) claimed that most Cham Muslims in Malaysia still have a stronger attachment to Cambodia than their fellows in Thailand. This is happened because (1) their migration is more recent, (2) many relatives in their home country are still recognized and identified, and (3) the relationship between the Cambodian government and the Malaysian government is good. This connection is facilitated by modes of transportation, better economic conditions, and security.

Many old Cham Muslims still consider Cambodia their home country; only a few feel reluctant to make such a claim because of their long separation from Cambodia and because their relatives are gone or have already reunited

in Malaysia. And only a small proportion of native-borns view Cambodia to be like their own country because it used to belong to their predecessors.

## **ETHNIC ENTREPREUNERSHIP OF THE CHAM DIASPORA IN MALAYSIA**

Comparing with Cham in Cambodia who mostly involved in primary sector, the Cham diaspora in Malaysia engaged in secondary sectors, such as trading or working in home industry. The Cham in Malacca, Kelantan, Johor Bharu, Trengganu mainly engaged in clothes household home industry and petty trading. Some of them also work in Batik factories, small clothing shop, food stall, and selling fabric and clothes door to door independently. While the Cham in Pekan and Pahang are fisherman on cage and fish traders. Other occupations are running a food stalls, labour construction, raising cattle, and farmer. While the Cham in Kuala Lumpur, Selangor, Seremban engaged as labour in some companies, domestic helper, and petty traders. When their economic condition better off, they began selling clothes, both small and large scale (Sari, 2012). The Cham's economic life of the first generation in Malaysia is characterized by trading activity as a simple choice as well as an available chance to do at that time in Malacca and Kelantan, particularly clothing trade. This situation caused by the social environment in Malaysia, especially in Malacca and Kelantan, has changed their basic human resource capacity as farmers and fishermen when they lived in Cambodia to become merchants (Manan, 2012). Moreover, the Cham refugee from Cambodia previously did not have a high education or other skill, so they can not apply any job in Malaysia. The last opportunity for them to earn money just from selling door to door (Interview with Romlah, Cham trader in Pasar Tok Guru, Kelantan, May 2013).

In general, Cham's serious effort to trade is intended to be clothing business a main commodity, even until at present time.<sup>6</sup> As stated by Ismail, an informant who also staying in Taman Sri Champa Residence, Malacca the reason why

---

<sup>6</sup> Although majority of Cham in Malacca and Kelantan is clothing traders, but a little bit of them sell another commodities, such as foods, plastic materials and other household equipment.

the clothing is to be the main Cham's trading commodity is just because it is a part of people's basic needs, particularly for Malaysian Muslims who do need new clothing to celebrate the two holy celebration days every year, i.e. Idul Fitri and Idul Adha Muslim's feast sacrifice. Therefore, undoubtedly that to sell clothing commodity is a prospective business, both quantity and income.

In similar vein, Haji Yakoob, a Cham entrepreneur in Kelantan mentions that Kelantan is one of the clothing or baju kurung production in Malaysia. Majority of the Muslim clothes in Malaysia, such as baju kurung, baju koko, tudung, kain telekung were produced in Kelantan. The Cham in Kelantan mainly involved in clothes home industry as tailor, cutting the fabrics, ironing, and packaging. Some of them are selling cotton, *yarn, needle, buttons, zipper*, etc. Another Cham made *baju kurung* and kain tudung with Kelantan batik in his workshop. The Cham who has big capital owns clothing shop (*kedai baju*) which sold many kinds of *baju kurung*, sarong, praying clothes, *tudung, songkok*, praying mat, tasbeeh, religious books, etc. Some Cham also sell clothes in the market, small shops, and door to door (Sari, forthcoming).

The involvement of Cham people in trading activities is not a new thing. Mohamad Zain Musa (2003) explains that after leaving the refugee camp, some of the Cham refugee works as shop assistant for the local people, especially textile and clothes shop. From this previous job, he got the experience and tried to run his own clothes business at very small scale. They earn the money little by little for capital. By using such capital, they have started to run their own business. This clothes business has opened up opportunities and broader network of the other Cham communities who want to participate in the business. When clothes businesses are running well, they tried to open new business on groceries (*rungcit*) which sell daily necessities or other profitable business. Interview Mr. Azhari bin Abdullah in his stall in Kota Bharu who entered Malaysia in 1989 said:

*"I work as clothes trader door to door and in the night market. I give a credit for RM10/month for my customer. They can pay anytime when I visit their houses. Even though I got a small profit, but still I can sell clothes. When the clothing sales decrease I change to sell*

*fabric or to open small store (rungcit) which sold daily necessities, such as sugar, eggs, instant noodle, canned food, soft drinks, etc. I think rungcit is profitable since it provides daily necessities which everyone needs. During Ramadhan time, when the clothing demands high, I start to sell clothes door to door again".*

The involvement of the migrants into entrepreneurship sector can be explained by the disadvantage theory and the cultural theory. Disadvantage theory suggests that most immigrants have significant disadvantages hampering them upon arrival but which at the same time steer their behavior (Fregetto, 2004). Firstly, they lack human capital such as language skills, education and experience, which prevent them from obtaining salary jobs, leaving self-employment as the only choice. Secondly, lack of mobility due to poverty, discrimination and limited knowledge of the local culture can lead ethnic minorities to seek self-employment. This theory sees entrepreneurship not as a sign of success but simply as an alternative to un-employment. The cultural theory suggest that ethnic and immigrant groups are equipped with culturally determined features such as dedication to hard work, membership of a strong ethnic community, economical living, acceptance of risk, compliance with social value pattern, solidarity and loyalty, and orientation towards self-employment (Fregetto, 2004).

This theory can be applied into the case of Cham diaspora in Malaysia. As a refugee from Cambodia at that time they lack of education and skills. Barely they can speak Malay fluently and face a cultural gap with the local Malay. At that time, small scale trading was the only opportunities for the first generation of the Cham diaspora to survive in Malaysia because it does not need high skill. They sell clothes by uphold it and sold it door to door, even very far into the palm oil plantation from dawn to dusk. They also sell ice cream, plastic utensils, and other daily necessities from kampong to kampong (Sari, forthcoming). Malay informant pinpointed that if we look for Cham people, we need to see the street the clothes trader since they have often opened tents to sell clothes in certain areas.

Night market could be one of popular place for the Cham to open stand for clothes.

The Cham traders are well known as work hard person, diligent, and honest which make them are being trusted by the Malay and Chinese businessman. They have got a big loan and a credit from the Chinese, Indian, and Malay tauke to sell clothes. From the interview with Cham traders in Masjid Tanah Commerce center, most of them take the clothes from the Chinese supplier in Kuala Lumpur, Pudu, Masjid India with an installment system where they pay for only 50 percent or less for down payment and the rest of payment will be done after selling the clothes. The amount of money and the time to pay depend on the agreement between the suppliers and traders. Moreover, the traders can return unsold clothes to the suppliers and change to other models. Meanwhile, the Cham entrepreneur in Kelantan also took textile and other necessities from Indian tauke, called Jackel. He got the fabric/ textile even the sewing machine from the tauke to run off their clothes business. In addition, they are very observant to look for economic opportunity both in Malacca and Kelantan which make them success in clothes business, both a small and a large scale. They are adaptable person who eager to adapt with local culture and customs and way of life of Malay people and try hard to learn Malay language in order to interact with their Malay customer (Sari, 2012).

It is admitted by many informants; Malays of Malaysia, that Cham people are hard workers. One Professor in University of Malaya told us that if people wanted to know the Cham, they simply needed to look at the clothing traders which would show that they are mostly Cham. He further said that the Cham often sell clothes door to door or erect a tent to sell clothes whenever there are events in their areas. Interview with local people of Kelantan also stated that the Cham people in Kelantan are hard workers. They woke up very early in the morning to work as ice cream sellers, traders, shop keepers, and any kind of work until midnight. They never feel shameful with his job because they believe what they do is "halal".

Ahmad, a Cham informant entered Malaysia told us that his parents, brothers and sisters in 1979 as refugee when he was nine years old. He will never forgotten his self-experience in which any kinds of trading goods had been on the backs by his parents and offered to local people from door to door from one village to another for their survival. What Cham expected is so simple, i.e taking rice home to consume by members of family, mainly as encouraged by experiences living in Cambodia during Pol Pot Regime in poverty and hunger. For Cham, the most important to reach are that ability to survive, chance to build the future and ability to take children to school (An interview with Ahmad, Malacca, June 2012).

Furthermore, Ahmad explained that the way Cham offered their trading goods from one village to another was in a positive way, so that local people conveyed deep sympathy a sense of humanism on the basis of positive social values and order within society at the time. This sympathy in fact was a real encouragement that gave them a spirit to continue their efforts. Contrary to that situation, we ensures that the intended way of trading is not suitable to be done at the present time as community's social order grows to be more complicated so that emerging negative thinking and assumption from local people to unknown persons.

In 42 years old, now Ahmad has become a successful clothing merchant mainly because his work hard and fighting spirit derived from his parent's attitude and teaching. As a successful merchant, now he is living with his family in welfare condition in which he owns a big house located at Taman Sri Champa Residence. On top of this, he owns a car, and a clothing shop situated in Seremban, Negeri Sembilan State.

This condition is really different with the first generation of the Cham refugees. If we look at their economic position of the Cham people, especially those who come around 1979 and contemporary arrival, have been improving, but have not been strong enough since they mostly engaged in petty trading or workers at garments. Based on interview with many Cham people, they have not been able to take loan from the

bank. Some people do not know how to deal with the loan and others are afraid if they cannot pay the loan. Their capitals are therefore from their own money or borrow from their relatives. As mention above that they have mostly started it from very small business. Some even sell clothes in the street or door to door (Maunati, forthcoming). Today, many Cham's second generation in Malaysia work as businessmen, teacher, doctor, lecturer in some university in Malaysia or continue their parents business as clothes traders. They got higher education and many opportunities to work in Malaysia. Even, some of them are getting married with Malaysian.

The Cham's success in trading more or less is influenced by the way they undergo that business, from traditional method by offering commodity from door to door to be centered at afternoon and morning markets<sup>7</sup> to establish shops as a new way. By this way, Cham traders, especially the Cham in Malacca take their trading commodity to afternoon and morning markets by vans as operational vehicles to several locations, such as Jasin and Malimau markets of Malacca. In addition, the Cham's possessing of a number of permanent shops in some places like in Masjid Tanah district, Seremban and Johor is an indicator of their success, such as in Masjid Tanah district. Some of them own more than one or two shops. In this district, almost all clothing shops are under Cham traders' control even though some of them are rental shops. Abdul Razak in an interview occasion said that the shop rental rate in Malacca is around MYR 1.600 a month or equivalent to IDR 5 million.

Salmah, for instance, is a Cham woman in Masjid Tanah district who has started her business since she was 12 years old. After renting a shop from a Chinese merchant for 8 years, she is finally able to purchase the shop to be her belonging with amount of MYR 150.000 or equivalent to around IDR 500 million. Now she takes three local women to employ as shop servants to serve local customer. Indeed, like other Cham traders, she has struggled to be like

---

<sup>7</sup> Afternoon and morning markets are shopping centers that are located in certain locations or areas and conducted in certain days, including along with main roads. Malaysian authority allows traders who have license to use these areas to trade.

today situation. The struggle to survive has been a journey a long as well.

Although the Cham's socioeconomic welfare is relatively high, clothing business does not always run smoothly. Income will increase significantly around thousands Malaysian Ringgit only during a month before Idul Fitri and Idul Adha celebration days. For the whole days except the two celebration day, the daily income is usually about below MYR100 until MYR400. Even in certain situation no income is derived from consumers (An interview with Salmah, Malacca, June 2012). However, Cham traders have never been hopeless, as this kind of business is their real and main life resource which cannot be replaced by others. This has been admitted by many Malays who told us when we talked about Cham people in Malaysia.

The clothes business, both in Malacca and Kelantan is usually undergone by all members of a family where fathers take role as managers meanwhile their wives take part either as sellers or servants as well. They also involve their children, particularly teenagers, to take part and contribute in more actively outside school hours (Abdullah et.al., 2009, 141). The involvement of teenagers in this business is very important as a teaching process. Women are basically the main actors and controllers while doing transaction with consumers in shops. As managers, husbands have also another role to build a network with other trading partners, such as commodity suppliers or selling agents. For instance, Mr. Ashari, a wellknown Cham trader in Kelantan, with his father and other relatives usually going for business trip to Pasar Tanah Abang in Jakarta, Vietnam, and China to looking for fabric or material for baju kurung. They negotiate with the supplier directly and choose the materials for their clothes. He said that in the past the materials from Indonesia was cheaper, but now majority the materials and fabric come from Vietnam and China because it was much cheaper comparing to Indonesia (An interview with Mr. Ashari, Kelantan, June 2013). Meanwhile, Cham traders in Masjid Tanah district, Malacca for instance, receive trading commodity supply particularly from suppliers or big companies in Kuala Lumpur without cash payment system. They usually gain

advantages to make payment several days or weeks after transaction is made.

In terms of the division of labour, the Cham in Kelantan also employ husband, wives, children, and large family member. Mr. Ashari's shop in Pasar Lama, Kelantan provides all of the clothes for man only, like songkok, baju kurung, sarong, Al'quran, parfumes, etc, while his wives also runs one shop in Pasar Lama too. But she sells all the stuff for woman, like kain telekung, scarf, tudung, fabrics, .etc. her children always help her to manage the clothes in the warehouse.

Another economic activity involving women's participation is 'cloth trading', one of the oldest and most popular jobs among the Cham in Malaysia. My general observation was that large numbers of the Cham woman in Malacca and Kelantan were involved in this kind of business. The Cham women traders have their own skill how to attract the potential customer. They do not force the customer to buy the commodities, good service, attractive in lip service, very polite and honest. They also dare to give credit or flexible payment for their customer. For instance they sold clothes for RM80, the buyer can pay it in 5-6 months (only RM15/ month). These conditions make the Cham traders favors and popular among the local Malays (Sari, forthcoming). Similarly, in business, Cham women in Vietnam seem to be more skillful. Cham women are good/better at selling than them. Cham women know how to convince customers and they are clever at trading goods (Huynh Van Phuc, *et al*, 2011)

In Kelantan, the Cham entrepreneurs had managed to set up a wholesale market in Pasar Waqaf Che Yeh, Pasar Lama MPKB, and Pasar Tok Guru known as '*Pasar Borong*' among the Malays. This is the biggest 'wholesale' market in Kelantan. In Kelantan they also sold clothes in the night market in Kota Bharu, which operate every Saturday and Sunday evening. While on the weekend, they sell it in morning market near their community. The night and morning market is a kind of mobile market. Its mean that the traders bring their goods by car or van and sell them in the market. When the market is over (night market from 6 to 11 pm, while morning market from 6 to 12 am) they tidy up their goods

on van. They usually choose strategic location to sell clothes, such as bus station, empty land on the corner of street, near the market and *pusat keramaian* where the local people can find them easily. The commodities are clothes, long dress or *baju kurung*, ready wear *tudung*, sarong, kain batik and fabrics. The sales increase significantly during Ramadhan time or "*Hari Raya*" (Sari, forthcoming).

As it is stated above, trade is Cham's main economic aspect to enable their socioeconomic life moving up. Nevertheless, it is not all mainly for their young generation whom were born as Malaysian people. This new looks or paradigm emerges due to current situation in which Malaysia is developing to be a country appreciating not only its economy development but also its science and technology achievement. This phenomenon indicates that Cham's first generation worldview most differs from the second generation's one. For the Cham's second generation instead, high education and universities as well are significant aspects promising them to be able to reach better future, including better social-economic status among community.<sup>8</sup> In addition to this trend, Ahmad told us that today we can find a number of Cham second generation work as civil servants in government and private offices in the country. Ahmad's daughter<sup>9</sup> who is now a university student also told us that she will run for posts whether in governmental or private sectors after graduating from the university. However, some of them also insist to continue their parent's clothes business.

Living in residences and trading the same trade commodities in the same areas can be regarded as ways how Cham build and construct its social networking, particularly among their community. To strengthen this primordial ties, Cham's first generation choose to marry Cham one and other. Malay people's world view on Cham as Cambodian is a factor leading to marriage with Cham is not an easy way.

The mindset then changes in which Cham's second generation who was born in Malaysia can marry Malay people of Kelantan

<sup>8</sup> An interview with Ahmad, Malacca, June 2012

<sup>9</sup> An interview with Nurul Saidah, Malacca, June 2012.

and outside this state.<sup>10</sup> Wider communication between Cham and Malay people in schools, university campuses, public sphere and working areas have resulted in assimilation among them to be closed, particularly Cham's second generation is also citizen of the country similar to that of the Malay people. Another strategy is that to assimilate with Malay people. Some of Cham even marry them. We also can find Cham persons actively involved in Islamic religious activities, mainly because they are Moslems and consider Islam as their main identity. Ahmad said that a praying big leader of Tanjung Minyak Mosque is a Cham. As self-identity, Cham community then can be accommodated by Malay in every life sectors.

## CONCLUSION

The relationship between Malay and Cham people are a long lasting relationship since they have emotional connection, sharing similarities in ethnic ties, language, culture, and religion. Wars and economic problems in Cambodia caused the Cham migration to Malaysia in 1975 by using inland ways and water ways. The Malaysian government and local Malays have welcomed the Cham refugees due to ethno-cultural consideration and also humanitarian factor. The Cham refugees in Malaysia were assisted by Malaysian government (through PERKIM), international agency (UNHCR) and their families who moved to Malaysia previously.

It has been a long and hard struggle for the Cham who used to be refugees from Cambodia but now show that they are successful economically. Fleeing from Cambodia with no money has been experienced by most of the Cham people. Working hard is the main strategy to survive and to live in prosperous life, enough food, clothes, and house. Moreover, informal networks based on personal relationship, family, friendship, and community ties assist the Cham diaspora settle down in Malaysia and start their business. Majority of the Cham entrepreneurs in Malaysia hire family and relatives from Kampong Cham and other provinces in Cambodia to work as their labour. They use their knowledge about

Malaysia to offer aid to fellow migrants, such as information of job opportunities, temporary settlement, and so on. Then this ethnic network plays an important role in their ethnic businesses and economic survival strategy, both for the previous migrant and new comer migrants. Clothes trading networks have been the main strategy for the Cham refugees to struggle and survive in Malaysia.

Another strategy is that to assimilate with Malays people by married with local Malays especially for Cham diaspora second generation. They get to live with Malay people in the same neighborhood, which enhanced their presence in this place of last resort. We also can find Cham persons actively involved in Islamic religious activities, mainly because they are Moslems and consider Islam as their main identity. As self-identity, Cham community then can be accommodated by Malay in every life sectors.

## ACKNOWLEDGEMENTS

This paper is based on the research Cham Diaspora in Southeast Asia: History of Migration and Construction of Identity (Study Case of Malaysia) from 2012-2013. Thank you to other team member: Prof. Dr. Yekti Maunati, MA and Azzam Manan, MA.

## REFERENCES

- Arzura. Idris. (2012). "Malaysia and Forced Migration". *Intellectual Discourse*, Vol. 20, No. 1.
- Awang. Siti Noor.(2011). "Kiriman Wang, Hubungan Kekerabatan dan Masyarakat Cham di Malaysia". *Journal Sosiohumanika* 4 (2), UM, Kuala Lumpur.
- Adler. R. (2002). "Patron-Client Ties, Ethnic Entrepreneurship And Transnational Migration: The Case Of Yucatecans In Dallas, Texas." *Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems and World Economic Development*, Vol. 31, No. 2.
- Basch, Linda, Nina Glick-Schiller, and Cristina Szanton-Blanc (1994). *Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States*. Langhorne, PA: Gordon and Breach.

<sup>10</sup> Fatimah Abdullah, et.al., Op.Cit., hlm. 140.

- Castles, Stephen and Mark J. Miller. (1998). "The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World", *The Migratory Process and the Formation of Ethnic Minorities*. Hampshire: MacMillan Press
- Collins, William. (2009)., 'Part I: The Muslims of Cambodia', in 'Ethnic Groups in Cambodia', Phnom Penh, Center for Advanced Study
- Effendy, Mohamed bin Abdul Hamid. (2006). "Understanding the Cham Identity in Mainland Southeast Asia: Contending Views", *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* Vol. 21, No 2.
- Fatimah, Mohd. Zain and Farid. (2009). "Struktur dan Organisasi Sosial Orang Cam di Malaysia". *Journal Jati*, Vol. 14, December 2009.
- Fregetto E. (2004). "Immigrant and ethnic entrepreneurship: a US perspective" in *Entrepreneurship: The Way Ahead*. Edited by: Welsch HP. New York: Routledge
- Fatimah Abdullah, Mohamad Zain Musa & Farid Mat Zain. (2009). "Struktur dan Organisasi Sosial Orang Cam di Malaysia", *Journal Jati*, Vol. 14, December 2009.
- G. Sheffer, (2006). *Diaspora Politics: At Home and Abroad*. Cambridge: Cambridge University Press
- Huynh Van Phuc. Somchai Phatharathananunth, Srisakra Vallibhotama, Khwanchewan Buadaeng. (2011). "The Adjustment of the Muslim Cham Female in the Vietnam's Mekong Delta to the Cultural Policy and Economic Changes after Doi Moi Policy". *European Journal of Social Sciences*, Vol.27 No.1 (2011).
- Maunati, Y. (2011), 'Transnational Migration and Cham Identity', *Cham Diaspora in Southeast Asia: Construction of Identity and Transnational Network (Study Case of Cambodia)*. Jakarta: LIPI Press
- Maunati, Y. (2012). Cham identity: The Case of The Cham in the Malaysian Peninsula in *Cham Diaspora in Southeast Asia: History of Migration and Construction of Identity (Study Case of Malaysia)*. Jakarta: Gading Inti Prima
- Maunati, Y. (forthcoming). "The Cham Identity in the Making: The Cham Diaspora and the Cham of the "homeland"" in *The Cham Diaspora in Cambodia, Malaysia, and Vietnam: Changing Identities and Transnational Networks*. Jakarta: LIPI Press
- Manan. M. Azzam. (2012). Cham Diaspora in Malaysia: Economy Dimension and Social Networks in *Cham Diaspora in Southeast Asia: History of Migration and Construction of Identity (Study Case of Malaysia)*. Jakarta:Gading Inti Prima
- Mohamad Zain Musa. (2003). "Masyarakat Cham di Malaysia: Tumpuan di Negeri Kelantan" dalam *Peradaban Melayu Timur Laut*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Mohamad Zain bin Musa. (2008). "Perpindahan dan Hubungan Semasa Orang Cham". *Sari* 26 (257-272).
- Mohamad Zain Musa & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman. (2006). *The Cham Community Through The Ages*. Kuala Lumpur: Ikatan Ahli-ahli Arkeologi Malaysia.
- Nik Hasan Shuhaimi Nik Abdurrahman. (2006). "Champa and Other Malay Civilizations" in *The Cham Community Through The Ages*. Ikatan Ahli-ahli Arkeologi Malaysia. UKM, Bangi, 2006.
- Nik Mohamed Nik Mohd Solleh. (2004). "*The arrival and presence of the Champa people in Malaysia*" presented at a Cham Conference in 2004, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Patterson, Rubin. (2006), 'Transnationalism: Diaspora-Homeland Development', *Social Forces*, Vol. 84, No. 4 (Jun., 2006).
- So, Farina. (2013). *Cham Muslims in Malaysia and Thailand: Then and Now. Encountering Asian New Horizon: Contesting and Negotiating in Fluid Transitions*. The 12<sup>th</sup> API Regional Workshop. Sanur, Bali, 24-27 November 2013.
- Sari. Betti Rosita. (2014). "Diaspora Etnis Cham di Malaysia dan Perannya dalam Pembangunan Muslim Minoritas Cham di Kamboja" in Prima Nurahmi Mulyasari (eds.). *Migrasi Internasional di Asia dan Eropa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Sari. Betti Rosita. (2012). "Life and Economic Struggle of the Cham Diaspora in Malaysia From 1979-Present" in *Cham Diaspora in Southeast Asia: History of Migration and Construction of Identity (Study Case of Malaysia)*. Jakarta:Gading Inti Prima
- Sari. Betti Rosita. (Forthcoming). "Ethnic Entrepreneurship and Economic Networks of Cham Diaspora in Cambodia, Malaysia, and Vietnam" in *The Cham Diaspora in Cambodia, Malaysia, and Vietnam: Changing Identities and Transnational Networks*. Jakarta: LIPI Press
- UNHCR. (2005), September 13. UNHCR assesses South Thai Muslim arrivals in Malaysia. Retrieved October 10, 2012 from <http://www.unhcr.org/4326c8f514.html>.
- Wong Tze Ken, Danny. Vietnam-Champa Relations and the Malay-Islam Regional Network in the 17th–19th Centuries Retrieved from <http://>

kyotoreview.org/issue-5/vietnam-champa-relations-and-the-malay-islam-regional-network-in-the-17th-19th-centuries/ on August 12, 2016

Wahlbeck, Östen. (1996). "Diasporic Relations and Social Exclusion: The Case of Kurdish Refugees in Finland" in *Siirtolaisuus - Migration*, 4/1996. Retrieved from [http://www.migrationinstitute.fi/articles/047\\_Wahlbeck.pdf](http://www.migrationinstitute.fi/articles/047_Wahlbeck.pdf) on December 12, 2012

Ysa Osman. (2010). *Navigating the Rift: Muslim-Buddhist Inter-marriage in Cambodia*. Cambodia



# **‘COME TO HOLLAND’: PROMOSI PARIWISATA BELANDA BAGI HINDIA-BELANDA DAN INDONESIA**

## ***‘COME TO HOLLAND’: TOURISM PROMOTION OF THE NETHERLANDS FOR DUTCH EAST INDIES AND INDONESIA***

**Achmad Sunjayadi**

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia  
Email: *achmad.sunjayadi@ui.ac.id* atau *achmad.sunjayadi@gmail.com*

Diterima: 22-2-2017

Direvisi: 22-3-2017

Disetujui: 3-4-2017

### ***ABSTRACT***

*Relation between Indonesia and The Netherlands, particularly in the tourism sector has been established long time ago. The relation has been built since Indonesia still part of Dutch colony until now. Relation in the tourism sector had disconnected between the beginning of Second World War until the 1950s. This article tries to trace the relation and the contemporary situation of the tourism sector in Netherland. The discussion focuses on the Netherlands as a tourism destination for the Dutch East Indies’ verlofgangers (those who furlough) and for Indonesian tourists. The question is how Netherlands promote their country as tourist destination and the reason why they promote their country to Dutch East Indies and Indonesian tourists. The data sources for this article are from Dutch’s newspapers and magazines during the colonial period, archives of tourism agencies in the Netherlands as well as Dutch contemporary newspapers,.*

**Keywords:** *The Netherlands, Indonesia, Dutch East Indies, tourism, promotion*

### **ABSTRAK**

Hubungan antara Indonesia dengan Belanda dalam sektor kepariwisataan sudah terjalin lama. Hubungan tersebut terjalin sejak Indonesia masih Hindia-Belanda dan berada di bawah kepemimpinan Belanda hingga Indonesia merdeka. Hubungan di sektor kepariwisataan itu sempat terputus pada masa awal Perang Dunia II hingga tahun 1950-an. Artikel ini membahas jejak hubungan dan situasi kontemporer sektor kepariwisataan di kedua negara. Bahasan dititikberatkan pada Belanda sebagai negara tujuan wisata bagi penduduk Hindia Belanda yang ketika itu disebut *verlofgangers* (orang yang mengambil cuti) dan wisatawan Indonesia pada saat ini. Pertanyaan yang akan dijawab pada studi ini adalah bagaimana Belanda mempromosikan negerinya serta alasan di balik promosi itu. Sumber yang digunakan adalah arsip surat kabar dan majalah pada periode tersebut, arsip dari lembaga pariwisata di Belanda. serta surat kabar kontemporer terbitan Belanda.

**Kata kunci:** Belanda, Indonesia, Hindia-Belanda, kepariwisataan, promosi

### **PENDAHULUAN**

Pada tahun 2015 pemerintah Belanda melalui *Holland Alliance* mengadakan promosi pariwisata dengan slogan ‘*Come to Holland*’ (‘Ayo ke Holland’). *Holland Alliance* terdiri dari empat perusahaan pendiri yaitu NBTC (*Nederlands*

*Bureau voor Toerisme en Congressen*) Holland Marketing, Amsterdam Airport Schiphol, Amsterdam Marketing, dan KLM Royal Dutch Airlines (en.tempo.co, November 2015). Tujuan dari promosi tersebut adalah untuk memenuhi

target sebanyak 44.000 wisatawan asal Indonesia pada tahun 2015.<sup>1</sup>

Berdasarkan data dari NBTC, jumlah wisatawan asal Indonesia yang mengunjungi Belanda pada 2014 sebanyak 42.000 orang. Jumlah tersebut meningkat 8 persen dari tahun 2013 yaitu sebanyak 38.640 orang. NBTC memiliki informasi mengenai wisatawan Indonesia, seperti alasan, kota yang sering dikunjungi, dan profil wisatawan. Alasan umum wisatawan Indonesia mengunjungi Belanda adalah untuk berbelanja. Kota yang paling sering dikunjungi adalah Amsterdam. Tiga kota lainnya adalah Den Haag, Utrecht, dan Rotterdam. Dari data NBTC mengenai profil wisatawan juga diketahui bahwa sekitar 40 persen wisatawan Indonesia datang ke Belanda dalam kelompok.<sup>2</sup>

Belanda sebagai salah satu negara di Eropa ternyata menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak disukai oleh orang Indonesia. Keberadaan keluarga yang tinggal di sana dan keterkaitan emosional dalam sejarah tampak menjadi salah satu alasan penduduk Hindia dan kemudian Indonesia berwisata ke Belanda. Alasan inilah yang menjadikan Belanda sebagai salah satu pilihan wisatawan Indonesia meskipun letaknya jauh di benua Eropa dan harus ditempuh selama empat belas jam dengan pesawat terbang.

Terkait dengan upaya menarik jumlah wisatawan melalui promosi yang dilakukan oleh pihak Belanda, artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan apa alasan Belanda mempromosikan negerinya bagi wisatawan Hindia dan Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Kurun waktu tertentu di sini adalah periode ketika Hindia-Belanda masih merupakan koloni Belanda dan sesudah Indonesia merdeka.

<sup>1</sup> Data jumlah wisatawan asal Indonesia yang mengunjungi Belanda pada akhir 2015 belum ditemukan. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara sebagai pasar potensial wisatawan di Asia bersama Korea Selatan, Taiwan, dan China. Meskipun dilihat dari jumlah masih relatif kecil, lihat Kim de Bruijn, *Tendrapport toerisme, recreatie, en vrije tijd 2015*, hal.70, 90. Sebaliknya data jumlah wisatawan Belanda yang mengunjungi Indonesia pada 2014 diketahui sebanyak 168.494 wisatawan berdasarkan data [www.kemenpar.go.id](http://www.kemenpar.go.id).

<sup>2</sup> Selain dalam bahasa Belanda informasi mengenai hal ini dapat juga diperoleh dalam bahasa Inggris, lihat <http://www.nbtc.nl/nl/homepage/samenwerken/internationaal-team/indonesie.htm> diakses 7 Juli 2016.

Periode yang dipilih adalah ketika Belanda mulai mempromosikan negerinya pada tahun 1916 hingga tahun 2015. Tahun 1916 merupakan tahun pembentukan ANVV (*Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer*) yaitu Perhimpunan Umum Pariwisata Belanda yang bersifat nasional. Salah satu tugas organisasi ini adalah mempromosikan pariwisata Belanda di luar negeri. Tahun 2015 merupakan batas tahun pembahasan studi ini karena pada tahun itu Belanda mengeluarkan promosi ‘Ayo ke Holland’.<sup>3</sup>

Kajian yang membahas promosi Belanda sebagai negara tujuan wisata bagi penduduk Hindia-Belanda dan Indonesia tidak banyak. Hal ini mungkin disebabkan rentang periode pembahasan yang cukup panjang yaitu dari masa kolonial (Hindia-Belanda) sampai pasca kolonial (Indonesia). Selain itu kajian yang ada, membahas secara terpisah kedua periode tersebut.

Studi Poeze (1986) merupakan salah satu kajian tentang orang Indonesia di Belanda yang patut diperhitungkan. Kajian Poeze membahas orang Indonesia di Belanda dari akhir abad ke-19 hingga 1950. Walaupun tidak secara khusus membahas Belanda sebagai tujuan wisata warga Hindia (Indonesia), tetapi dari kajian tersebut memberikan informasi mengenai para ‘wisatawan’ Indonesia, terutama pada masa kolonial. Sementara itu dari kajian de Graaf (2009) diperoleh informasi mengenai Belanda sebagai negeri tempat berlibur bagi *verlofgangers* (orang yang mengambil cuti) dari Hindia-Belanda. Para *verlofgangers* ini dikategorikan sebagai ‘wisatawan’ dari Hindia-Belanda.

<sup>3</sup> Tema ‘Ayo ke Holland’ terjemahan dari ‘*Come to Holland*’ tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ‘Ayo ke Belanda’. Hal ini dapat dikaitkan dengan kota-kota tujuan wisata utama di Belanda yang dipromosikan berada di wilayah Holland (utara dan selatan), bukan Belanda secara keseluruhan. Dalam kata sambutan Direktur NBTC Holland Marketing kata Holland ditulis ‘Holland’ (dengan tanda kutip), lihat NBTC Holland Marketing, *Toekomst Perspektief Destinatie Holland 2025*. Den Haag: NBTC Holland Marketing, 2013, hal.2; Istilah Holland kerap digunakan untuk mengacu kepada seluruh wilayah Belanda. Holland yang berada di bagian barat Belanda sebenarnya adalah nama provinsi di Belanda yang terdiri dari *Noord Holland* (Holland Utara) dan *Zuid Holland* (Holland Selatan). Nama resmi Belanda adalah *Koninkrijk der Nederlanden* atau *the Kingdom of the Netherlands* dan kerap disebut *the Netherlands*.

Salah satu studi yang membahas Belanda sebagai tujuan wisata menempatkan salah satu kota di Belanda sebagai tujuan wisata, misalnya kajian Dahles (1998) membahas Amsterdam sebagai *landmark* nasional Belanda. Namun, studi ini tidak menyinggung wisatawan dari Indonesia. Kajian mengenai Belanda sebagai tujuan wisata dibahas oleh Edijono (2015). Studi ini membahas Belanda sebagai salah satu negeri tujuan wisata sebagai bagian dari wilayah Benelux (Belgie –Nederland – Luxembourg). Ditinjau dari periode yang dibahas, kajian ini bersifat kontemporer dan tidak secara khusus membahas penduduk Indonesia sebagai salah satu wisatawan yang berkunjung ke Belanda. Namun, kajian tersebut memberikan informasi mengenai kebijakan Belanda terkait promosi pariwisata internasional.

Berbagai sumber yang digunakan dalam artikel ini adalah surat kabar, majalah, dan berbagai buku sezaman yang dipadukan dengan data dari pihak yang melakukan promosi pariwisata Belanda (NBTC). Data ini dapat diperoleh dari internet.

## PROMOSI PARIWISATA DI BELANDA DI ANTARA MASA PERANG

Salah satu pihak di Belanda yang bertugas mempromosikan pariwisata Belanda adalah ANVV (*Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer*) – Perhimpunan Umum Pariwisata Belanda. Perhimpunan yang berkantor pusat di Den Haag ini didirikan pada 1916 (*Leeuwarder Courant*, 9/6/1916).<sup>4</sup> Secara resmi ANVV dibentuk pada 1 Januari 1916 dengan tujuan yang tercantum dalam *Koninklijke Besluit* untuk: *het bevorderen van het Vreemdelingenverkeer naar en in Nederland* (mengembangkan/mempromosikan pariwisata ke Belanda dan di Belanda). Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut ANVV membuat reklame baik di dalam maupun luar negeri serta sebanyak mungkin menjalin kerjasama

<sup>4</sup> *Algemeene Nederlandsche vereeniging voor vreemdelingenverkeer* mulai beroperasi sejak 1 April 1916. Perhimpunan ini terdiri dari VVV (*Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer*) perhimpunan pariwisata lokal, ANWB, *Toeristenbond voor Nederland*, *Koninklijke Nederland Automobilclub*, perusahaan kereta api dan pelayaran.

dengan perusahaan-perusahaan transportasi, menangani kritik, mempromosikan pendirian VVV (*Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer*), dan membantu VVV dengan menyebarkan bahan reklame.<sup>5</sup>

Pembentukan perhimpunan ANVV di tengah-tengah situasi Perang Dunia I (1914-1918) berpengaruh terhadap upaya untuk mencapai tujuan mereka yaitu menarik para wisatawan internasional. Meskipun Belanda mengambil sikap netral dalam perang tersebut, namun hal itu bukan berarti membuat kegiatan pariwisata di Belanda menjadi tanpa hambatan. Pendudukan Jerman di Belgia dan Prancis, ancaman keberadaan kapal selam Jerman yang membuat *Noordzee* (Laut Utara) menjadi tidak aman merupakan beberapa contoh situasi yang menghambat kegiatan pariwisata di Belanda (Schipper, 2000;47). Pada periode ini upaya Belanda mempromosikan kegiatan pariwisata secara internasional, terutama perjalanan para wisatawan dari Hindia-Belanda mengalami masalah. Hubungan transportasi (lewat laut) yang terputus menjadi salah satu alasan gangguan tersebut. Selain itu, kelangkaan batubara untuk bahan bakar dan bahan pangan menjadi faktor penghambat yang lain.

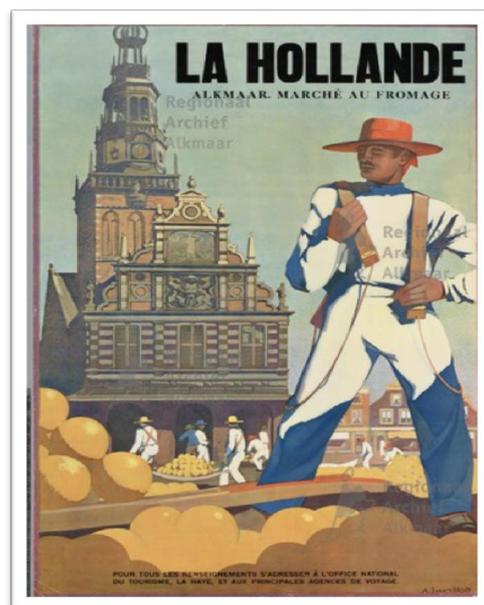
Pada 1922 ANVV membuat brosur (semacam buku panduan) dalam bahasa Inggris yang ditujukan bagi para wisatawan dari negara berbahasa Inggris melalui slogan ‘*Come to Holland*’. Brosur tersebut dilengkapi dengan sampul bergambar menarik yaitu seorang gadis Volendam karya Jan Rinke (1863-1922) dan artikel yang ditulis oleh wartawan Inggris Henry William Massingham (1860-1924). Buku itu juga dihiasi oleh foto-foto indah yang memberikan informasi wilayah-wilayah di Belanda, terutama

<sup>5</sup> Persiapan pembentukan/penggabungan perhimpunan pariwisata ini dimulai pada bulan Agustus 1915. Berdasarkan hasil usulan penggabungan dalam rapat anggota di Arnhem 4 September 1915 dibahas penggabungan antara *Nationale Bond voor Vreemdelingenverkeer* dengan *het Centraal Bureau voor Vreemdelingenverkeer*. Pada 17 November 1915 usulan penggabungan dibahas oleh pengurus *Nationale Bond*, *Centraal Bureau* dan J.G.A.Everwijn dari Kementerian Pertanian, Industri dan Perdagangan dan dibahas tentang pembentukan sebuah perhimpunan hasil penggabungan tersebut. Perhimpunan hasil penggabungan ini disetujui berdasarkan *Koninklijke Besluit* 20 Januari 1916, Jan Schipper, *100 jaar VVV. Van vreemdelingenverkeer tot toerisme*. Leiden: Uitgeverij Toerboek, 2000, hal. 40-41.

jalur kereta api dan kapal. Selain itu, buku tersebut dilengkapi dengan daftar alamat kedutaan dan kantor penerangan. Buku panduan tersebut disebarluaskan di Amerika, Inggris dan negara-negara yang berbahasa Inggris (*Algemeen Handelsblad*, 8/4/1922).

Pada tahun-tahun berikutnya, ANVV kembali menerbitkan brosur promosi dalam bahasa Inggris yang ditujukan untuk promosi pariwisata Belanda. Salah satu brosur tersebut adalah *How to see Holland* yang sebelumnya dicetak sebanyak 180.000 eksemplar, kembali dicetak sebanyak 20.000 eksemplar. Brosur *Come to Holland* terbitan 1922 kembali dicetak sebanyak 40.000 eksemplar. Sampul brosur tersebut merupakan reproduksi dari lukisan Prof. Nicolaas van der Waay. Di samping itu ANVV juga mencetak brosur yang sederhana. Brosur itu memuat informasi mengenai biaya bertamasya di Belanda. Gambar sampul brosur tersebut dirancang oleh Piet van der Hem (1885-1961) yang juga membuat beberapa gambar (*de grondwet*, 6/3/1925). Selain dua brosur *Come to Holland* dan *How to see Holland* ada satu brosur terbitan lain yang berjudul *Holland* dan juga menggunakan bahasa Inggris (*Algemeen Handelsblad*, 22/2/1925).

Selain menerbitkan brosur dalam bahasa Inggris, pada 1930 ANVV juga menerbitkan brosur dalam bahasa Jerman berjudul *Diesen Sommer nach Holland, zu der Noordseädern* (Musim panas ini ke Belanda, ke Laut Utara) dan brosur berbahasa Inggris *Holland, where Seaside means so much more*, serta peta *Noordkust* (Pantai utara). ANVV juga mengeluarkan reklame baru bergambar *kaasboer* (petani keju) dengan latar belakang *stadhuis* (balaikota) Alkmaar bertuliskan 'Kaasmarkt te Alkmaar' (Pasar Keju di Alkmaar) dalam tiga bahasa (Belanda, Inggris, Prancis) dan tiga ukuran (kecil, sedang, besar) berbentuk brosur, poster. Sementara itu untuk menarik para pengunjung asal Flandria yang berbahasa Belanda dalam pameran di Antwerpen dan Luik, ANVV membuat brosur yang ditulis oleh seorang wartawan Belgia dengan judul 'Komt naar Nederland' (Datanglah ke Belanda) (*Algemeen Handelsblad*, 16/5/1930).



Sumber: <https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/beeldbank/>, diakses 8 Maret 2017

Gambar 1. Reklame 'Kaasmarkt te Alkmaar' 1930 dalam bahasa Prancis

Pada 1939 wisatawan Amerika merupakan sasaran pariwisata di Belanda. Promosi dilakukan oleh ANVV bersamaan dengan Pameran Dunia di New York dengan mengirim 'Welkom-pakket' (Paket selamat datang). Paket itu berisi berbagai miniatur bunga tulip, bangunan dengan *gevel*, kincir angin, kapal layar, sepeda dan dihiasi pita berwarna merah, putih, biru. Selain itu terdapat berbagai informasi tentang Belanda dalam paket itu, termasuk brosur *Come to Holland*, foto-foto menarik dengan objek orang-orang berpakaian tradisional, bunga tulip, dan kincir angin (*Utrechts Volksblad*, 4/7/1939).

Terkait Hindia-Belanda, ANVV bekerjasama dengan *Vereeniging Toeristenverkeer* (VTV), perhimpunan pariwisata Hindia-Belanda secara resmi pada bulan Juli 1924. Sebelumnya VTV telah bekerjasama dengan pihak biro perjalanan swasta di Belanda. Pihak VTV meminta ANVV menjadi perwakilan mereka di Belanda dan beberapa wilayah Eropa. ANVV bertugas mempromosikan dan memberikan informasi mengenai pariwisata di Hindia-Belanda, khususnya di Jawa kepada para calon

wisatawan potensial di Belanda dan beberapa wilayah Eropa (*Het Vaderland*, 2/8/1924; *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, 2/8/1924; *Zeventiende Jaarverslag der Vereeniging Toeristenverkeer*, 1924:7).<sup>6</sup>

Pada 1939 ANVV bekerjasama dengan *N.V. Philips Omroep Holland-Indië* menyiarkan seri informasi mengenai kegiatan pariwisata Belanda di Hindia Belanda. Siaran tersebut disiarkan setiap hari Sabtu pukul 14.45 sampai 15.00. Seri pertama diawali dengan informasi umum yang membahas hal-hal menarik di Belanda bagi para *verlofganger* Hindia dan repatrian. Seri berikut mengenai informasi provinsi-provinsi, daerah-daerah, dan perhimpunan-perhimpunan bagi para wisatawan. Terutama keindahan daerah dan kota-kota yang dapat dinikmati para wisatawan (*De Tijd*, 28/7/1939; *De Maasbode*, 28/7/1939).

## PARA VERLOFGANGER DAN WISATAWAN DARI HINDIA KE BELANDA

Selain ANVV ada pula organisasi yang memiliki peranan terkait kegiatan pariwisata di Belanda yaitu *Vereeniging van Indische Verlofgangers*. Perhimpunan ini lah yang membantu para pengunjung dari Hindia untuk berlibur ke Belanda. Berdasarkan inisiatif dari *afdeeling Nederland* (bagian Belanda) dari *Nederlandsch Indisch Onderwijzer Genootschap* (NIOG) –Ikatan Pengajar Hindia-Belanda<sup>7</sup> diputuskan untuk mendirikan *Vereeniging van Indische verlofgangers* yang mandiri pada 30 Desember 1919. Tujuannya adalah untuk membantu para pejabat Hindia yang akan mengambil cuti dari Hindia ke Belanda. Dalam perhimpunan tersebut juga terdapat biro informasi (*Het Vaderland*, 31/12/1919).<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Pada 1930 VTV bekerjasama dengan ANVV dalam *Utrechtse Jaarbeurs* pada 1930 khususnya mengenai materi promosi pariwisata di Hindia-Belanda, lihat ‘Indië te Utrecht’, *De Indische Courant* 12 April 1930.

<sup>7</sup> *Nederlandsch Indisch Onderwijzer Genootschap*- Ikatan pengajar Hindia-Belanda didirikan pada 1894 yang merupakan adik organisasi *Nederlandsch Onderwijzer Genootschap* (NOG) di Belanda, lihat Kees Groeneboer, *Weg tot het westen. Het Nederlands voor Indië 1600-1950*. (Leiden: KITLV, 1993), hal.128.

<sup>8</sup> Susunan pengurus sementara perhimpunan tersebut adalah

Dilihat dari istilah, para pejabat, pegawai Hindia-Belanda) yang menghabiskan cuti (*verlofgangers*)<sup>9</sup> di Belanda berbeda dengan *vreemdelingenverkeer* yang kemudian disebut sebagai turis (wisatawan). Di antara para *verlofgangers* di Belanda, jika dilihat dari kebangsaan, mereka bukanlah orang asing (wisatawan) karena mereka sama-sama orang Belanda. Selain orang Belanda, ada juga orang Indo dan Tionghoa yang tinggal di Hindia-Belanda. Namun, ditinjau dari konteks yang lebih luas (definisi pariwisata dan wisatawan), mereka yang melakukan perjalanan ke luar tempat tinggal dan tempat bekerja dengan tujuan bersenang-senang serta membelanjakan uang yang diperoleh di tempat asal dapat dikategorikan sebagai wisatawan (Boorstin, 1972; MacCannel, 1976; Apostolopoulos, 1996). Hal menarik adalah meskipun mereka orang Belanda dan menjadi warganegara Belanda, tetapi ada di antara mereka yang lahir di Hindia-Belanda dan belum pernah menginjakkan kaki di Belanda. Jika kita mengacu pada definisi pariwisata dan wisatawan tersebut, maka para *verlofganger* dapat dimasukkan dalam kategori turis (wisatawan).

Organisasi *De Vereeniging van Indische Verlofgangers*<sup>10</sup> dibentuk dengan tujuan:

...om de gevolgen der kwestie der z.g. “gestrande” verlofgangers, der oorlogsjaren 1917-1918, in het algemeen te overzien en door aaneensluiting der belangen, een oplossing voor de ontstaane nooden onder verschillende categorieën van verlofgangers te verkrijgen (de Graaf, 2009; 27)

W.M.Haye pensiunan guru, H.J.Coops *inspecteur van den post- en telegraafdienst* (inspektur dinas pos dan telegraf) dan *hoofd van den cursus van Indische postambtenaren te Leiden* (kepala kursus pegawai pos Hindia di Leiden) , S.J. Aay *ambtenaar van Politieke Inlandsche Dienst* (pegawai dinas politik pribumi), J.M.Gazelle, insinyur bagian Waterstaat, D. van Geuns pensiunan guru di Hindia-Belanda.

<sup>9</sup> Gambaran *Indische verlofgangers* pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, lihat Harry A. Poeze, *In het Land van de Overheerser I. Indonesiërs in Nederland 1600-1950* (Leiden: KITLV, 1986); Sebuah iklan yang menawarkan semacam katering ditujukan bagi para *verlofganger* dari Hindia di Den Haag, lihat *Haagsche Courant*, 26 Juli 1893.

<sup>10</sup> Perhimpunan *verlofganger ini* membuka kesempatan bagi para pejabat militer, daerah, dan kotapraja untuk menjadi anggota. lihat ‘Vereeniging Indische Verlofgangers’, *Bataviaasch Nieuwsblad*, 18 November 1922.

(secara umum mengawasi akibat dari mereka yang ‘terdampar’ ketika menghabiskan liburan di Belanda pada tahun-tahun perang 1917-1918 serta menyatukan kepentingan sebagai upaya memperoleh solusi dari permasalahan yang timbul karena perbedaan kategori mereka yang cuti).

Para *verlofganger* dari Hindia-Belanda yang dapat dikategorikan sebagai ‘wisatawan’ tentu memiliki alasan mengapa mereka berlibur ke Belanda.<sup>11</sup> Alasan hubungan emosional dengan Belanda ternyata bukan alasan tunggal. Sebuah surat kabar Den Haag *Het Vaderland* (14/11/1925) menulis mengenai hal tersebut:

*Waarom gaat de Indische werker met verlof? In de eerste plaats om na een zes of meerjarig verblijf in de tropen, in een warm, ongezond klimaat, verstoken van elk Europeesch comfort, in het vaderland nieuwe gezondheid, nieuwe levenskracht en nieuwen levenslust op te doen. (...) Hij moet zich vrij kunnen bewegen, des avonds uit kunnen gaan naar schouwburg of concertzaal, hij moet binnen en buitenlandsche reisjes kunnen maken (...).*<sup>12</sup>

[Mengapa para pegawai Hindia mengambil liburan? Pertama setelah lebih dari enam tahun tinggal di negeri tropis, di cuaca panas dan tidak sehat perlu mendapatkan kenyamanan Eropa di tanah air berupa kesehatan yang baru, memperoleh kehidupan baru dan semangat baru (...). Ia harus dapat bebas bergerak, pada malam hari dapat pergi ke gedung theater, konser, ia harus dapat melakukan perjalanan baik di dalam maupun luar negeri (...)]

<sup>11</sup> Vilan van de Loo menggambarkan *verlofganger* sebagai orang yang berdinasi di *Binnenlandse Bestuur* atau *onderneming* dan setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, pergi berlibur menikmati budaya dan seni di jantung Belanda atau kemudian ke Den Haag, lihat Vilan van de Loo, “Mensen, straten en gebeurtenissen zoals verbeeld in de Haags-Indische letteren rond 1900”, in: Esther Captain e.a., *De Indische Zomer in Den Haag. Het cultureel erfgoed van de Indische hoofdstad*, Leiden, 2005, hal. 139; Suzanne de Graaf membagi para *verlofganger* menjadi para elite Hindia senior, pendatang baru dari Eropa, dan orang Indo-Eropa yang menetap di Hindia (*blijvers*), lihat Suzanne de Graaf, ‘Iets van een vreemde vrucht’, hal. 11.

<sup>12</sup> Selain berlibur, tujuan dari para *verlofganger* ada juga yang mengikuti kursus, pendidikan, dan ujian di universitas atau sekolah tinggi (*studieverlof*), Suzanne de Graaf, ‘Iets van een vreemde vrucht’, hal. 10.



Sumber: <http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/term/Indische%20verlofgangers#818-def>, diunduh 18 Agustus 2016

Gambar 2. *Verlofgangers* dari Hindia-Belanda di Pantai Scheveningen, Den Haag tahun 1929

Kota-kota yang dikunjungi oleh para *verlofganger* dan tempat mereka menetap selama di Belanda adalah Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Haarlem, dan Breda (de Graaf, 2009, 36). Bahkan ada satu kota kecil yang kerap dikunjungi dan menjadi favorit yaitu Gooi di provinsi Gelderland. Daerah Gooi merupakan yang masih dikelilingi oleh hutan dan menjadi daerah yang akan dijadikan *villadorp* (desa villa) dengan gaya Hindia (*Het Vaderland*, 15/10/1928).

Dilihat dari jumlah, jumlah para *verlofganger* dari Hindia-Belanda dapat dikatakan kecil. Di Den Haag yang merupakan kota dengan jumlah *verlofganger* terbanyak pada tahun 1920 hingga 1940 hanya terdapat sekitar 600 sampai 700 orang.<sup>13</sup>

Den Haag menjadi kota yang kerap dikunjungi karena dilihat dari pelayanannya Den Haag cukup memuaskan bagi para *verlofganger*. Di samping itu menurut penduduk menengah di Den Haag adalah penting untuk dapat menarik minat para *verlofganger*. Oleh karena itu *Het Vaderland* (9/2/1924) mengomentari penerbitan *Maandboek voor Den Haag*:

<sup>13</sup> Selama periode itu di Den Haag tinggal 850 sampai 2200 orang dari Hindia, lihat Suzanne de Graaf, ‘Iets van een vreemde vrucht’, hal. 12 mengutip Maarten van Doorn, *Het leven gaat er een lichten gang*, Bijlage hoofdstuk 2, p. 253. Van Doorn menggunakan sumber dari *Bijdragen tot de Statistiek van Nederland. Nieuwe volg-reeks, no. 307: Statistiek van den loop der bevolking in Nederland over 1919. Den Haag, 1921 en volgende jaren*.

*De firma v/h Corsmit, Brossois en Co., de uitgeefster, beoogt met dit handige, goed verzorgde boekje in de eerste plaats reclame voor haar zelf. Maar zij heeft niet tevergeefs gerekend op de medewerking van andere Haagsche firma's, die er evenzeer als zij belang bij hebben om ervoor te zorgen, dat verlofgangers en vreemdelingen naar den Haag kwamen. (...) Het boekje moet helpen het oog te openen voor de aantrekkelijkheden van den Haag – helaas heeft de naam van den Haag in de laatste jaren enigszins geleden – en tevens den strijd aan te binden tegen andere plaatsen in ons land die van gemeentewege trachten nieuwe inwoners en vreemdelingen te trekken. (...) Een voor Hagenaars van alle rangen en standen sympathiek doel dus.*

[Firma v/h Corsmit, Brossois en Co, sebagai penerbit menyambut penerbitan buku panduan praktis yang bagus ini terutama untuk tempat beriklan. Selain itu juga tidak sia-sia mengingat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Den Haag lainnya yang sama-sama memiliki kepentingan supaya para *verlofganger* dan wisatawan datang ke Den Haag. (...) Buku ini harus membantu menjelaskan objek-objek menarik di Den Haag – sayangnya nama Den Haag pada tahun-tahun terakhir kalah bersaing dengan tempat-tempat lain di Belanda yang berupaya menarik perhatian para *verlofganger* dan wisatawan baru. (...). Sebuah tujuan simpatik bagi para semua lapisan masyarakat Den Haag].

Buku pegangan *Maandboek voor Den Haag* ini bermanfaat bagi para *verlofganger* dan juga bagi para pengusaha di Den Haag. Di satu sisi buku tersebut memuat informasi bagi para *verlofganger* mengenai toko atau firma di Den Haag. Pada sisi lain, buku tersebut merupakan wadah untuk beriklan dan berpromosi bagi para pengusaha Den Haag.

Dari berbagai objek pariwisata yang ada di Belanda, pantai Scheveningen di Den Haag merupakan objek yang kerap dikunjungi. Jika para *verlofganger* datang pada musim dingin maka objek-objek yang menjadi pilihan di Den Haag adalah museum-museum, menikmati tonil, konser, operet di Buitenhof, kabaret di Wagenstraat (de Graaf, 2009, 54). Dalam upaya membantu memberikan informasi terbaru kepada para *verlofganger* di Hindia, *Vereeniging van Indische Verlofgangers* menerbitkan majalah

mingguan *De Indische Verlofganger* yang terbit pertama kali pada 1922 (de Graaf, 2009; 6).

Selain majalah, setiap tahun perhimpunan ini menerbitkan buku pegangan *Handboek voor verlofgangers* yang memuat banyak informasi, antara lain informasi alamat penting, pajak, urusan sewa-menyewa, dan perjalanan. Perjalanan ke Belanda bagi orang Belanda yang lama tinggal di Hindia bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu surat kabar *Nieuwe Rotterdamse Courant* (1926) menyatakan bahwa buku panduan itu diharapkan akan membantu para *verlofganger* yang lahir di Hindia dan merasa asing dengan Belanda karena telah lama hidup ‘*in de rimboe*’ (hutan), jauh dari perkembangan kehidupan Barat yang kompleks (*Nieuwe Rotterdamse Courant*, 8/7/1926).



**Sumber:** <http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/foto/handboek-voor-verlofgangers>, diakses pada 18 Agustus 2016.

**Gambar 3.** Sampul buku panduan *Handboek voor Verlofgangers 1939-1940*

Informasi lain dari buku panduan itu berupa informasi sarana transportasi kapal laut, terutama bagi para penumpang kapal yang berangkat dari Timur ke Barat (Belanda) dan sebaliknya. Kapal-kapal yang digunakan adalah *Stoomvaart Maatschappij Nederland*, *Rotterdamse Lloyd* atau *Koninklijke Nederlandsch Stoomboot Maatschappij*. Buku itu juga memberikan informasi persiapan sebelum berangkat, selama dalam perjalanan, dan di negeri Belanda (*De*

*Telegraaf*, 24/7/1938). Bahkan buku panduan tersebut juga memberikan informasi mengenai tempat belanja harian di tempat-tempat yang sudah dikenal:

*Koopt steeds bij goed bekend staande firma's. Wendt U bij voorkeur tot adverteerders in dit Handboekje en het orgaan der Vereeniging "De Indische Verlofganger"* (de Graaf 2009:30; *Handboek voor Verlofgangers van de Vereeniging van Indische Verlofgangers*, 1937-38: 54).

(Berbelanjalah di perusahaan-perusahaan yang sudah dikenal. Lebih baik berbelanja di tempat yang diiklankan dalam buku panduan ini dan *Vereeniging Den Indische Verlofganger*)

Selain itu juga terdapat peringatan yang ditujukan kepada para *verlofganger* atas permintaan Kementerian Urusan Koloni, bagian B kepada perhimpunan untuk: *Koopt geen kleedingstoffen of huishoudgoed aan de deur en leent geen geld op goederen, die U in onderpand door kooplieden achtergelaten worden* (*Handboek voor Verlofgangers*, 1937-38; 68) (Jangan membeli pakaian atau perabotan rumah tangga dari penjual yang menawarkan dari rumah ke rumah dan jangan meminjam uang untuk membeli barang-barang yang dijamin oleh pedagang).

Dalam hal ini organisasi *Vereeniging van Indische Verlofgangers* beserta publikasi yang diterbitkannya (majalah dan buku panduan) menjadi bagian dalam mempromosikan kegiatan pariwisata bagi warga Hindia-Belanda. Oleh karena masyarakat di Hindia-Belanda menggunakan bahasa Belanda, maka materi yang digunakan menggunakan bahasa Belanda.

Selain para *verlofganger*, para pejabat tinggi bumiputra Hindia (seperti bupati) turut diundang untuk mengunjungi di Belanda. Pada 1927 pemerintah Belanda menganggap penting jika pejabat tinggi Hindia (bumiputra) mengenal negeri Belanda dengan mengunjungi Belanda. Mereka memasukkan kegiatan tersebut dalam anggaran belanja negara yang memungkinkan dua pejabat dari Hindia (satu dari Jawa dan luar Jawa) tinggal di Belanda selama enam sampai

delapan bulan.<sup>14</sup> Salah satu istri pejabat dari Hindia yaitu R. Ajoe Abdoerachman menulis buku mengenai pengalamannya ke Eropa pada 1928 *Lalampahan ka Eropa* (1930). Salah satu negara yang dikunjungi adalah Belanda. Di sana ia mengunjungi Den Haag, Rotterdam, Arnheim, Amsterdam, Leiden, Zeeland (Abdoerachman, 1930; 33-86).

Pada saat Perang Dunia II pada 1940-1945 berkecamuk di Eropa kegiatan organisasi *Vereeniging van Indische Verlofgangers* terhenti. Di samping itu, situasi Perang Dunia II berdampak pada kegiatan pariwisata di Belanda, khususnya bagi para *verlofganger* dari Hindia. Pariwisata di Belanda pada masa pendudukan Jerman lebih menitikberatkan kegiatan pariwisata di dalam negeri dibandingkan luar negeri. Berbagai kegiatan seperti *rijwieltoerisme* (wisata sepeda), *ruitertoerisme* (wisata berkuda), *wandeltoerisme* (wisata berjalan kaki), *kampeertoerisme* (wisata berkemah), serta *watertoerisme* (wisata air) dilakukan pada masa itu (*De Kampioen* Juni 1940, 177).

## KUNJUNGAN PARA 'WISATAWAN' INDONESIA KE BELANDA

Pascaperang Dunia II, pada tahun 1950 sebuah rombongan yang terdiri dari 42 orang melakukan perjalanan ziarah ke Roma dan Lourdes dengan menggunakan kapal laut. Rombongan peziarah tersebut berasal dari Pontianak, Manado, Surabaya, Makassar, Surabaya, Semarang, Malang, Bandung, dan Jakarta. Sebanyak 70% dari rombongan merupakan orang Indonesia dan sisanya orang Belanda. Selain berkunjung ke Roma dan Lourdes, mereka berkunjung ke Paris dan negeri Belanda. Perjalanan dari Napoli ke Belanda diatur oleh biro perjalanan Nitour. Rombongan itu kembali ke Indonesia dari pelabuhan Rotterdam (*Java Bode*, 6/3/1950). Pada periode ini masih ada *verlofganger* yang pergi ke Belanda. Pertengahan tahun 1950-an selain para *verlofganger* datang juga para repatrian yang

<sup>14</sup> Pejabat yang berangkat pada 1927 adalah Bupati Bandung Wiranatakoesoema yang juga anggota *Volksraad*, pada 1929 Mohammad Achmad, Bupati Kuningan. Acara pengenalan diisi dengan ekskursi ke berbagai tempat dan diakhiri audiensi dengan ratu. Para pejabat itu dapat membawa istri dan anak-anak, lihat Harry A. Poeze, *In het Land van de Overheersers I*, hal. 229.

terpaksa ‘pulang’ ke Belanda karena kebijakan politik.<sup>15</sup> Pada 1954 *Centraal Bureau van de Statistiek* (CBS) mengumumkan ada 16.576 repatriation di samping 5.603 *verlofganger* dari Indonesia (Vos, 2007; 108).

Sementara itu untuk para ‘wisatawan’ Indonesia pada periode 1950-an dilihat dari jumlah dapat dikatakan masih sedikit. Bepergian ke luar negeri bagi masyarakat Indonesia pada umumnya masih merupakan kesempatan langka. Hanya kalangan tertentu yang memiliki kesempatan tersebut, misalnya bekerja (di kapal laut), tugas belajar, mengunjungi keluarga, dan alasan berobat.

Biaya transportasi yang relatif mahal juga menjadi faktor penyebab. Pada 1957 tarif tiket pesawat KLM dari Jakarta menuju Amsterdam, untuk tiket kelas 1 sekali jalan sebesar 2.980 gulden dan 5.363 gulden pergi-pulang. Untuk tiket kelas wisatawan sebesar 2.182 gulden untuk sekali jalan dan 3.927 gulden pergi-pulang (*Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode*, 29/6/ 1957).

Promosi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda pada periode 1950-an juga menitikberatkan pada negara-negara tetangga (Belgia, Prancis, Jerman), Inggris dan terutama Amerika. Salah satu upaya promosi tersebut merupakan kerjasama antara KLM, *de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs* (Bursa tahunan Kerajaan Belanda) dan *Economische Voorlichtingsdienst* (Dinas penerangan ekonomi) dengan mendirikan kantor penerangan untuk orang asing di Amsterdam bernama ‘*Holland Hostess*’ (*De Telegraaf*, 9/2/ 1954).

Situasi pada 1960-an serupa dengan periode 1950-an. Kunjungan ‘wisatawan’ dari Indonesia pada periode 1960-an hampir mirip

dengan kunjungan para pejabat pada akhir tahun 1920-an. Mereka yang datang adalah sekelompok elite tertentu. Pada 1964 sekelompok wisatawan dari Indonesia yang terdiri dari 39 orang tiba di Schiphol. Rombongan tersebut dipimpin oleh R. Suhirman, Manajer Nitour di Jakarta. Kelompok wisatawan ini merupakan rombongan yang pertama sejak ketegangan hubungan Indonesia-Belanda pada akhir tahun 1950-an. R. Suhirman terakhir berlibur ke Belanda pada 1959. Tujuan rombongan wisatawan ke Belanda tersebut adalah untuk mempererat kembali hubungan dengan para kenalan Belanda dari masa lalu. Kebanyakan dari mereka pernah ke Belanda dan ingin melihat kondisi terbaru Belanda. Mereka mengunjungi Rotterdam dan *Deltawerken* (Proyek Delta). Anggota rombongan tersebut terutama terdiri dari para pengusaha kaya. Kunjungan ke Belanda merupakan bagian dari rangkaian kunjungan ke *World Fair* di New York. Rombongan wisatawan kedua menyusul dua minggu kemudian (*De Telegraaf*, 3/9/1964).

Peristiwa 1965 memberikan pengaruh terhadap situasi di Indonesia. Demikian pula dengan kegiatan pariwisata internasional. Ratusan tokoh komunis dan para pejabat yang berorientasi komunis mengungsi ke Eropa Barat. Sekitar 50 hingga 60 orang masuk ke Belanda dengan menggunakan visa ‘wisatawan’ yang berlaku selama tiga bulan. Kebanyakan dari mereka ‘bersembunyi’ mendapatkan tempat *pension* (wisma) di Den Haag. Akhir Februari 1966 izin tinggal (visa) mereka habis dan menurut pemerintah Belanda izin tinggal dapat diperpanjang jika diperlukan. Satu-satunya syarat yang diajukan pemerintah Belanda kepada wisatawan Indonesia adalah memiliki cukup uang selama tinggal di Belanda dan untuk kembali ke Indonesia (*De Telegraaf*, 2/2/1966).

Sementara itu menteri urusan ekonomi Belanda dan ANVV pada 6 Desember 1968 membentuk *het Nationaal Bureau voor Toerisme* (NBT)- biro nasional pariwisata dengan ketua J.N.Strijker yang merupakan direktur VVV Amsterdam. Biro ini mengambil-alih tugas ANVV untuk mempromosikan pariwisata Belanda. Namun ANVV masih tetap ada dan berfungsi sebagai federasi dari organisasi-

<sup>15</sup> Gelombang pertama para repatriation datang setelah pendudukan Jepang pada 1945. Lalu gelombang kedua pada 1950-an yang terdiri dari generasi pertama keluarga Belanda dan selanjutnya orang Indo-Belanda yang belum pernah menginjakkan kaki di Belanda, lihat Ulbe Bosma (ed.), *Post-Colonial Imigrants and Identity Formations in the Netherlands* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hal. 9; Roel Jennisen, ‘*Een algemeen beeld van internationale migratie in Nederland*’, dalam Ministerie van Justitie, *Migratie naar en vanuit Nederland, Een eerste proeve van de Migratiekaart* (Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum-Maastricht University, 2009), hal.8.

organisasi VVV di daerah (*De Tijd*, 9/12/1968; *Het Vrije Volk*, 20/12/1968).

Pada tahun 1970-an tidak semua orang Indonesia dapat berlibur ke luar negeri dan menjadi wisatawan. Seperti periode-periode sebelumnya hanya kalangan tertentu yang memiliki kesempatan tersebut. Kalangan tertentu tersebut adalah masyarakat bumiputra kelas atas dan Tionghoa tertentu yang secara rutin berlibur ke luar negeri.<sup>16</sup> Salah seorang tokoh Indonesia yang bepergian ke luar negeri adalah Sultan Hamengkubuwono IX, Wakil Presiden Republik Indonesia ketika itu. Beliau singgah di Amsterdam selama sehari setelah mengunjungi Boston pada bulan Juli 1974. Oleh sebuah surat kabar terbitan Belanda *De Telegraaf*, Sultan disebut *onopvallende toerist in Amsterdam* (wisatawan yang tidak menyolok di Amsterdam). Menurut Sultan, kunjungannya ke Amsterdam untuk bertemu dengan kawan lamanya (*De Telegraaf*, 23/7/1974).

Situasi pariwisata di Belanda pada 1970-an, terutama pariwisata internasional tidak menggembirakan. Bahkan pada 1977 Belanda mengalami penurunan jumlah wisatawan asing yang datang ke Belanda (*Nederlands dagblad*, 9/1/1979). Situasi ini tidak lepas dari krisis minyak dunia pada 1973 dengan dinaikannya harga minyak oleh OPEC disusul dengan krisis minyak pada 1979 di Amerika akibat jatuhnya produksi minyak bumi. Namun, dalam hal ini pemerintah Belanda dikritik karena dianggap kurang memerhatikan sektor pariwisata. Oleh karena itu NBT berinisiatif membentuk kelompok kerja yang bertugas membahas persoalan ini. Hasil laporan kelompok kerja tersebut adalah terkait promosi pariwisata Belanda ke luar negeri yaitu NBT harus lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak lain, seperti KLM, *het Nederlands Zuivelbureau*, *het Centraal Bureau voor Tuinbouwelingen*, *het Centraal Bloembollencomite* dan *het Nederlands Centrum*

<sup>16</sup> Sebuah artikel di surat kabar Belanda membahas tentang rencana seorang pengusaha China Wong Cheung Sing yang telah tinggal di Belanda selama 20 tahun membangun restoran terapung di Amsterdam. Ia memperkirakan potensi ribuan wisatawan dari Hongkong, Singapura, Taiwan, dan Indonesia yang akan mengunjungi restorannya, 'Drijven Chinees eethuis: plaats voor 900 mensen', *Het Vrije Volk*, 11 Agustus 1984.

*voor Handelsbevoordering (Limburgsh Dagblad*, 14/12/1978).

Memasuki periode tahun 1980-1990-an promosi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Belanda seperti periode sebelumnya lebih banyak ditujukan pada wisatawan Amerika. Pada 1984 NBT dan KLM berharap lebih banyak wisatawan Amerika datang ke Belanda dengan alasan perbedaan kurs mata uang dolar yang lebih tinggi. Oleh karena itu Belanda menyiapkan promosi pariwisata untuk menarik wisatawan Amerika dan memanfaatkan perbedaan kurs tersebut (*Nieuwsblad van het Noorden*, 12/4/1984). Situasi pariwisata di Belanda pada periode ini dapat dikatakan memprihatinkan karena pada 1986 kegiatan pariwisata, terutama kunjungan wisatawan internasional mengalami penurunan. Pemerintah Belanda pun ketika itu sedang melakukan penghematan besar-besaran. Sehingga perlu dipikirkan cara untuk mengatasi persoalan tersebut (*NRC Handelsblad*, 27/7/1989).

Kementerian luar negeri Belanda pada 1988 bekerja sama dengan NBT, Dinas penerangan luar negeri, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan menerbitkan majalah *Holland Horizon*. Majalah ini terbit setiap tiga bulan dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Rusia, dan Indonesia. Majalah bertiras 65.000-70.000 ini dikirimkan secara gratis kepada masyarakat dan organisasi yang menjalin hubungan bisnis dan persahabatan dengan Belanda. *Holland Horizon* mengulas perkembangan ekonomi, budaya, sejarah, sosial, dan politik di Belanda. Majalah ini juga berfungsi sebagai *visitekaartje* (kartu bisnis) bagi Belanda (Wilkie, 2006; 242).

Edisi bahasa Indonesia majalah *Holland Horizon* secara tidak langsung mempromosikan pariwisata di Belanda kepada masyarakat Indonesia. Edisi bahasa Indonesia majalah ini tidak lagi terbit pada pertengahan tahun 2000-an. Pihak pemerintah Belanda tampaknya mengurangi informasi dalam bentuk cetakan. Selain alasan penghematan, alasan lain adalah upaya ramah lingkungan.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Wawancara pribadi dengan Ibu Rina Slamet, Asisten Pers dan Kebudayaan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, 14 Maret 2017.

Pada pertengahan tahun 1990 Menteri Sekretaris Negara Urusan Ekonomi Belanda, Piet Bukman berharap untuk tahun-tahun mendatang Belanda menyediakan 75 juta gulden untuk promosi pariwisata. Jumlah ini meningkat 25 persen dari lima tahun sebelumnya. Oleh karena itu NBT mendapatkan tambahan dana untuk promosi baik di dalam maupun luar negeri (*Nederlands dagblad*, 2/6/1990). Sebelumnya Bukman menekankan bahwa Belanda sebaiknya mempromosikan sisi terkuat pariwisata mereka sehingga tidak semua hal dipromosikan. Hal tersebut terkait kunjungan Menteri Pariwisata Prancis, Olivier Stiern ke Belanda yang mengusulkan kerjasama di antara negara-negara Eropa terkait promosi pariwisata ke Amerika, Australia, dan Jepang. Stiern beralasan para wisatawan dari negara-negara tersebut biasanya mengunjungi lebih dari satu negara di Eropa (*Het Vrije Volk*, 22/11/1990).

Pariwisata dalam negeri merupakan salah satu fokus pemerintah Belanda pada 1992. Hal itu disebabkan persaingan dalam pariwisata internasional yang semakin ketat. Terutama di antara negara-negara Eropa yang memiliki objek-objek pariwisata menarik. ANWB, NBT, dan ANVV bersinergi dan bekerjasama dalam mempromosikan pariwisata yang ditujukan kepada warga mereka. Sementara itu para wisatawan internasional di luar dari sasaran mereka (*Nederlands dagblad*, 3/11/1992). Pada tahun 1992 ini pula hubungan antara Indonesia dan Belanda sedikit menegang. Pemerintah Indonesia meminta penghentian semua bantuan IGGI untuk Indonesia dan meminta Belanda tidak lagi menjadi pemimpin IGGI. Alasannya adalah Belanda telah menggunakan bantuan tersebut sebagai alat intimidasi politik, terutama mengkaitkannya dengan insiden Santa Cruz di Timor-Timur. Hal itu dianggap mencampuri urusan dalam negeri Indonesia (*Kompas*, 26/3/1992; *NRC Handelsblad*, 31/3/1992).<sup>18</sup>

Pada periode 1990-an wisatawan Indonesia yang ke Belanda kebanyakan mengikuti paket-

<sup>18</sup> Terkait dengan kunjungan orang Indonesia ke Belanda, Menlu RI Ali Alatas dalam suatu kesempatan di Jenewa pada 1995 menyatakan bahwa orang Indonesia bermimpi dapat pergi ke Belanda sebagai wisatawan, bukan untuk tinggal selamanya, lihat 'Indonesië snapt beroering niet', *Leeuwarder Courant*, 10 Januari 1995.

paket perjalanan wisata ke Eropa yang ditawarkan oleh biro perjalanan dan Belanda menjadi salah satu tujuannya. Durasi perjalanan yang biasanya pada saat musim panas (Juni-Juli) dan musim dingin (Desember) tersebut lebih singkat, mulai 9 hingga 22 hari.<sup>19</sup> Jenis wisatawan Indonesia lain adalah mereka yang memiliki keluarga di Belanda. Mereka dapat tinggal lebih lama dengan cara mendapatkan undangan dari keluarga di Belanda. Biasanya mereka memaksimalkan izin masa tinggal di Belanda selama tiga bulan.<sup>20</sup>

Memasuki abad milineum (abad ke-21), dunia pariwisata internasional digoncangkan dengan beberapa peristiwa. Peristiwa penyerangan gedung WTC di New York pada 11 September 2001 dan ancaman virus SARS dari Asia (Jepang, Taiwan, Hongkong) pada 2003 memberikan pengaruh terhadap perkembangan pariwisata di Eropa. Belanda pun terkena imbasnya.<sup>21</sup> Juru bicara *Toerisme en Recreatie Nederland* (TRN) mengatakan promosi pariwisata internasional Belanda diprioritaskan pada negara-negara di sekitar Belanda ([www.nrc.nl](http://www.nrc.nl). 2003).

Perkembangan teknologi internet pada pertengahan tahun 2000-an memberikan perubahan dalam hal penyampaian informasi dengan lebih cepat. Terkait dengan promosi pariwisata, Belanda juga memanfaatkan media digital (internet). Hal itu tentu mendukung promosi pariwisata Belanda. Beberapa situs resmi memuat informasi pariwisata di Belanda, salah satu di antaranya adalah [www.holland.com](http://www.holland.com). Situs ini juga menggunakan bahasa Indonesia (<http://www.holland.com/id/pariwisata.htm>).<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Sebagai ilustrasi lihat iklan-iklan biro perjalanan di majalah dan surat kabar Indonesia, seperti iklan Vayatour dalam Majalah *Tempo* No 14, 8 Juni 1992 yang menawarkan perjalanan paket wisata ke Eropa.

<sup>20</sup> Seperti pengalaman Max Sapulete dari Pulau Saparua, Maluku yang berlibur ke Belanda ke rumah kakaknya di Oosterwolde dan Hoogkerk, provinsi Groningen dan Drenthe, 'Ze hebben hier vreselijk veel koeien, hè?', *Nieuwsblad van Friesland*, 20 Agustus 1994.

<sup>21</sup> Penulis yang pernah tinggal di Belanda pada 2000-2001 melihat ada perubahan dengan situasi pada 1996. Pada 2001 di bandara, pusat-pusat perbelanjaan dan pusat keramaian terlihat tentara berjaga-jaga bersenjata lengkap.

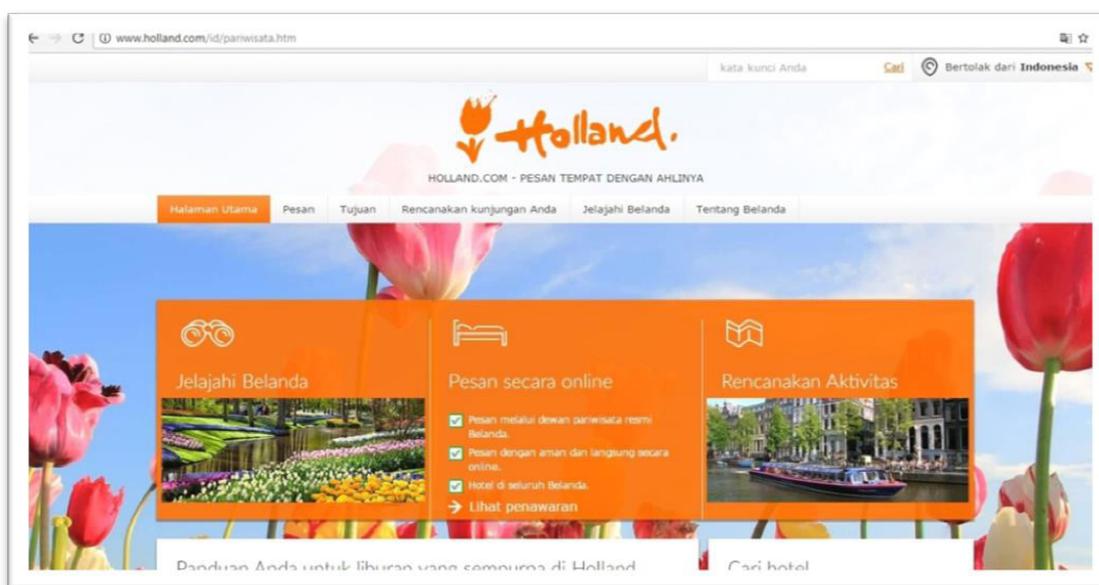
<sup>22</sup> Bahasa-bahasa yang digunakan adalah Inggris, Prancis, Italia, Jerman, Rusia, Spanyol, Denmark, Jepang, dan China.

Hingga bulan April 2010 pemasukan Belanda dari sektor pariwisata meningkat 12 persen daripada tahun sebelumnya. Meskipun pada bulan ini Gunung Eyjafjallajökull di Islandia meletus dan menyebabkan gangguan perjalanan udara di Eropa. Hal menarik adalah jumlah wisatawan dari Asia, seperti Jepang dan India justru meningkat masing-masing 23 persen dan 22 persen.<sup>23</sup>

Namun, pada 2011 pemerintah Belanda mengurangi anggaran promosi pariwisata hingga 65 persen. Setiap tahun Belanda mengeluarkan 16,6 juta Euro untuk mempromosikan Belanda di luar negeri. Pengurangan tersebut berhubungan dengan upaya penghematan pemerintah Belanda di hampir semua sektor. Dengan demikian sektor pariwisata Belanda harus menanggung sendiri 44% dari keseluruhan biaya promosi Belanda di luar negeri. Sebagai prioritas, promosi tetap dilakukan di negara-negara seperti Jerman, Inggris, Amerika, Brazil, Jepang, dan China yang telah dilakukan sejak 2010 (<http://archieff.wereldomroep.nl>, 2011).

Pada 2011 Belanda menawarkan desain, mode, dan arsitektur sebagai atraksi alternatif pariwisata baru selain ikon klasik seperti klompen dan bunga tulip, kincir angin dan kanal, Rembrandt dan Anne Frank. Promosi 'Dutch DNA' ditujukan untuk warga Belanda dan wisatawan internasional (<http://archieff.wereldomroep.nl>, 2011). Tawaran ini memberikan kesempatan kepada para wisatawan untuk menikmati objek lain yang berbeda dengan objek yang biasa ditawarkan. Selain itu, tawaran atraksi baru ini ditujukan kepada mereka yang pernah berkunjung ke Belanda untuk memperoleh pengalaman baru.

Kebijakan pariwisata Belanda berfokus pada tiga hal yaitu meningkatkan jumlah wisatawan internasional, kewirausahaan, dan keberlanjutan. Upaya meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Belanda secara tidak langsung memperkuat *brand image* Belanda di mata dunia sehingga semakin dikenal di dunia (Edijono 2015:57-58). Upaya meningkatkan jumlah wisatawan untuk datang ke Belanda



Sumber: <http://www.holland.com/id/pariwisata.htm>, diakses pada 20 Agustus 2016.

Gambar 4. Tampilan situs [holland.com](http://www.holland.com) dalam bahasa Indonesia.

<sup>23</sup> Data diperoleh dari laporan NBTC pada 2010.

berkaitan dengan upaya promosi yang dilakukan oleh NBTC. Pada 2012 dari sekitar 97.000 wisatawan Indonesia yang mengunjungi Eropa, 33.000 di antaranya memasukkan Belanda sebagai salah satu negeri yang mereka kunjungi. Potensi tersebut tentu menarik perhatian Belanda meski dilihat dari jumlah berada di bawah wisatawan dari Jepang dan China (<http://swa.co.id>, 2014).

Promosi pariwisata Belanda ke Indonesia baru kembali dilakukan pada 2014. Terakhir mereka melakukan promosi ke Indonesia pada 2003. NBTC dengan menggunakan merek 'Holland' melakukan rangkaian kegiatan promosi *South East Asia Sales Mission* dalam bentuk seminar pada bulan Oktober 2014. Mereka menargetkan sepanjang tahun 2014 sekitar 41.000 wisatawan dari Indonesia akan berkunjung ke Belanda. Kegiatan promosi ini didukung dengan penerbangan langsung Jakarta-Amsterdam (Belanda) Garuda pada bulan Mei 2014. Penerbangan langsung tersebut menempuh perjalanan selama 14 jam tanpa henti (<http://bisniswisata.co.id>, 2014).<sup>24</sup>

Pada 2015 NBTC mengkampanyekan promosi pariwisata ke Belanda dengan slogan "Ayo ke Holland" (*Come to Holland*). Mereka menargetkan 44.000 wisatawan Indonesia yang akan berkunjung ke Belanda. Wisatawan yang menjadi sasaran tidak lagi mereka yang mengikuti jasa tur (dalam kelompok), melainkan para wisatawan muda profesional dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Perubahan sasaran ini berdasarkan survey yang dilakukan oleh *NBTC Holland Marketing*. Hasil survey menyatakan terdapat penurunan jumlah wisatawan dalam bentuk rombongan atau grup. Namun, sebaliknya jumlah wisatawan individu atau perorangan meningkat (<http://nationalgeographic.co.id>, 2015).

NBTC juga menyadari bahwa Belanda sebenarnya merupakan titik masuk dari para wisatawan Indonesia sebelum menjelajah Eropa. Oleh karena itu mereka berupaya masa tinggal

para wisatawan Indonesia di Belanda yang paling lama dua hari dapat ditambah lebih lama.<sup>25</sup>

## PENUTUP

Berbeda dengan penelusuran terhadap wisatawan Belanda yang berkunjung ke Indonesia, penelusuran terhadap wisatawan Indonesia yang mengunjungi Belanda jauh lebih sulit. Selain minimnya data, jumlah 'wisatawan' Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan wisatawan Belanda yang mengunjungi Indonesia. Dalam kurun waktu hampir seratus tahun terlihat bagaimana upaya Belanda mempromosikan negerinya terkait kegiatan pariwisata bagi para wisatawan Hindia-Belanda dan Indonesia dengan cara yang hampir serupa. Perbedaan dari media yang digunakan. Dari menggunakan media cetak seperti buku, poster, majalah, media elektronik (radio) kemudian menggunakan media digital (internet). Sasaran promosi pariwisata tidak secara langsung ditujukan kepada masyarakat Hindia-Belanda dan kemudian Indonesia.

Pada periode kolonial (1916-1930-an) ketika Belanda masih memiliki koloni di Hindia, promosi yang mereka lakukan di Hindia-Belanda bukanlah promosi utama. Mereka lebih menitikberatkan promosi ke negara-negara berbahasa Inggris, seperti Inggris Raya, Amerika Utara. Hal ini dipengaruhi oleh situasi pada masa itu bahwa wisatawan yang datang dari Hindia-Belanda kebanyakan memiliki hubungan dengan Belanda karena merupakan para *verlofganger* (orang yang cuti) sehingga promosi yang dilakukan lebih bersifat informatif dengan cara menerbitkan majalah dan buku panduan dalam bahasa Belanda. Selain *verlofganger*, yang menjadi wisatawan di Belanda adalah masyarakat *elite* bumiputra.

<sup>24</sup> Para peserta promosi terdiri dari Schiphol, KLM, Garuda Indonesia, Henri Willig, Mc Arthur Glenn, Keukenhof, Amsterdam City of Diamonds; 'Belanda Targetkan 41.000 Wisatawan Indonesia', <http://travel.kompas.com> diakses 17 Agustus 2016.

<sup>25</sup> Pada 23 November 2016 *De Holland Aliantie (Holland Alliance)* menandatangani *Letter of Intent* dengan sejumlah operator tur Indonesia (*Association of Indonesian Tours and Travel Agencies-ASITA* dan Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia-ASTINDO) di hadapan Menteri Ploumen (Menteri Perdagangan dan Kerjasama luar negeri). Penandatanganan *LOI* ini merupakan bagian dari kunjungan misi perekonomian Perdana Menteri Mark Rutte ke Indonesia 21-24 November 2016. Penandatanganan ini merupakan upaya promosi pariwisata Belanda untuk menarik jumlah wisatawan Indonesia ke Belanda, <http://www.nbtc.nl/nl/homepage/artikel/hollandpromotie-indonesie.htm> diakses 15 Maret 2017.

Hal seperti itu terus berlangsung sampai setelah periode kolonial (1945-1990-an). Para wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Belanda merupakan masyarakat tertentu yang datang dalam kelompok wisata. Mereka mengikuti rangkaian perjalanan wisata ke Eropa dengan Belanda sebagai salah satu tujuannya. Promosi pariwisata yang dilakukan Belanda pada periode ini lebih ditujukan kepada wisatawan internasional, tidak khusus untuk wisatawan Indonesia.

Situasi serupa, baik promosi maupun wisatawan sasaran dari Indonesia juga ditemui pada periode (1990-an – 2000-an). Pada periode ini tidak ditemukan adanya promosi khusus bagi wisatawan Indonesia. Baru pada 2014 Belanda kembali berpromosi di Indonesia. Mereka menasar kalangan profesional muda yang melakukan perjalanan secara perorangan atau individu ke Belanda.

Alasan Belanda dalam mempromosikan negerinya bagi warga Hindia dan Indonesia mengalami perubahan. Pada masa kolonial, mereka berharap para warga Hindia-Belanda yang merupakan bangsa Belanda dan bumiputra dapat memiliki kesan yang baik tentang Belanda. Para *verlofganger* diharapkan memiliki kesan baik tentang Belanda sebagai negeri beradab, tempat mereka berlibur dan menambah wawasan ‘budaya’, melepaskan diri dari beban tugas di koloni. Sementara itu bagi para pejabat bumiputra diharapkan mereka dapat memiliki kesan baik tentang Belanda sebagai negeri yang maju. Pada masa sesudahnya, Belanda berharap para wisatawan Indonesia dapat singgah dan tinggal lebih lama di Belanda mengingat Belanda merupakan salah satu negeri dari negeri-negeri Eropa yang dikunjungi.

Wilayah dan objek yang dipromosikan dan kemudian dikunjungi oleh para ‘wisatawan’ dari Hindia dan Indonesia hampir tidak mengalami perubahan. Amsterdam, Den Haag, serta Volendam merupakan kota yang kerap dikunjungi dan masuk dalam daftar kota di Belanda dari rangkaian tur perjalanan di Eropa. Demikian pula dengan objek yang dilihat, seperti kanal, kebun bunga tulip, kincir angin. Meskipun pada 2011, Belanda menawarkan alternatif lain yaitu desain,

mode, dan arsitektur, ternyata ikon-ikon klasik masih tetap bertahan dan ditawarkan.

## PUSTAKA ACUAN

- Anonim. (1924, 2 Agustus). A.N.V.V, *Het Vaderland, Nieuwe Rotterdamsche Courant*.
- Anonim. (1950, 6 Maret). Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar, *Java Bode*.
- Anonim. (2015). Belanda Targetkan 41.000 Wisatawan Indonesia, *Kompas*. <http://travel.kompas.com>, diunduh 17 Agustus 2016.
- Anonim. (1992, 3 November). Bundeling van krachten in toeristische sector, *Nederlands dagblad*.
- Anonim. (1922, 8 April). Come to Holland, *Algemeen Handelsblad*.
- Anonim. (1940, 8 Juni). De A.N.W.B.werkt door, *De Kampioen*, No. 12.
- Anonim. (1939, 28 Juli). De ANVV maakt propaganda in Indië, *De Maasbode*.
- Anonim. (1984, 11 Agustus). Drijven Chinees eethuis: plaats voor 900 mensen, *Het Vrije Volk*.
- Anonim. (1928, 15 Oktober). Een Indisch dorp in Nederland, *Het Vaderland*.
- Anonim. (1990, 22 Mei). Gezamenlijk Europa verkopen aan toerist, *Het Vrije Volk*.
- Anonim. (1953, 9 Februari). Grootscheepse propagandaactie van K.L.M., *De Telegraaf*.
- Anonim. (1893, 26 Juli). *Haagsche Courant*.
- Anonim. (1926, 8 Juli). Handboek voor verlofgangers, *Nieuwe Rotterdamsche Courant*.
- Anonim. (1938, 24 Juli). Handboek voor verlofgangers, *De Telegraaf*.
- Anonim. (1978, 14 Desember). Holland-promotie moet bedrijfsleven en toerisme bevorderen, *Limburgsh Dagblad*.
- Anonim. (1930, 12 April). Indië te Utrecht, *De Indische Courant*.
- Anonim. (1919, 31 Desember). Indische Verlofgangers, *Het Vaderland*.
- Anonim. (1992, 26 Maret). Indonesia Meminta Belanda Hentikan Pencairan Bantuannya, *Kompas*.
- Anonim. (1995, 10 Januari). Indonesië snapt beroering niet, *Leeuwarder Courant*.
- Anonim. (1966, 2 Februari). Indonesische communisten naar ons land gevluht, *De Telegraaf*.
- Anonim. (1964, 3 September). Indonesische Toeristen in Ons Land, *De Telegraaf*.
- Anonim. (1968, 20 Desember). J.N.Strijkers weg uit Amsterdam, *Het Vrije Volk*.

- Anonim. (1957, 29 Juni). KLM en Garuda tarieven omhoog, *Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode*.
- Anonim. (1924, 9 Februari). Maandboek voor Den Haag, *Het Vaderland*.
- Anonim. (1968, 9 Desember). Nationaal bureau voor toerisme, *De Tijd*.
- Anonim. (1984, 12 April). Nederland wil meer Amerikaanse toeristen, *Nieuwsblad van het Noorden*.
- Anonim. (2015). "Netherlands targets 44.000 Indonesian tourists" <http://en.tempoco.com/read/news/2015/11/10/056717602,uk.html/Netherlands-Targets-44000-Indonesian-Tourists> diunduh 7 Juli 2016.
- Anonim. (1925, 6 Maret). Propaganda voor Holland in den vreemde, *De grondwet*.
- Anonim. (1930, 16 Mei). Propaganda voor Nederland, *Algemeen Handelsblad*.
- Anonim. (1939, 28 Juli). Propaganda voor ons land in Indië, *De Tijd*.
- Anonim. (1939, 4 Juli). Reclame voor Nederland', *Utrechts Volksblad*.
- Anonim. (1992, 31 Maret). Soeharto's genadeloze gebaar, *NRC Handelsblad*.
- Anonim. (1989, 27 Juli). Sterrenaanslag in Amsterdam, *NRC Handelsblad*.
- Anonim. (1974, 23 Juli). Sultan in Amsterdam, *De Telegraaf*.
- Anonim. (1990, 2 Juni). Toerisme is geen hobby meer, *Nederlands dagblad*.
- Anonim. (1979, 9 Januari). Toerisme mede oorzaak tekort betalingsbalans, *Nederlands dagblad*.
- Anonim. (1925, 22 Februari). Toerisme. Nieuwe Uitgaven, *Algemeen Handelsblad*.
- Anonim. (1922, 18 November). Vereeniging Indische Verlofgangers, *Bataviaasch Nieuwsblad*.
- Anonim. (1916, 9 Juni). Vreemdelingenverkeer, *Leeuwarder Courant*.
- Anonim. (1994, 20 Agustus). Ze hebben hier vreselijk veel koeien, hè?, *Nieuwsblad van Friesland*.
- Apostolopoulos, Yorghos, Leivadi.S. & Yiannakis, A. (Eds) (1996). *The Sociology of Tourism: Theoretical and Empirical Investigation*. London: Routledge.
- Bommel, Myrtille van. Pariwisata Belanda Potong Anggaran (2011), *Wereldomroep*. <http://archieff.wereldomroep.nl/bahasa-indonesia/article/pariwisata-potong-anggaran> diunduh 17 Agustus 2016.
- Boorstin, Daniel. (1972). *The Image. A Guide to Pseudoevents in America*. New York: Atheneum.
- Bosma, Ulbe (Ed.). (2012). *Post-Colonial Imigrants and Identity Formations in the Netherlands*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Bruijn, Kim de, et.al. (2015). *Trendrapport toerisme, recreatie, en vrije tijd 2015*. Nieuwegein: NRIT Media.
- Captain, Esthers., et.al (2005). *De Indische Zomer in Den Haag. Het cultureel erfgoed van de Indische hoofdstad*. Leiden: KITLV.
- Dahles, Heidi. (1998). Redefining Amsterdam as a tourist destination. *Annals of Tourism Research*, 25, 55-69.
- Edijono, Regina V. (2015). *Pelaksanaan dan Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Uni Eropa Tahun 2006-2015: Studi Kasus Benelux* (Tesis). Jakarta: Kajian Wilayah Eropa Universitas Indonesia.
- Graaf, Suzanne de (2009). *Iets van een vreemde vrucht': Indische verlofgangers in Nederland 1919-1939* (Tesis). Leiden: Universiteit Leiden Faculteit der Letteren Instituut voor Geschiedenis.
- Groeneboer, Kees. (1993). *Weg tot het westen. Het Nederlands voor Indië 1600-1950*. Leiden: KITLV.
- Heide, Lolke van der (2003). "Europa: een goede tijd om iets nieuws te beginnen", *NRC Handelsblad*. <https://www.nrc.nl/nieuws/2003/04/10/europa-een-goede-tijd-om-iets-nieuws-te-beginnen-7634303-a499863> diunduh pada 16 Agustus 2016.
- Hilda Sabri Sulistio (2014). "NBTC kembali promosikan Holland pada masyarakat Indonesia" (2014) <http://bisniswisata.co.id/nbtc-kembali-promosikan-holland-pada-masyarakat-indonesia/> diunduh pada 17 Agustus 2016.
- <http://www.nbtc.nl/nl/homepage/samenwerken/internationaal-team/indonesie.htm> diunduh 7 Juli 2016.
- Jaarverslag Vereeniging Toeristenverkeer 1924* (1925). Batavia: Javasche Boekhandel & Drukkerij.

- Julias, Ferdi. (2014). "Belanda Tergiur Besarnya Potensi Wisatawan Indonesia", *SWA*.<http://swa.co.id/swa/trends/marketing/belanda-tergiur-besarnya-potensi-wisatawan-indonesia> diunduh 17 Agustus 2016.
- Kompas*, 20 November 2005.
- Lutfi Fauziah. (2015). "Pemerintah Belanda Bidik Wisatawan Muda Profesional Indonesia", <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/11/pemerintah-belanda-bidik-wisatawan-muda-professional-indonesia>. diunduh 15 Agustus 2016.
- MacCannel, Dean. (1976). *The Tourist: A New Theory of the Leisure Class*. New York: Schocken Books.
- Ministerie van Justitie. (2009). *Migratie naar en vanuit Nederland, Een eerste proeve van de Migratiekaart*. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum-Maastricht University.
- NBTC Holland Marketing. (2013). *Toekomst Perspektief Destinatie Holland 2025*. Den Haag: NBTC Holland Marketing.
- Poeze, Harry.A. (1986). *In het Land van de Overheersers I. Indonesiërs in Nederland 1600-1950*. Leiden: KITLV.
- R.Ajoe Abdoerachman. (1930). *Lalampahan Ka Eropa*. Batavia: Bale Poestaka.
- Schipper, Jan. (2000). *100 jaar VVV. Van vreemdelingenverkeer tot toerisme*. Leiden: Uitgeverij Toerboek.
- Smet, Philips. (2011). "Dutch DNA: Strategi Baru Tarik Wisatawan (2011)" <http://archieff.wereldomroep.nl/bahasa-indonesia/article/dutch-dna-strategi-baru-tarik-wisatawan> diunduh 18 Agustus 2016.
- Tempo* No 14, 8 Juni 1992.
- Vos, Kirsten. (2007). *Indië Tabeh. Opvatingen in kranten van Indische Nederlanders in Indonesië over de repatriëring (1950-1958)* (Tesis). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
- Wilkie, Ken. (2006). 'Het succes van internationale relatiemagazines. De eeuw van het beeld'. Sak van den Boom (Ed). *Relatiemedia. Praktijkboek voor doelgroepgericht communiceren*. Amsterdam: Pearson Education Benelux.
- [www.kemenpar.go.id](http://www.kemenpar.go.id) diunduh 18 Agustus 2016.

# DIASPORA DAN IDENTITAS KOMUNITAS EKSIL ASAL INDONESIA DI BELANDA

## ***DIASPORA AND IDENTITY OF EXCILE COMMUNITY FROM INDONESIA IN THE NETHERLANDS***

**Gusnelly**

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR-LIPI)  
Gedung Widya Graha, Jl. Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta Selatan  
*e-mail: nellylipi@yahoo.com*

Diterima: 15-3-2017

Direvisi: 12-4-2017

Disetujui: 3-6-2017

### ***ABSTRACT***

*This paper is the result of research on Indonesian migration that focuses on the diaspora of the exile community in the Netherlands. The purpose to discuss this issue is to tell about the existence of an Indonesian community that has been exiled from the country for decades and became stateless or lost citizenship, because its passport was revoked by the Indonesian government. They are the generation who have been forced to move to several countries and choose to seek asylum in various Western European countries after the collapse of the Soviet Union. The history of their existence abroad as a result of the event of G30S/1965. They were abroad when the G30S occurred in the country. Their departure abroad was in the leftist (socialist) countries of the mid-1960s not because of political affairs but for various interests, but in fact it was related to the occurrence of the G30S/1965. In 1989 with the fall of communism and the end of the cold war after the collapse of the superpower of the Soviet Union, most of them have registered themselves as asylum seekers to several countries in Western Europe, including to the Netherlands. As a Dutch citizen, their descendants get education and work in the Netherlands. Their descendants feel that the Dutch or Europeans are his identity but the exiles keep their nationalism for Indonesia. We call that with long-distance nationalism.*

**Keywords:** *Dutch, diaspora, exile community, asylum, citizenship.*

### **ABSTRAK**

Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang migrasi orang Indonesia yang fokus pada diaspora komunitas eksil di Belanda. Tujuan untuk membahas masalah ini adalah untuk menceritakan tentang keberadaan komunitas Indonesia yang sejak puluhan tahun terbuang dari tanah air dan menjadi *stateless* atau kehilangan kewarganegaraan, sebab pasportnya dicabut oleh pemerintah Indonesia. Mereka merupakan anak bangsa dari satu generasi yang terpaksa pindah ke beberapa negara dan memilih mencari suaka ke berbagai negara Eropa Barat pascaruntuhnya Uni Soviet. Sejarah keberadaan mereka di luar negeri sebagai akibat dari peristiwa G30S tahun 1965. Mereka sedang berada di luar negeri ketika terjadi peristiwa G30S di dalam negeri. Kepergian mereka ke luar negeri yaitu di negara-negara beraliran kiri (sosialis) di pertengahan tahun 60-an bukan karena hanya karena urusan politik, tetapi untuk berbagai kepentingan, namun pada kenyataannya disangkutpautkan dengan terjadinya peristiwa G30S tahun 1965 tersebut. Pada tahun 1989 dengan kejatuhan komunisme dan berakhirnya perang dingin setelah keruntuhan negara adi kuasa Uni Soviet sebagian besar mereka telah mendaftarkan diri menjadi pencari suaka ke beberapa negara di Eropa Barat, termasuk ke Belanda. Sebagai warga negara Belanda, anak keturunannya mendapatkan pendidikan dan bekerja di Belanda. Anak-anak keturunannya merasa Belanda atau Eropa adalah identitasnya akan tetapi orang eksil tetap menjaga nasionalisme mereka buat tanah airnya yaitu Indonesia. Kami menyebutnya dengan *nasionalisme jarak jauh*.

**Kata Kunci:** Belanda, diaspora, komunitas eksil, suaka, kewarganegaraan.

## PENDAHULUAN

Kajian tentang komunitas kaum eksil pada bagian ini lebih menekankan pada topik pembahasan tentang persoalan kewarganegaraan kaum eksil di Belanda.<sup>1</sup> Kaum eksil yang dimaksud dalam tulisan ini adalah orang Indonesia yang ketika peristiwa tahun 1965 terjadi di Indonesia, mereka sedang berada di beberapa negara sosialis (komunis) untuk berbagai macam kegiatan seperti menjadi wakil di organisasi regional/internasional, studi dan urusan lainnya. Kaum eksil oleh Presiden Abdurrahman Wahid disebut dengan istilah “kaum kelayapan” dan Hersri Setiawan menyebutnya dengan “orang-orang yang terhalang pulang” (Setiawan Hersri, 2004).

Dalam jangka waktu yang cukup lama, pembahasan tentang mereka yang menjadi korban dari terjadinya peristiwa G30S tahun 1965 tidak pernah diperdebatkan. Pembahasan tentang peristiwa tahun 1965 kembali dibicarakan setelah Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan pada 1998. Seiring dengan itu, mengiringi gelombang demokratisasi, muncul pula wacana dari para akademisi termasuk kelompok sejarawan seperti Asvi Warman Adam yang menulis “Manipulasi Sejarah” berupaya melakukan “pelurusan sejarah” dengan mengungkapkan manipulasi sejarah di era Orde Baru.<sup>2</sup> Reaksi ini masih dilanjutkan lagi dengan mengemukanya keinginan untuk melakukan rekonsiliasi antara berbagai pihak yang tersangkut peristiwa 1965. Presiden Abdurrahman Wahid dengan beberapa kelompok yang berafiliasi secara kultural dengan NU mengadakan berbagai kegiatan untuk menjajaki kemungkinan proses rekonsiliasi tersebut.

---

<sup>1</sup> Tulisan dan data yang ada pada artikel ini diperoleh dari kegiatan penelitian tim Migrasi Internasional penelitian DIPA P2SDR bidang Kajian Eropa dan ditambah dengan informasi terbaru yang dilakukan oleh penulis sendiri. Penelitian tentang komunitas eksil ini dilakukan di tahun 2013 sebagai satu tema dari rangkaian penelitian tentang Migrasi dan Diaspora Orang Indonesia di Belanda. Penelitian tentang komunitas Eksil ini dilakukan oleh penulis sendiri bersama Amin Mudzakkir dan Wahyudi Akmaliyah.

<sup>2</sup> Menurut Asvi Warman Adam peristiwa 1965 sangatlah kabur, oleh karena itu sangat penting untuk menulis Sejarah Indonesia (secara keseluruhan, bukan hanya G30S) yang komprehensif dan ensiklopedis, bukan sekadar revisi sejarah Indonesia yang sudah ada.

Namun pembicaraan tentang masyarakat eksil masih belum mengemuka. Perhatian akademis terhadap kelompok eksil ini mulai dibicarakan ketika Gus Dur berkunjung ke Belanda dan bertemu beberapa di antara mereka yang menjadi bagian dari komunitas eksil.

Kaum eksil yang dimaksud dalam tulisan ini adalah orang Indonesia yang ketika peristiwa 1965 meletus sedang berada di luar negeri untuk berbagai macam keperluan. Mereka umumnya diutus oleh pemerintahan Soekarno dan sedang berada di negara-negara sosialis-komunis (Hill, 2008; Mudzakkir, 2013). Ada di antara mereka yang tinggal di luar negeri sebagai pejabat negara, ada yang sedang menjalankan tugas sebagai diplomat, sebagai mahasiswa, utusan organisasi serikat pekerja atau partai dan sebagai duta kesenian yang sedang diundang pentas di berbagai negara. Negara yang mereka tempati adalah beberapa negara sosialis bagian dari Uni Soviet seperti Rusia, Cina, Rumania, Albania, Czechoslovakia, Vietnam, dan juga Korea Utara. Di luar itu, kaum eksil juga merujuk pada kaum Tionghoa Indonesia yang melakukan eksodus ke luar negeri beberapa saat setelah peristiwa 1965 untuk menghindari aksi pembersihan oleh militer dan kelompok-kelompok sipil.

Selama puluhan tahun kaum eksil terpisah dari tanah airnya dan *stateless* tidak bisa bertemu dengan keluarganya di Indonesia. Hak-hak sipilnya dan hak sebagai warga negara Indonesia terampas selama puluhan tahun oleh pemerintah Orde Baru (Sipayung, 2011; Setiawan, 2004). Mereka terhalang pulang karena tuduhan yang tidak dipahaminya, disangkutpautkan dengan partai komunis. Padahal belum tentu mereka berada di luar negeri untuk kepentingan partai komunis itu sendiri. Mereka diperbolehkan pulang ke Indonesia asalkan mengakui kesetiaan terhadap pemerintah yang baru dan juga harus menyetujui pernyataan bahwa G30S didalangi oleh PKI dan Soekarno ikut terlibat di dalamnya. Jika mereka menolak maka berarti berseberangan dengan garis politik Orde Baru rezim Orde Baru. Pengumuman hasil *screening* dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri pada tanggal 15 Mei tahun 1966 (Hill, 2010; Gusnelly, 2013).

Dalam perkembangannya, banyak eksil Indonesia yang tersebar di berbagai negara sosialis-komunis bermigrasi ke negara-negara Eropa Barat, termasuk Belanda. Di sana mereka membangun kehidupan baru. Sebagian besar mengajukan aplikasi untuk menjadi kewarganegaran setempat dan akhirnya diterima. Meskipun demikian, ikatan dan rasa kepemilikan mereka terhadap Indonesia tidak hilang. Dengan segenap cara mereka tetap aktif membangun komunikasi baik di antara mereka atau dengan teman sejawat lain yang mempunyai perhatian terhadap situasi di Indonesia.

Tulisan ini membahas diaspora orang Indonesia di Belanda, khususnya tentang kelompok eksil yaitu mereka yang terusir di tahun 1965 karena adanya peristiwa G30S. Ternyata jarak jauh dan waktu yang lama mereka habiskan di negeri yang baru, nasionalisme mereka tidak pudar. Mereka tetap merasa sebagai orang Indonesia. Identitas formal tidak mereka butuhkan jika hanya ingin menyatakan dan menunjukkan bahwa mereka adalah orang Indonesia. Keputusan untuk menjadi imigran suka di negeri yang di masa lalu telah menjajah tanah airnya bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Nilai-nilai kecintaan dan nasionalisme terhadap tanah airnya Indonesia masih belum pudar meskipun telah terbangun jauh dari tanah airnya itu. Sekarang kewarganegaraan mereka bermacam-macam, mengikuti negara di mana mereka tinggal, tetapi secara politik dan ideologi mereka adalah kaum nasionalis jarak jauh.

## **MIGRASI DAN PEMBENTUKAN KOMUNITAS DIASPORA**

Pembahasan tentang diaspora akan berkaitan dengan pembahasan migrasi transnasional di mana berbagai budaya mewarnai terjadinya proses pembentukan identitas baru di tempat yang baru di luar negara asalnya. Identitas adalah sebuah konstruksi sosial. Migrasi dan diaspora menjadi elemen yang melekat erat dengan konstruksi identitas dan menjadi bagian penting dalam struktur sosial pada komunitas etnik di berbagai negara. Namun pada era belakangan, konstruksi identitas terkait dengan hubungan antara komunitas diaspora dengan jaringan transnasional di negara asal nenek

moyangnya yang menjadi mudah melalui sarana komunikasi, teknologi, dan transportasi yang lebih maju.

Virinder S. Kalra dan Raminder Kaur (2005) mengatakan bahwa ada keterkaitan antara diaspora dengan migrasi dan etnisitas. Imigran dalam studinya dikatakan sebagai komunitas dan ketika jumlah mereka semakin bertambah banyak dalam periode waktu tertentu, mereka tidak bisa kembali ke negara asalnya. Oleh karena itu, migrasi dan diaspora menurut Shuval (2000) menjadi elemen yang melekat erat dengan persoalan pembentukan identitas suatu bangsa dan menjadi bagian penting dalam struktur sosial pada komunitas etnik di berbagai negara.

Bicara tentang diaspora orang Indonesia di Belanda, seringkali orang mengkaitkan dengan adanya hubungan kolonialisasi di antara keduanya. Keterkaitan antara migrasi dan kolonialisme sebagai pembentuk diaspora, sama akan halnya dengan terjadinya diaspora orang Cina di Malaysia, di Singapura, diaspora orang Amerika, dan Spanyol di Filipina. Demikian pula dengan keberadaan diaspora orang Suriname, lalu diikuti dengan diaspora orang Indonesia, salah satunya diaspora Maluku di Belanda. Penjajahan bangsa Barat dan ekspansi ekonomi mendorong masyarakat jajahan untuk migrasi (pindah) karena tenaga mereka diperlukan. Mereka tinggal permanen dan akhirnya menetap kemudian membangun kultur baru yang merupakan perpaduan antara kultur asli dengan kultur di tempat yang baru (Shuval, 2000; Crammer, 2000).

Pembentukan diaspora secara klasik juga berkaitan erat dengan pergerakan (*movement*), keluar (*exile*) dan merasa kehilangan kesempatan untuk kembali (Kalra & Kaur, 2005, 10 - 4). Sejarah migrasi yang sudah dimulai sejak masa kolonial tersebut secara bertahap mengalami perubahan *trends* seiring dengan perubahan situasi politik dan negara Indonesia (lihat tabel 1 di bawah). Pada masa penjajahan Belanda terjadi migrasi oleh mereka yang merupakan kelompok Indo-Europeanen.

Tabel 1. Sejarah Migrasi Orang Indonesia ke Belanda dalam Beberapa Periode

Era Kolonial (sebelum Kemerdekaan)	Era awal 1940an- 1945	Era Tahun 1949-1958	1965
<ul style="list-style-type: none"> <li>Abdus Zamad yaitu seorang duta besar Kesultanan Aceh untuk Belanda, pada awal abad ke 17-an sudah ada yang datang lalu menetap sampai meninggal dan dimakamkan di Belanda.</li> <li>Pada akhir abad ke-18 banyak pribumi keturunan Belanda/Eropa yang sudah mulai berdatangan ke Belanda karena mereka sudah memeluk agama Kristen dan memiliki kemampuan berbahasa Belanda.</li> <li>Pada awal abad ke 20-an sejumlah anak-anak muda diundang datang ke Belanda untuk menempuh pendidikan sebagai dampak dari diberlakukannya politik etis (<i>De ethische politiek</i>) dan melahirkan generasi pembangkit gerakan nasionalisme di Hindia-Belanda</li> <li>Pada pertengahan tahun 1930-an, terjadi migrasi tenaga kerja dalam berbagai sektor yaitu para pekerja kapal, pekerja restoran dan tenaga kasar lainnya di bidang industri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Periode tahun awal tahun 1940-an-1945 terjadi pula migrasi besar-besaran orang Eropa-Indonesia yaitu mereka yang berasal dari keturunan campuran Indo-Europeanen</li> <li>Pada tahun yang sama di antara tahun 1945 dan 1965 terjadi pula migrasi besar-besaran yang dilakukan kelompok Indo Belanda ataupun orang Indonesia ke negara Belanda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Periode tahun 1951-1956, yaitu gelombang terbesar masuknya orang Maluku</li> <li>Pada tahun 1957 terjadi pula migrasi atas anak-anak keturunan Indo karena diberlakukannya undang-undang kewarganegaraan yaitu UU No 62 tahun 1958</li> <li>Periode tahun 1958, yaitu gelombang masuknya orang-orang yang tidak menerima proses nasionalisasi di Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Migrasi kelompok etnis Cina Indonesia karena situasi politik yang tidak stabil karena peristiwa G30S/PKI</li> <li>Migrasi komunitas eksil tahun 1967 dan akhir tahun 1989.</li> <li>Migrasi oleh masyarakat pribumi Indonesia (pekerja/mahasiswa) yang terkait dengan peristiwa tahun 1965</li> <li>Dimulai pada tahun 1970-an, permintaan untuk mengisi kekurangan tenaga kerja keperawatan Belanda dan berakhir di akhir tahun 1980-an.</li> <li>Pada akhir tahun 1990-an kegiatan perekrutan tenaga perawat dilakukan lagi oleh agen tenaga kerja untuk dikirim ke Belanda.</li> </ul>

Sumber: data diolah dari Imhoff, 2004 ; Wittermans, 1955; Hisyam, M., 1996; Gusnelly, 2005.

Terdapat beberapa periode migrasi yang dilakukan oleh kelompok Indo-Belanda di era kolonialisasi. Mereka dikenal dengan beberapa istilah seperti *Indisch Nederlander* atau *Indisch*. Migrasi yang dilakukan oleh kelompok kaum keturunan ini bisa dapat dikategorikan sebagai migrasi permanen (*permanent migration*). Misalnya, pada masa pendudukan Jepang (1939-1945), anak-anak Indo dan nyai-nyai Belanda, pindah ke Belanda dan sebagian besar tidak kembali lagi ke Indonesia, hanya saja jumlahnya tidak diketahui. Kemudian ketika terjadi penyerahan kedaulatan Indonesia di tahun 1949, mayoritas penduduk Indo-Belanda pergi pindah ke Belanda (Imhoff, 2004).

Data lain menyebutkan bahwa aktivitas migrasi keturunan Indo ini sudah berlangsung sejak awal tahun 1946 sampai di tahun 1965 dan jumlahnya mencapai 300.000 orang atau sekitar 2,5 persen dari total penduduk Belanda yang berjumlah 12 juta jiwa. Dalam rentang tahun yang sama pula, dampak dari pemberlakuan UU No 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan menyebabkan terjadi lagi migrasi atas anak-anak keturunan Indo. Undang-undang kewarganegaraan memaksa orang-orang Eropa-Indonesia harus memilih kewarganegaraan, Indonesia atau Belanda. Jika ingin menetap mereka harus melalui proses naturalisasi dan jika ingin tetap sebagai orang Belanda (*Europeens*) mereka harus meninggalkan Indonesia (Imhoff, 2004).

Tabel di atas menunjukkan bahwa aktivitas migrasi oleh masyarakat Hindia Belanda (Indonesia) disebabkan karena terjadinya situasi yang tidak stabil atau peristiwa yang mengharuskan individu mencari tempat lain untuk mendapatkan keamanan dan kehidupan yang lebih baik. Perubahan situasi yang sangat mendadak telah mempengaruhi pikiran dan mendorong orang untuk memilih pindah atau migrasi ke wilayah lain. Migrasi dapat pula dilakukan secara berkelompok maupun sendiri-sendiri. Pilihan migrasi menjadi penting ketika terjadi kondisi yang membuat individu atau kelompok menjadi tidak nyaman. Pendapat ini sesuai dengan Daniel Byman (2002) yang menyitir Barbara Walters bahwa ada suatu situasi yang mendorong individu atau kelompok

memutuskan untuk migrasi atau dengan kata lain kami menyebutnya terjadinya krisis. Krisis tidak hanya pada hal ekonomi semata akan tetapi ada krisis politik dan sebagainya yang mendorong individu membuat putusan untuk pindah.

## MENCARI SUAKA KE BELANDA

Dalam konteks migrasi, komunitas eksil adalah salah satu komunitas diaspora Indonesia. Komunitas eksil terusir dari negaranya, lalu memilih menjadi imigran permanen di negara lain meskipun mereka tidak pernah inginkan. Mereka migrasi ke luar negaranya, berkeluarga, berkembang di daerah yang baru untuk jangka waktu yang lama. Keberadaan mereka diluar negeri disebabkan oleh krisis dan kekacauan politik di Indonesia. Situasi politik yang kacau di tahun 1965 dan dilekatkan dengan isu ideologi menyebabkan mereka terlarang dan dicegah untuk kembali ke negara asalnya padahal mereka sendiri tidaklah paham apa sebenarnya yang terjadi di dalam negeri. Selama puluhan tahun kaum eksil terpisah dari tanah airnya dan tidak bisa bertemu dengan keluarganya di Indonesia (Sipayung, 2011, 12). Hak-hak sipilnya dan hak sebagai warga negara Indonesia terampas selama puluhan tahun oleh pemerintah Orde Baru.

Dalam pengasingannya selama puluhan tahun, mereka yang bekerja sebagai seniman masih tetap berkarya, sehingga cukup banyak karya seni yang lahir dari para eksil yang berada jauh dari negaranya. Seperti Kuslan Budiman, masih sering berkirim tulisan cerita pendek atau novel ke beberapa penerbit lokal di Indonesia. Keistimewaan yang patut diteladani dari jaringan pertemanan kaum eksil ini adalah komunikasi yang tidak pernah terputus dan terjaga dengan baik yang mereka sebut sebagai komunikasi “bawah tanah”. Melalui komunikasi bawah tanah ini pula mereka tetap mendapatkan berita dan informasi tentang perkembangan yang terjadi di tanah airnya selama di luar negeri. Komunikasi dengan keluarga dilakukan dengan berkirim surat dan menitipkan pesan melalui anak-anak Indonesia yang mampir untuk berkunjung ke rumah mereka.<sup>3</sup> Dalam perkembangannya,

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kuslan Budiman di Woorden, Belanda, pada tanggal 30 Mei 2013.

setelah kejatuhan Uni Soviet di akhir tahun 1980-an, situasi politik yang penuh kekacauan memaksa kaum eksil yang tersebar di berbagai negara blok Timur bermigrasi ke negara-negara Eropa Barat, termasuk Belanda. Mereka mendaftarkan diri menjadi pencari suaka ke beberapa negara di Eropa Barat, termasuk ke Belanda.

Keputusan untuk mengajukan suaka ke Belanda dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan *pertama* adalah jejaring, tersedianya jaringan sosial di Belanda. Sudah tentu tidak semua memiliki pertemanan di Belanda, akan tetapi beberapa kelompok aktivis hak asasi manusia bersedia mempersiapkan undangan untuk datang ke Belanda. Pertemanan dengan beberapa kolega yang sudah lebih dahulu menetap di Belanda, meminta bantuan kepada organisasi gereja, wartawan, dan organisasi politik seperti *Communist Partij Netherland* (CPN) untuk memudahkan proses pengajuan suaka politik mereka (Sipayung, 2011). Namun dalam menjalankan proses tersebut, penyiapan dokumen dan berbagai hal lainnya, mereka dibantu oleh salah seorang Profesor di Universitas Amsterdam yang bernama Prof. Wertheim yang memiliki kepedulian terhadap komunitas eksil Indonesia.<sup>4</sup>

Pertimbangan *kedua* yaitu dilihat dari konteks ke Indonesian, mereka yang sudah tinggal di Belanda memberikan informasi bahwa berdasarkan ketentuan pemerintah kolonial Hindia Belanda di tahun 1848, bahwa penduduk koloni Belanda akan disetujui sebagai warga negara Belanda dengan keterbatasan hak politik dan sosial. Oleh karena itu, penduduk Indonesia yang disebut sebagai bagian dari koloni Belanda adalah yang terlahir sebelum tahun 1949. Kebijakan dimanfaatkan oleh kaum eksil asal Indonesia untuk mengajukan penduduk tetap dan mengajukan naturalisasi kepada pemerintah Belanda. Mereka yang datang sebelum pecahnya Uni Soviet sedikit lebih beruntung karena tidak perlu mendaftar sebagai pencari suaka tapi secara langsung mendaftar untuk penduduk tetap.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Wawancara dengan Mintardjo, 25 Mei 2013, Leiden 2013

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kuslan Budiman, Woorden, tanggal 31 Mei 2013.

Berdasarkan konvensi Genewa, sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi kebijakan tentang suaka maka Belanda diwajibkan untuk menerima para suaka politik dan sekaligus membuat kebijakan tentang suaka. Namun demikian semua proses pendaftaran harus dijalani oleh pemohon sesuai kebijakan negara yang hendak memberikan suaka. Secara formal mereka yang meminta suaka biasanya adalah karena situasi terdesak oleh keadaan yang membahayakan dan terkait dengan kelangsungan hidup (Hamid, 2002). Berdasarkan ketentuan dalam statistic (CBS) negara Belanda yang disitir oleh Han Nicolaas (1999) disebutkan "*asylum seekers who are allowed to stay in the Netherlands and who are subsequently registered as immigrants, have the right, under certain circumstances, to bring their partner and/or child(ren) to the Netherlands (<http://www.cbs.nl>)*". Terdapat beberapa faktor yang menjadi syarat pengajuan permohonan suaka politik, yaitu:

- Situasi politik dari negara asal.
- Jumlah permintaan untuk mendapatkan suaka ke negara tersebut.
- Permintaan menjadi pencari suaka disetujui dan kemudian dapat mendaftarkan dirinya sebagai *asylum migrant* pada wilayah tempat tinggalnya.
- Adanya kebijakan pemerintah tentang pencari suaka.

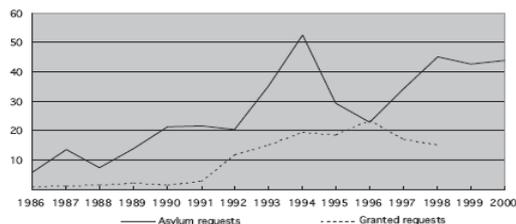
Proses mengajukan permohonan suaka politik ke Belanda dilakukan sebagai berikut:

- Mengajukan permohonan menjadi suaka melalui perwakilan negara yang hendak dimintai suaka.
- Pendaftaran untuk menjadi **asylum** dilakukan secara bertahap. Pada awal pendaftaran hanya kepala keluarga (suami) yang terdaftar sebagai pemohon, tidak termasuk istri dan keluarga. Ketika permohonan diterima, suami berangkat lebih dahulu, kemudian disusul oleh keluarga. Istri akan terdaftar sebagai imigran suaka pada tahun berikutnya.
- Wawancara dilakukan oleh lembaga *Aanmeldcentra* (ACs) atau *Application Centres* yang berada di bawah lembaga

yang disebut *Immigration and Naturalization Services* (IND).<sup>6</sup>

Proses penempatan para pencari suaka juga tidak menentu tergantung penawaran atas tempat tinggal yang di berikan oleh pemerintah Belanda karena mereka tinggal bukan di dalam rumah yang besar akan tetapi dalam barak-barak di mana dalam satu kamar akan diisi oleh 3 atau lebih pengungsi. Jika mereka satu keluarga biasanya akan diberikan kamar yang agak besar. Setiap bulan setiap orang akan diberikan uang saku sebesar 55 euro setiap minggunya.<sup>7</sup>

Jika dilihat dari statistik, ketika komunitas eksil mengajukan suaka di awal tahun 1990-an, terdapat pula pengajuan suaka dari kelompok lainnya, sehingga jumlah secara rinci berapa orang dari eksil yang mendaftar tidak jelas. Hanya diketahui bahwa pada masa itu terdapat sekitar 22.000 orang dari negara-negara bekas Uni Soviet yang mendaftar ke beberapa negara di Eropa Barat, seperti Jerman dan Belanda melalui UNHCR. Pada awal tahun 1990-an, negara telah mencatat bahwa terdapat sekitar 438.000 orang pencari suaka asal negara bekas Uni Soviet (Huntington, 1996). Pada tahun 1993 jumlah pencari suaka meningkat menjadi hampir 20 ribu, atau sekitar 17% dari total imigrasi di Belanda. Pada periode 1990-1996 hampir 100 ribu migran suaka dari banyak negara diperbolehkan masuk ke Belanda sebagai pencari suaka.



Source: Statistics Netherlands, 1999c and 2000.

**Sumber:** CBS, Belanda dalam Liesbeth Heering dan Helga de Valk, 1999; p. 254

**Grafik:** Jumlah Asylum dan Refugee di Belanda Tahun 1996-2000

<sup>6</sup> Penerimaan terhadap permintaan suaka akan dilakukan dalam jangka waktu beberapa bulan, tergantung kepada proses hukum yang dijalaninya. Lembaga *Immigration and Naturalization Services* (IND) yang memutuskan dan menentukan ditolak atau diterimanya permintaan suaka tersebut (Ondieki Ngare, 2009; 10).

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak K. Budiman di Woorden, Belanda pada tanggal 30 Mei 2013

Lembaga dunia yang menangani urusan suaka adalah UNHCR. Sejak tahun 1985, UNHCR berperan aktif dalam memasukan para kelompok asylum ke Belanda melalui lembaga yang disebut *the Dutch Council for Refugees*.<sup>8</sup> Selain UNHCR, kelompok lainnya adalah agen-agen sukarela yang dipimpin oleh *European Consultation of Refugee and Exiles* (ECRE). Pihak-pihak yang tergabung dalam ECRE adalah kelompok advokat dan gereja. Kelompok yang tergabung dalam ECRE ini selain membantu proses masuknya para pencari suaka satu negara, juga ikut memperhatikan kondisi mereka ketika berada di penampungan. Pihak Gereja Protestan dan Katolik ikut memonitor kegiatan suaka di negara Eropa Barat dan berusaha untuk mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk para pencari suaka dan pengungsi.

## MENJADI WARGA NEGARA BELANDA

Pengalamannya sebagai orang terbuang dan hidup dalam pengasingan tanpa identitas yang jelas memunculkan kesadaran bahwa memilih pindah dan menetap di Belanda barangkali akan lebih baik bagi mereka. Bermula dari permohonan menjadi suaka yang dilanjutkan dengan tindakan mengajukan naturalisasi. Pertimbangan untuk mengajukan permohonan naturalisasi disebabkan karena pemerintah Belanda memberikan peluang dan kemudahan untuk pengajuan naturalisasi salah satunya melalui kebijakan *minorities act* tahun 1983. Dalam ketentuan *minorities act* tahun 1983 dimungkinkan kepada orang asing mengajukan penduduk tetap selama persyaratan yang telah ditetapkan terpenuhi. Sejak keluarnya peraturan tersebut kelompok minoritas harus belajar bahasa dan budaya Belanda sesuai dengan motto yang dikeluarkan "*integration while preserving one's own identity*" (Siedenburg. 2004).

Kemudian di tahun 1984, kebijakan imigrasi Belanda memberikan peluang untuk

<sup>8</sup> *The Dutch Council for Refugees* merupakan lembaga swadaya masyarakat yang di dalamnya terdapat beberapa kelompok profesi seperti pengacara atau advokat yang berdiri tahun 1979 yang berkantor di Amsterdam (<http://www.ecre.org/alliance/members/profiles/members/55.htm>)

orang asing dan sudah berumur 18-25 tahun untuk mengajukan permohonan naturalisasi. Kebijakan imigrasi dan integrasi di Belanda di awal tahun 1990-an yang sangat berpihak pada imigran memudahkan untuk orang asing mengajukan permohonan naturalisasi (Castles and Miller, 2003, 237). Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama dari bab 5 perjanjian Maastricht tahun 1991 (*the Maastricht Treaty 1991*) yang menetapkan bahwa pemerintah di negara-negara harus mulai memberikan perhatian kepada para imigran. Pada tanggal 30 September 1998 pemerintah membuat kebijakan integrasi yang baru yaitu *Newcomer Integration Act*. Mulai sejak tanggal disyahnkannya peraturan tersebut maka ditetapkan juga bahwa semua imigran baru yang masuk ke Belanda yang berumur di bawah 16 tahun dan berasal dari luar kawasan *European Union* (EU) atau *European Economic Area* (EEA) maka harus segera mendaftar untuk melakukan program integrasi (Siedenburg, 2004). Program integrasi tersebut memberikan syarat bahwa mereka yang akan mengajukan naturalisasi sudah memiliki kemampuan berbahasa Belanda, belajar budaya Belanda, memahami struktur sosial serta memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan kerja di Belanda.

Setelah menjadi warganegara Belanda, ada hak-hak sipil yang diterima dan melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu (1) Tidak ada diskriminasi/dapat perlakuan yang sama, (2) Kebebasan beragama/beribadah, (3) Kebebasan berbicara, (4) Kebebasan berkumpul, berserikat, dan melakukan demonstrasi, (5) Menghormati hak personal atau privasi individual, dan (6) Tidak boleh mengganggu atau menyentuh tubuh seseorang.

Kendati sudah mendapatkan pengakuan sebagai warga negara, pemerintah masih memberikan ketentuan lainnya bahwa semua imigran harus mampu berintegrasi dengan budaya dan sistem sosial yang berlaku di Belanda. Rekonstruksi identitas baru sebagai warga negara Belanda seringkali hanya di atas kertas, namun ideologi dan rasa kebangsaan seringkali masih negara asalnya. Rekonstruksi masih sebagai suatu bentuk dari representasi terhadap dirinya

sendiri maupun orang lain. Identitas itu sendiri merupakan sumber pemaknaan dan pengalaman bagi seseorang karena menunjukkan proses konstruksi berdasarkan sifat-sifat budaya (Castells 1997, 6). Kepindahan kaum eksil ke Belanda tetap dengan komitmen politis mereka sebagai individu yang merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia meskipun mereka tidak tinggal lagi di tanah airnya. Keterikatan mereka sebagai anak bangsa masih terhubung dengan ideologi nasionalisme yang dibangun di bawah kepemimpinan era Orde Lama serta kekagumannya terhadap sosok presiden Soekarno. Hal inilah yang membedakan antara diaspora komunitas eksil dengan diaspora Indonesia lainnya, meskipun mereka berada pada negeri yang sama, yaitu Belanda. Sejarah pembentukan nasionalisme komunitas eksil berbeda dengan nasionalisme komunitas Maluku, meskipun mereka sama-sama diaspora Indonesia yang tinggal dan beranak pinak di Belanda. Diaspora eksil memiliki nasionalisme jarak-jauh karena ia mengandung unsur dan tujuan politik tertentu yang mengaitkan antara orang-orang dan tanah leluhurnya secara kuat (Mudzakir, 2013).

Cerita tentang seorang diaspora eksil dengan seorang diaspora Maluku akan tidaklah sama meskipun mereka memulai dengan proses yang sama. Migrasi dan menjadi pengungsi, tinggal di barak-barak tetapi alasan atas keberadaannya di Belanda menjadikan mereka berbeda dalam memaknai hubungan dengan atau relasi dengan tanah airnya. Seorang diaspora Maluku, membangun nasionalisme sebagai seorang pendatang untuk meminta pengakuan sebagai warganegara Belanda karena sejak awal sudah dijanjikan oleh Kerajaan Belanda. Mereka ditempatkan secara berkelompok pada beberapa perkampungan tersendiri oleh pemerintah Belanda (Gusnelly, 2011). Mereka bekerja dan mendapatkan rumah yang layak serta subsidi dari pemerintah Belanda.

## **AKTIVITAS SEBAGAI WARGA NEGARA BELANDA**

Komunitas eksil hidup dengan nyaman di wilayah barunya, di mana segala kebutuhan hidupnya tercukupi, negara mengakomodir

kepentingan mereka dengan baik. Identitas baru sebagai warga negara Belanda, tetapi nasionalisme mereka tetap pada ideologi yang diajarkan oleh Soekarno, yaitu bangsa Indonesia. Mereka tetap mempertahankan komitmen politis terhadap negara Indonesia. Keberadaannya sebagai diaspora eksil di negeri Belanda kini, bahkan nanti akan jembatan atau jaringan sosial bagi orang Indonesia generasi berikutnya untuk datang ke Belanda. Era ekonomi global yang memperpendek jarak bahkan batas negara, meningkatkan banyaknya aktivitas transnasional, termasuk perpindahan orang. Komunikasi dengan keluarga sudah dapat dilakukan dengan mudah, tidak lagi melalui surat dan sembunyi-sembunyi, atau menitipkan pesan pada teman, akan tetapi sudah bisa komunikasi langsung. Sudah ada pula beberapa dari eksil yang mengundang kerabat, saudara dan teman datang ke Belanda, mencoba peruntungan baru di negeri Belanda.

Menciptakan masyarakat baru di negara yang baru akan memperkuat posisi migran. Jaringan sosial di antara komunitas akan dibangun sebagai salah satu akses untuk mempertahankan keberadaan mereka ditempat yang baru. Munculnya jaringan sosial yang terbangun karena adanya muatan primordialisme akan membantu pendatang baru untuk memahami budaya dan sosial ekonomi serta lebih mampu bertahan hidup di negara yang baru. Bagi para pelajar asal Indonesia, situasi ini sangat menguntungkan karena komunitas eksil sangat membantu untuk beradaptasi dengan budaya dan sistem pendidikan Belanda. Diskusi dan pertemuan pelajar asal Indonesia juga kerap difasilitasi oleh komunitas eksil ini.

Menarik sekali mengamati kehidupan komunitas eksil di Belanda yang sangat mencintai tanah airnya meskipun hidup dipenuhi oleh fasilitas asing. Mereka tinggal lama di luar negeri, menikah dengan perempuan asing, tetapi rasa cinta Indonesia dan kekeluargaan terhadap orang Indonesia masih dimiliki. Selama penelitian tentang diaspora Indonesia di Belanda, kami mendapatkan tumpangan di rumah pak Mintardjo. Mintardjo menikah dengan perempuan Rumania bernama Liliana dan memiliki 3 orang anak yaitu Heru, Ratnawati, dan Nurkasih. Nama anak Mintardjo begitu kental dengan nama Indonesia.

Anak-anak Mintardjo, tidak terbiasa dengan makanan Indonesia (Asia), padahal bapaknya (Mintardjo) sangat mencintai masakan Indonesia. Mereka tidak paham seperti apa budaya, masakan dan sistem sosial yang berlaku di tanah air ayahnya, namun ketika tinggal di Belanda, Nurkasih dan Heru belajar banyak tentang ke-Indonesia-an ayahnya. Di Belanda, ayahnya mulai terbiasa memasak makanan Indonesia, terutama ketika para pelajar Indonesia mulai berdatangan ke rumahnya. Nurkasih, Ratna dan Heru sudah bisa menikmati masakan Indonesia, seperti sup buntut, sate ayam, nasi goreng dan mie goreng ketika tinggal di Belanda. Semua berjalan secara natural. Jika tradisi bisa dipaksakan namun darah yang mengalir dan selera makanan tetap berlangsung secara natural.

Mintardjo menerima subsidi sebesar 900 euro setiap bulan.<sup>9</sup> Ketika mereka baru pindah ke Belanda, ketiga anak-anaknya masih sekolah dan istrinya juga mendapatkan kesempatan bekerja. Mintardjo memperoleh pekerjaan di sebuah biro pemerintah Rumania di Bukares hingga 1989. Kemudian pindah ke Belanda dan bekerja pada sebuah perusahaan milik Belanda, sampai usia pensiun. Demikian pula dengan istrinya yang juga bekerja dan pensiun di usia 55 tahun. Mereka berdua mendapatkan pensiun dan juga uang subsidi dari pemerintah. Setiap bulan uang subsidi yang diterima Mintardjo berkisar antara 1200 euro, istrinya dibantu oleh negara sebesar 900 euro dan asuransi kesehatan. Setelah istrinya meninggal hanya Mintardjo saja yang tinggal di dalam rumahnya yang besar di daerah Oegstgeest, Leiden.<sup>10</sup> Sebagai warga negara pendatang, Mintardjo tetap mendapatkan hak yang sama dengan warga negara pribumi. Baginya itu sudah

---

<sup>9</sup> Bapak Mintardjo meninggal tahun 2015 yang lalu karena sakit selama liburan di Indonesia. Selama kami melakukan penelitian tentang diaspora Indonesia di Belanda, salah satunya tentang komunitas eksil, pak Mintardjo merupakan salah satu responden yang banyak membantu terutama saat kami melakukan FGD (diskusi) dengan komunitas eksil lainnya di rumahnya di Leiden. Meskipun dia sudah terusir dari tanah airnya karena mengemban tugas belajar atas perintah Soekarno, dia tetap tidak lupa tanah airnya karena itu ideologi yang sangat ditanamkan oleh bung Karno kepada para pengikutnya. Wawancara dengan Bapak Mintardjo 27 Mei 2013 di Leiden, Belanda.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Mintardjo, 27 Mei 2013 di Leiden, Belanda.

cukup, anak-anaknya sudah bekerja, menikah dan dia masih bisa menikmati liburan setiap tahunnya, bahkan 2 tahun sekali dia usahakan untuk pulang ke Indonesia. Peruntungan yang diharapkan itu akhirnya diperoleh juga di negeri Belanda.

Hal yang sama juga diperoleh oleh seorang eksil, dia memiliki identitas sebagai warga negara Belanda melalui naturalisasi, mendapatkan kembali hak-hak sebagai warga negara dari negeri Belanda. Jumlah diaspora eksil tidaklah banyak, mereka tinggal menyebar pada beberapa wilayah, sudah memiliki anak bahkan cucu. Ada yang tinggal di Den Haag, Leiden, Amsterdam, dan Utrecht. Subsidi dari pemerintah Belanda untuk rumah, asuransi dan pelayanan publik mereka dapatkan karena itu haknya sebagai warga negara. Kuslan Budiman, misalnya, tinggal di daerah Worden, Propinsi Utrecht. Dia menerima uang subsidi rumah sebesar 300 euro karena dia tidak menikah, dapat asuransi kesehatan dan juga biaya hidup.

Berkumpul bersama para pelajar atau mahasiswa asal Indonesia menjadi sebuah cara mereka mendapatkan kebahagiaan. Sejak berkembangnya teknologi komunikasi, internet (*email, facebook*), kaum eksil menemukan arena baru yang menembus batas-batas teritorial negara. Lebih lanjut juga diperoleh informasi dari mahasiswa Indonesia di Leiden bahwa tokoh eksil yang produktif dan mengelola blog adalah Ibrahim Isa dengan nama blog (<http://ibrahimisa.blogspot.com>). Mintardjo juga sangat aktif berinteraksi di media sosial *Facebook* baik secara pribadi maupun bergabung dalam komunitas *Leidener* yang dikelola oleh para mahasiswa asal Indonesia di Leiden. Tinggal dan sekolah di Leiden tidak mengalami kesulitan karena ada Mintardjo yang akan membantu beradaptasi. Kegiatan di PPI Belanda, terutama Leiden seringkali difasilitasi oleh Mintardjo dan teman-temannya.

Komunitas eksil di Belanda berpendapat bahwa oleh mereka adalah warga negara Belanda, mendapatkan hak dan melakukan kewajiban seperti warga negara lainnya. Belanda adalah pilihan terakhir untuk mereka menetap, mengurus dirinya dan menikmati masa tua dan

mungkin akan menjadi tempat terakhirnya ketika dijemput oleh kematian. Anak-anak mereka sudah berkeluarga, tinggal dengan pasangannya masing-masing, hanya sekali-kali saja mereka akan berkunjung ke rumah orang tuanya. Oleh karenanya, sebagai orang tua yang sudah berusia lebih 70 tahun, mengurus dirinya sendiri sudah harus dilakukan. Secara individual sebagai warga negara Belanda, peran negara adalah melindungi warga dalam melaksanakan haknya.

## PENUTUP

Dalam sebuah negara seringkali tinggal beraneka macam bangsa, dan anggota suatu bangsa tidak selalu menempati negara yang sama. Suatu etnis dapat menunjukkan identitasnya sebagai bangsa pada sebuah teritori jika dia mendapatkan sumber-sumber ekonomi dan politik. Oleh karena itu, sebuah bangsa yang terbentuk karena terjadinya diaspora akibat adanya migrasi tidak dapat melepaskan ingatan tentang negeri asalnya karena nasionalisme tidak mengenal teritori. Sebenarnya hal ini sangat mengganggu dalam proses integrasi antara imigran dan pendatang pada sebuah negara karena ada pandangan bahwa menjadi warga negara bukan berarti harus menjadi nasionalis. Seorang imigran dan keluarganya bisa saja mendapatkan status kewarganegaraannya, berhasil melakukan penyesuaian dan bersosialisasi dengan penduduk lokal, namun belum pasti mendapatkan status sebagai seorang nasionalis dari sebuah negara yang didiaminya.

Terdapat perlakuan yang berbeda ketika kaum eksil melakukan proses tahapan pengajuan naturalisasi atau mendapatkan status kewarganegaraan resmi sebagai warga negara. Kaum eksil yang datang sebelum pecahnya Uni Soviet sedikit lebih beruntung karena tidak perlu mendaftar sebagai suka tapi secara langsung mendaftar untuk penduduk tetap. Sementara itu kaum eksil yang datang dari negara bekas Uni Soviet di awal tahun 1990-an harus menjalani tahap menjadi suka terlebih dahulu. Status mereka di awal adalah sebagai pencari suka atau imigran karena suka. Istri/anak atau keluarga akan ikut menetap di negara yang memberi suka setelah beberapa bulan menetap dan terdaftar pada

tahun berikutnya pada registrasi kependudukan setempat. Proses menuju penduduk tetap juga tidaklah mudah, ada yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, tergantung atas kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh eksil tersebut.

Menjadi bagian dari masyarakat diaspora di Belanda, meskipun sulit akan tetapi lebih mudah mengingat kondisi Belanda sendiri sebagai negara kesejahteraan yang stabil dan kuat pada masa itu. Meskipun sebuah negara kecil dengan luas wilayah hanya 42.000 km, namun di negeri Belanda pula mereka dapat menemukan rumah baru yang mempertemukan kembali beberapa kelompok komunitas diaspora asal Indonesia lainnya. Belanda yang menjadi tempat tinggal mereka sekarang merupakan wilayah dan rumah baru dengan segala macam aturan dan kewajiban hukum yang harus dipatuhi sebagai warga negara. Mereka hanya menginginkan anak-anak mereka diberi kemudahan dalam mendapatkan akses baik di sektor ekonomi, politik dan sosial budaya.

Komunitas eksil sudah hidup di Belanda dengan 3 generasi yaitu anak dan cucunya. Generasi pertama adalah mereka sebagai orang eksil, lalu generasi kedua anak-anaknya, dan kemudian generasi ketiga adalah cucunya. Sebagai warga negara Belanda, anak keturunannya mendapatkan pendidikan dan bekerja di Belanda. Jiwa nasionalis anak-anak keturunannya mungkin adalah nasionalis Belanda atau Eropa, akan tetapi orang eksil tetap menjaga nasionalisme mereka buat tanah airnya, yaitu Indonesia.

## PUSTAKA ACUAN

- Adam, Asvi Warman. (2009). *Pelurusan Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Adam, Asvi Warman. (1999). "Manipulasi Sejarah", dalam Tim Cidesindo, *Membuka Lipatan Sejarah: Menguak Fakta Gerakan PKI*, Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Budiawan. (2004). *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto*. Jakarta: Elsam.
- Crammer, John. (2002). *Diaspora and Identity: The Sociology of Culture in Southeast Asia, Malaysia*: Pelanduk Publication.
- Gusnelly. (2005). "Social integration and migrant mobility: a case study of Moluccans in the Netherlands" dalam Nur Aisyah Kotarumalos, *Crisis and Migration: A case study of Moluccans in the Netherlands*, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, LIPI
- Gusnelly. (2013). *Persoalam Kewarganegaraan Kaum Eksil*, laporan penelitian P2SDR tahun 2013.
- Hamid, Sulaiman. (2002). *Lembaga Suaka Dalam Hukum International*. Jakarta; PT. Grafindo Persada
- Hill, David. (2008). "Knowing Indonesia From Afar: Indonesian Exiles and Australian Academics". Paper presented to the 17th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Melbourne 1-3 July 2008.
- Hill, T, David. (2010). "Indonesia's exiled Left as the Cold War thaws", *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, Vol. 44, No. 1.
- Imhoff, Evert van; 2004. "A Demographic History of the Indo-Dutch Population, 1930-2001". *Jurnal of Population Research*, Vol. 21, No.1.
- Kalra, Virinder S. dan Kaur Raminder. (2005). *Diaspora and Hybridity*. UK: Sage Publication.
- Mudzakkir, Amin. (2013) "Hidup di Pengasingan: Eksil Indonesia di Belanda", laporan penelitian P2SDR tahun 2013.
- Nicolaas, Han. (1999). "Family-network migration after asylum migration in the Netherlands, The Netherlands"; CBS Departement of Population ([www.cbs.nl](http://www.cbs.nl))
- Roodenburg, Hans, Rob Euwals dan Harry Terrele. (2004). "Effect og Immigrant on Labour Market and Government Budgets: The Case of Netherlands", *European Review*, Vol 12. No 3.
- Soysal, Yasemin Nuhoğlu. (1994). *Limits of Citizenship: Migrants and Post national Membership in Europe*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Setiawan, Hersri. (2004). "Membangun Kembali Budaya Rekonsiliasi" dalam Budiawan, *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto*. Jakarta: Elsam
- Shuval, Judith T. (2000). *Diaspora Migration: Definitional Ambiguities and a Theoretical Paradigm*. Cowley Road: Blackwell Publisher.
- Siedenburg, Anton W. (2004). "The Facts, Figures and Adjustments of the Dutch Newcomer Integration Act", see in Paper at the Workshop on Integration of Turkish Immigrants in Austria, Holland and Germany.
- Sipayung, Bambang Alfres. (2011). "Exiled Memories: The Collective Memory of Indonesian 1965

Exiles”. Tesis Master, International Institute of Social Studies, The Hague, Belanda.

Vasta, Ellie. (2006). “From Ethnic Minority to Ethnic Majority Policy: Changing Identities and the shift to Assimilationism in the Netherlands”, Working Paper no 26 of Centre on Migration, Policy and Society University of Oxford

# **KUDETA YANG (DIRANCANG) GAGAL DAN KONSOLIDASI REZIM (NEO) ATATURK? HIZMET GULEN, PARALEL STATE, DAN AMBISI TERSELUBUNG ERDOGAN**

## ***COUP D'ETAT THAT (DESIGNED TO) FAIL AND (NEO) ATATURK'S REGIME CONSOLIDATION? HIZMET GULEN, PARALLEL STATE AND ERDOGAN'S HIDDEN AMBITIONS***

**Nuruddin Al Akbar**

Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

*E-mail: nuruddin.alakbar@gmail.com*

Diterima: 11-12-2016

Direvisi: 31-10-2017

Disetujui: 29-11-2017

### ***ABSTRACT***

*This study seeks to undertake critical reading of a number of military coup d'etat attempts that took place in 2016. The failure of the military coup d'etat can be read not as a victory of democracy, but rather as the consolidation effort that is continuously formed by Erdogan's regime to increasingly exert his power in all areas of Turks life. This study rests on official discourse voiced by the Turkish government that states Gulen Hizmet movement plays an important role in the coup d'etat attempt. Unfortunately, Erdogan's regime has acknowledged Gulen steps. Then, he designed a counter-coup operation in such a way in order to, firstly, quell the coup d'etat attempts that occur thus ensuring Erdogan's regime persisted; second, make sure the coup d'etat attempt at certain level is still running so that it can be utilized for the benefit of Erdogan's regime. The research method used in this research is discourse analysis with analytical framework based on Rossa and Nugroho Notosusanto theory about G30S event in Indonesia (which has been modified to read coup attempt in Turkey). The data sources used in this study are based entirely on secondary sources, including international and Turkish media coverage of the course of the coup. Includes various articles written by various experts / analysts about the incident.*

**Keywords:** *Erdogan, Gulen, Paralel State, Coup d'etat, Neo Ataturk*

### **ABSTRAK**

Studi ini berupaya melakukan pembacaan kritis upaya kudeta sejumlah kalangan militer yang berlangsung di tahun 2016. Kegagalan kudeta militer yang terjadi dapat dibaca bukan sebagai kemenangan demokrasi tetapi justru upaya kondolidasi yang terus dibangun rezim Erdogan untuk semakin mencengkramkan kuasanya di semua lini kehidupan masyarakat. Studi ini berpijak pada wacana resmi yang disuarakan oleh pemerintah Turki bahwasanya gerakan Hizmet Gulen memegang peranan penting dalam upaya kudeta. Akan tetapi rezim Erdogan telah membaca langkah Gulen dan merancang operasi kontra kudeta sedemikian rupa untuk: *pertama*, menumpas upaya kudeta yang terjadi sehingga memastikan rezim Erdogan tetap bertahan; *Kedua*, memastikan upaya kudeta dalam level tertentu tetap berjalan sehingga dapat dimanfaatkan sedemikian rupa bagi kepentingan rezim erdogan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana dengan kerangka analisis yang didasarkan pada teori Rossa dan Nugroho Notosusanto mengenai peristiwa G30S di Indonesia (yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk membaca upaya kudeta di Turki). Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini sepenuhnya mendasarkan pada sumber sekunder, baik pemberitaan media internasional dan Turki sendiri mengenai jalannya kudeta tersebut, ditunjang dengan berbagai artikel yang ditulis oleh berbagai analis mengenai kejadian tersebut.

**Kata Kunci:** *Erdogan, Gulen, Paralel State, Kudeta, Neo Ataturk*

## PENDAHULUAN

15 Juli 2016 menjadi saksi lahirnya sebuah pergolakan politik yang mengejutkan di negara Turki. Sebuah upaya kudeta militer kembali terjadi guna menumbangkan rezim Erdogan yang tengah memegang tampuk kekuasaan. Kudeta 15 Juli tersebut mengejutkan banyak pihak karena menghasilkan pemenang baru. Bukan lagi militer –yang selalu menang dalam kudeta di masa lampau- melainkan rezim Erdogan. Bagaimana bisa rezim Erdogan membalikkan keadaan dan justru mempecundangi militer yang berusaha mengkudetanya?

Jika merujuk pada sejumlah dokumen resmi yang dikeluarkan rezim pasca gagalnya kudeta, (Jakarta, 2016, CoupFacts, FETO's Coup Attempt in Turkey A Timeline), maka dapat diambil beberapa intisari penting, diantaranya: (1) Kudeta direncanakan oleh sekelompok/ fraksi dalam militer Turki. (2) Keberadaan oknum/fraksi di tubuh militer yang melancarkan kudeta tidak dapat dilepaskan dari eksistensi *parallel state* (Applebay, *Dueling Narratives: The Gulenist of The Hizmet Movement*, 2015) di dalam tubuh negara Turki.. (3) Otak dari *parallel state* ini ialah Fetullah Gulen. Tokoh agamawan kharismatik yang kini tinggal di AS pasca perseteruannya dengan rezim Erdogan. (4) Kudeta berhasil digagalkan karena kuasa rakyat heroik, kesatuan sikap partai politik –termasuk oposisi-, dan kesetiaan aparat keamanan—termasuk institusi militer—pada pemerintahan Erdogan.

Tentu saja narasi yang disusun rezim menyisakan kecurigaan tersendiri, sejauh mana keakuratannya merekonstruksi realitas. Namun sebagaimana yang disinyalir oleh Lois Fishman (2016) bahwasanya narasi rezim ini sulit untuk tertandingi. Mengingat secara *de facto* media di Turki sudah berada pada kekuasaan rezim (Force, *Diminishing Press Freedom In Turkey*, 2014). Impliksinya, suara lain yang mungkin berguna sebagai pembanding dari narasi resmi rezim sulit untuk muncul di permukaan (Economist, 2016). Sehingga bagi Fishman apa yang terjadi pra, saat, dan paska kudeta cenderung tidak jelas (Louis F, 2016). Dengan kata lain ada “mendung besar” yang menutupi realitas kudeta di negara Turki.

Studi ini merupakan ikhtiar untuk menyibak “mendung besar” yang menutupi realitas kudeta di Turki. Dimana studi ini berkeyakinan bahwasanya kudeta yang terjadi memang dirancang untuk gagal. Studi ini berkeyakinan memang pasukan di tubuh militer yang melakukan aksi merupakan anggota Hizmet. Gulen sendiri minimalnya mengetahui dan mendukung aksi anggota Hizmet tersebut. Namun dengan kecerdikan Erdogan kudeta mampu ditanggung sedemikian rupa sehingga terbentuklah kudeta gagal, yang dapat dipakai sebagai dalih Erdogan untuk semakin memperkokoh kedudukannya di bumi Turki.

## KERANGKA BERPIKIR MEMAHAMI KUDETA TURKI

Sebagaimana misi studi ini yang berupaya merekonstruksi apa yang terjadi di Turki pada 15 Juli 2016. Di mana studi ini berkeyakinan jaringan Gulen bertanggung jawab dalam kudeta gagal tersebut. Hanya saja studi ini berkeyakinan Erdogan memainkan peranan penting merekayasa kudeta yang dilakukan musuhnya tersebut sehingga hasil yang diperoleh justru menjadi sumber kekuatan baru bagi Erdogan dalam menjalankan ambisi politiknya ke depan. Pertanyaan penting yang harus dijawab ialah bagaimana menteorisasikan kudeta yang ditanggung tersebut? Jawaban ini justru muncul dari pembacaan terhadap fenomena kontroversial yang terjadi di Indonesia dan masih menyisakan misteri hingga hari ini, yakni peristiwa 30 September 1965 atau yang sering dinamakan gerakan 30 September (G30S).

Sebelum menerangkan mengenai komparasi 30 September dan kudeta Turki ada baiknya mengklarifikasi satu hal penting: komparasi yang dilakukan terkait dengan rekonstruksi kudeta tidak mesti menyaratkan keserupaan dalam segala hal. Sebagaimana –nanti akan dibahas lebih detail- akademisi John Rossa melihat adanya kemiripan 30 September dengan peristiwa pembakaran Reichstag (Reichstag fire).

Kemiripan di sini dalam konteks peristiwa pembakaran atau G30S akan dijadikan dalih satu kelompok untuk menguatkan kedudukannya di

sebuah negara dan menyingkirkan lawannya yang dianggap bertanggung jawab. Rossa paham bahwa ada beda antara G30S dengan pembakaran Reichstag, di mana tidak ada jejak yang meyakinkan keterlibatan terstruktur pihak komunis dalam pembakaran Reichstag.

Berbeda dengan G30S di mana PKI yang memang memiliki keterlibatan secara struktural dalam derajat tertentu. Begitu pula dengan kasus G30S dan kudeta Turki, tidak menyaratkan adanya keserupaan dalam semua hal. Misal mengenai kondisi pra dan pascakudeta, di mana kondisi ekonomi Indonesia terbilang krisis sedangkan Turki tidak. Ataupun fase pascakudeta di mana di Indonesia terjadi pembantaian massal tetapi di Turki tidak ada informasi mendetail mengenai hal tersebut, hanya penangkapan massal.

Mengenai perbedaan kondisi tersebut penulis akui memang ada, tapi bukannya tanpa kesamaan mendasar. Seperti, kondisi prakudeta juga genting, namun bukan dalam aspek ekonomi namun dalam survivalitas. Siapa mendahului siapa. Sebagaimana di Indonesia kesehatan Soekarno yang tidak menentu membuat pihak PKI ataupun angkatan Darat “berebut waktu” dan strategi untuk memastikan dirinya yang mampu memegang kuasa pasca Bung Karno tidak bisa memimpin Indonesia (Tempo, 2015). Begitu pula dengan Turki, otomatis dengan kekuasaan militer yang melemah dan munculnya sikap keras Erdogan kepada Gulenis hanya ada pilihan “siapa cepat dia dapat”. Dalam hal ini kudeta menjadi opsi paling “nekat”<sup>1</sup> namun juga rasional yang bisa ditempuh Gulenis<sup>2</sup>. Begitu pula keadaan

---

<sup>1</sup> Kenekatan juga diambil PKI dengan memilih Kudeta. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kondisi tidak terduga –Soekarno sakit- membuat PKI merasa khawatir dan memilih opsi melaksanakan G30S untuk memastikan Angkatan Darat anti PKI tumbang. Nuansa nekat ini diakui oleh Hamim –salah satu anggota biro khusus PKI- yang menceritakan bahwa rencana G30S tidak matang karena persiapannya yang cukup pendek. Misal massa PKI belum siap berperang. Tetapi menurut Hamim, pimpinan Biro khusus saat itu –Syam- menyatakan tidak perlu menunggu rakyat siap, cukup menggunakan unsur militer saja (Tempo, Syam Lelaki dengan Lima Alias, 2010)

<sup>2</sup> Kudeta menjadi rasional karena secara formal kelompok Gulen tidak memiliki kekuasaan apa-apa karena kendali AKP di bawah kendali penuh Erdogan. Bahkan mengandalkan Idris Bal dengan partai barunya juga tidak memiliki daya tawar apa-apa. Karena dinyatakan oleh Idris bal sendiri yang akhirnya keluar dari partainya dimana ia merasa ada tekanan kuat pada partai

pascakudeta, ada kesamaan antara Turki dan Indonesia dalam hal pembersihan massal oposisi. Hanya saja kondisi Turki kontemporer sangat sulit menerapkan “brutalitas” dalam skala yang ekstrem seperti pembantaian massal. Di Indonesia sekalipun banyak kalangan oposisi yang tidak dibantai tetapi dipenjarakan –misal di pulau Buru atau kamp plantungan- hingga akhirnya menikmati kebebasan pascajatuhnya Soeharto.

Mengenai peristiwa 30 September di Indonesia, sampai saat ini bermunculan berbagai analisis yang mencoba menguak apa yang sebenarnya terjadi dan siapa dalang di balik peristiwa tragis tersebut. Jika merujuk pada narasi yang diwacanakan negara dengan akademisi terkemukanya Nugroho Notosusanto, ditemukan penjelasan bahwasanya apa yang terjadi sejatinya adalah upaya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Rencananya melalui Gerakan 30 September, mereka membunuh para petinggi angkatan Darat yang dipercaya menghalangi ambisi mereka untuk menguasai Indonesia dan merubahnya menjadi negara komunis. Setelah kesuksesan menangkap dan membunuh para jenderal Angkatan Darat tersebut, PKI mengumumkan kekuasaan mereka atas negara dengan mendemisionerkan kabinet Dwikora yang saat itu resmi memerintah. Sebagai gantinya mereka menyusun format pemerintahan baru di bawah kendali mereka yang dinamai dewan revolusi (Poesponegoro, 2008). Unikny bahkan nama Soekarno, yang saat itu menjabat sebagai presiden juga termasuk yang tersingkir, karena tidak masuk dalam daftar susunan anggota pemerintahan baru pasca demisionernya kabinet dwikora (Djamaluddin, Jenderal TNI Anumerta Basoeki Rachmat Dan Supersemar, 1998). Namun singkat cerita upaya tersebut berhasil digagalkan oleh “kesigapan” militer kontra kudeta di bawah pimpinan Soeharto hingga berujung pada akhir petualangan para pelaku kudeta dan hancurnya PKI secara institusional dari bumi Indonesia (Herlambang, 2013).

---

tersebut sehingga partai eksis hanya tinggal nama saja tanpa fungsi partai yang sebenarnya (Sabah, Gülenist MP İdris Bal Resigns From The Party He Established, 2015)

Poin menarik yang menghubungkan kudeta PKI dan kasus Turki jika merujuk pada narasi yang disusun Notosusanto dan disetujui negara Orde Baru ialah konsepsi mengenai Biro khusus. Mengapa muncul konsep ini? Jawabannya ialah narasi yang disusun oleh Notosusanto berupaya melakukan *counter* terhadap analisis peristiwa 30 September yang dilakukan peneliti asing, yang dikemudian hari lebih dikenal sebagai *Cornell paper*. Menurut analisis Cornell Paper yang disusun oleh Ruth Mc Vey dan Benedict Anderson, peristiwa 30 September merupakan masalah internal angkatan darat. Dimana fraksi muda di bawah komando Untung geram dengan perilaku elit militer di Jakarta yang dianggap “borjuis” sehingga fraksi muda tersebut bertekad untuk “meluruskannya”, untuk mengembalikan marwah Angkatan Darat (Kasdi, 2012).

*Analisis Cornell Paper* tersebut sangat menarik karena secara realitas yang melakukan penculikan jenderal dan petinggi angkatan darat dalam gerakan 30 September dilakukan oleh militer. Termasuk penguasaan para Radio Republik Indonesia (RRI) juga dilakukan oleh militer. Jejak PKI seakan tidak nampak pada peristiwa tersebut. Tentu saja hal ini menegaskan wacana yang terbentuk secara luas pada masyarakat Indonesia bahwa PKI dalang dibalik peristiwa 30 September.

Sebagai *counter* dari *Cornell paper* itulah Notosusanto memasukkan konsep Biro Khusus untuk menunjukkan bahwa meskipun militer yang nampak di permukaan dalam upaya kudeta, namun hakikatnya mereka hanyalah pion catur yang dikendalikan oleh PKI di bawah komando Syam Kamaruzaman sebagai ketua biro khusus PKI (Notosusanto, 2008). Militer dapat dikendalikan sedemikian rupa karena hakikatnya PKI telah membentuk biro khusus yang misi besarnya menyusup ke dalam tubuh “musuh” yakni angkatan darat (Notosusanto, 2008). Biro khusus ini diharapkan makin memperkuat kedudukan PKI dalam perpolitikan Indonesia, tanpa harus menggunakan atribut PKI secara kasat mata.

Analisis Notosusanto yang menjadi narasi resmi negara terkait eksistensi biro khusus tersebut memberikan pencerahan untuk memahami kondisi yang terjadi di Turki. Dalam

kasus kudeta 15 Juli 2016 biro khusus di sana ialah *parallel state* yang dibentuk oleh jaringan Gulen sejak lama untuk menginfiltrasi “musuh”. Dalam kasus *parallel state*, jaringan Gulen tidak hanya menyasar militer saja tetapi berbagai lini pemerintahan yang lain seperti kepolisian dan kehakiman.

Konsep Biro khusus dalam narasi Notosusanto juga membantu dalam memahami “paradoks” kelompok Gulen di Turki. Perlu dipahami bahwa di permukaan, kelompok Gulen terciptakan sebagai gerakan yang apolitis, hanya bergerak dalam bidang sosial serta spiritual (Çelik, 2010, Ziyanak, 2015).

Apolitis di sini bukan berarti menghindari ranah politik sama sekali, karena secara terbuka kelompok Gulenis menyatakan relasinya dengan berbagai politisi dari partai yang berbeda (Site, 2013). Tetapi apolitis dalam artian Gulenis mencitrakan kelompoknya tidak tertarik untuk “mewarnai” ranah politik praktis di Turki agar sesuai dengan ideologi Islam ataupun bermaksud menyerang asas-asas sekularisme Turki.

Dengan menunjukkan jalinan relasi dengan berbagai politisi dari latar belakang yang berbeda Gulenis justru semakin ingin menunjukkan citra apolitisnya, di mana dengan citra pihaknya bersahabat dengan semua kalangan politisi –termasuk dari partai sekuler- membuktikan bahwa Gulenis berposisi netral<sup>3</sup>. Jikalau disebut berpolitik, justru kalangan Gulenis seakan mencitrakan dirinya sebagai sekutu dari prinsip demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia, dengan menyatakan bahwa kelompok Gulen akan berdiri kokoh di belakang partai politik yang memperjuangkan prinsip tersebut (*Publications*, 2015).

Perlu juga ditegaskan dalam kesempatan ini mengenai keterlibatan sejumlah kalangan Gulenis yang bergabung dalam salah satu partai politik yang ada di Turki, semisal Hakan Sukur yang bergaung dengan AKP ataupun Idris Bal

<sup>3</sup> Dalam bahasa Gulen “*We are in equal proximity to all parties. I am not saying equal distance, we are in equal proximity. Because all the followers and sympathizers of every party are our people. People’s parties and people’s political ideas are not barriers to our being friends with them*” (Çelik, The Gülen Movement: Building Social Cohesion Through Dialogue and Education, 2010).

yang mendirikan *Demokratik Gelişim Partisi*/ Democratic Progress Party (DGP). *Pertama*; secara citra dapat dikatakan bahwa masuknya mereka ke arana politik atas inisiatif pribadi, bukan instruksi resmi dari struktur gerakan Gulen yang “apolitis”<sup>4</sup>. *Kedua*, secara terselubung –di balik citra- ini adalah upaya berpolitik praktis pihak Gulen untuk menguasai negara. Penulis tentu sepakat dengan kesimpulan tersebut dalam sisi ini. Dapat dikatakan ini adalah bagian dari strategi besar Gulen untuk memperkuat *paralel state* yang juga didirikan oleh Gulenis.

Tampilan apolitis Gulenis tersebut tidaklah salah dan bukan berarti hanyalah kedok semata. Konsep Biro khusus secara tegas menarik garis antara apa jalur terselubung Gulen dan jalur resmi Gulen. Jalur terselubung ialah *paralel state* yang tujuannya sangat politis, sedangkan jalur resmi sangat potensial memang apolitis dalam derajat tertentu.

Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat dengan ketidakjelasan perbedaan ini semua pihak yang mungkin mengikuti gerakan Gulen yang nampak di permukaan, potensial dituduh terlibat kudeta atau tahu soal kudeta tersebut. Padahal belum tentu semua pihak yang terlibat tahu menahu soal *paralel state* tersebut<sup>5</sup>.

Celakanya ketika mereka yang tidak tahu menahu soal *paralel state* tersebut ikut menjadi korban. Padahal alasan mereka bergabung dengan gerakan Gulen misalnya karena tertarik berkiprah dalam bidang sosial atau mungkin seorang yang haus akan spiritualitas dan mendapati gerakan Gulen menyediakan spiritualitas tersebut. Atau pun

alasan lain yang sangat banyak dan tidak dapat digeneralisir.

Pertanyaan yang kemudian muncul jika menggunakan kerangka analisis yang dibangun oleh Notosusanto dalam memahami kudeta Turki 2016 tentu menyisakan pertanyaan besar. Sebab eksistensi biro khusus justru membuktikan jaringan Gulen sebagai aktor utama. Lalu bagaimana menyatakan Erdogan bisa terlibat berdasarkan skema Notosusanto tersebut? Jawaban terhadap masalah ini diberikan oleh analisis gerakan 30 September yang diberikan oleh seorang akademisi bernama John Rossa.

Analisis Rossa sendiri muncul ditengah serangan hebat kepada narasi yang disusun oleh Notosusanto dan diterima sebagai narasi resmi negara selama Orde Baru. Runtuhnya Orde baru ditambah dengan dibebaskannya tahanan politik yang diduga terlibat peristiwa gerakan 30 September membuat narasi baru bermunculan.

Jika dahulu rezim dihadapkan pada *Cornel paper*; namun sekarang dihadapkan pada variasi narasi yang berbeda dalam merekonstruksi peristiwa 30 September. Namun patut untuk ditegaskan salah satu narasi yang cukup kuat muncul pascareformasi adalah ide bahwa penguasa Orde Baru Soeharto yang dahulu dielu-elukan dalam narasi resmi negara karena mampu menghalau gerakan 30 September beserta “tuannya” yakni PKI ternyata juga “berlumuran darah”. Dalam sejumlah narasi yang ditopang kesaksian tapol (tahanan politik) 65 menguatkan narasi bahwa Soeharto bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa 30 September (Adam, 2009).

Jika ditelusuri secara seksama Rossa menyusun sebuah rekonstruksi sejarah yang cukup unik. Dia berupaya merangkai narasi telah ada selama ini, termasuk narasi rezim untuk membuat sebuah kesimpulan khas Rossa sendiri. Kata kunci untuk memahami rekonstruksi sejarah ala Rossa sebenarnya terletak pada gagasannya tentang kemiripan gerakan 30 September dengan apa yang disebut pembakaran Reichstag (*Reichstag fire*).

Dalam kasus Reichstag yang terjadi pada 27 Februari 1933 menjadi salah satu tonggak penting yang memicu konsolidasi rezim NAZI di Jerman hingga mendapatkan kekuasaan

<sup>4</sup> Idris Bal misalnya menyatakan dirinya tidak pernah “minta restu” pada Gulen saat membentuk partainya. Sebaliknya ia menyatakan bahwa ia justru berkonsultasi pada tokoh-tokoh sipil lainnya sebelum mantap mendirikan partainya. Sebuah sikap yang nampak sekali mencitrakan tidak ada koneksi apapun secara struktural antara partainya dengan Gulen (*News*, 2014, Huriyyet, 2014).

<sup>5</sup> Dalam kasus biro khusus PKI sendiri menurut telaah Djahhari, anggota PKI legal saja banyak yang tidak tahu eksistensi Biro khusus ini. Menurut Djahhari orang yang tergabung dalam biro khusus memang sengaja “dipisahkan” sedemikian rupa dengan struktur PKI. Semisal ada langganan anggota biro khusus datang ke kantor PKI untuk meminta dana dan fasilitas. Anggaran mereka sudah disediakan terpisah. Analisis Djahhari sangat beralasan jika ditinjau dari sisi intelejen. Tentunya jika komunikasi antara biro khusus dan anggota Pki begitu terbuka infiltrasi itu dapat terbongkar dengan cepat (Djahhari, *Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, 2012)

mutlak untuk memerintah Jerman. Pembakaran Reichstag sendiri diduga dilakukan oleh seorang bernama Marinus van der Lubbe yang merupakan anggota partai komunis Jerman (Susan, 2015).

Pembakaran yang dilakukan Lubbe ini dengan segera menjadi dalih bagi partai NAZI di bawah Adolf Hitler untuk memaksa presiden Hindenberg untuk mensahkan undang-undang darurat sebagai upaya menghadapi ancaman Merah di Jerman (Kerr, Germany, 1919, 39, 2003). Segera saja undang-undang tersebut digunakan NAZI untuk menghabisi kaum komunis Jerman. Dengan sirnanya kaum komunis pascapembersihan oleh NAZI, secara otomatis memperkuat kedudukan sang kanselir NAZI, Adolf Hitler (Frank, 2008).

Perlu ditambahkan hingga kini fakta mengenai pembakaran Reichstag masih misterius, dan memicu perdebatan di kalangan sejarawan. Misal menurut seorang sejarawan Tobias yang menyatakan bahwa Lubbe merupakan pelaku tunggal, sebuah analisis yang tentunya berkontradiksi dengan propaganda NAZI tentang ancaman komunis (Beck, *The Fateful Alliance: German Conservatives and Nazis in 1933*, 2010). Namun apa yang sebenarnya terjadi tidaklah penting. Bagi NAZI tertangkapnya Lubbe merupakan hal terpenting sehingga bisa menjadi bahan propaganda rezim untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan menghabisi oposisi. Di mana dalam kasus Jerman ialah komunis.

Menurut Rossa apa yang terjadi dalam kasus pembakaran Reichstag dapat dianalogikan untuk membaca peristiwa 30 September. Rossa sendiri memaparkan beberapa ciri khas pembakaran Reichstag yang dapat digunakan sebagai bekal memahami gerakan 30 September, yakni: (1). Sudah ada keputusan untuk menyerang partai komunis sebagai oposisi NAZI. 2.) propaganda besar NAZI pascaterjadinya pembakaran. (3). Keluarnya undang-undang darurat yang membuka jalan untuk mengeliminir musuh/lawan politik NAZI. 4.) Penangkapan besar-besaran oposisi NAZI dari kalangan komunis oleh rezim. Ciri khas tersebut menurut Rossa juga terdapat dalam kasus 30 September, yakni: (1). Sudah ada keinginan menghabisi komunis sebagai

lawan angkatan Darat yang anti Komunis. (2). propaganda besar tentang gerakan 30 September oleh pihak angkatan Darat (3). Keluarnya restu Sukarno kepada Suharto untuk menindak gerakan 30 September (4). Penangkapan besar-besaran anggota PKI oleh Soeharto (Rossa, 2008).

Ciri khas pembakaran Reichstag yang dinyatakan Rossa di atas jika ditarik secara generik untuk membaca Turki, akan melahirkan beberapa poin yakni: (1). Sudah ada perencanaan untuk menghabisi lawan politik sebelum terjadinya kudeta. (2). propaganda besar rezim pascaterjadinya kudeta dengan menuduh lawan politik sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. (3). Keluarnya undang-undang darurat yang membuka jalan mengeliminir musuh/lawan politik rezim. (4). Pembersihan masal “virus” yang merajalela di berbagai institusi.

Jika merujuk pada analisis Rossa terkait gerakan 30 September, sebenarnya ia berupaya mengembangkan wacana tandingan untuk “membersihkan” atau setidaknya “meminimalisir” dosa PKI. Hal ini nampak dari analisisnya bahwa memang peristiwa 30 September dirancang oleh PKI, dalam artian sejumlah kecil petinginya. Namun yang terjadi saat itu bukan sebagaimana dibayangkan sebagian orang bahwasanya petinggi TNI AD memang diculik namun tidak ada rencana dibunuh. Apalagi disiksa terlebih dahulu. Kesalahan terjadi dalam proses eksekusi kebijakan di mana militer yang bertugas di lapangan malah membunuh Jendral dan petinggi TNI AD yang diincar. Karena sitasi diluar dugaan maka petinggi TNI AD yang tersisa diperintahkan untuk dibunuh pula karena tidak mungkin menghadapkannya pada presiden Soekarno untuk kemudian dicopot dari jabatannya (Rossa, 2008).

Narasi yang menurut Rossa valid ini kemudian dicampuraduk dengan imajinasi ala TNIAD yang akhirnya melahirkan narasi rezim, dimana PKI memang berencana membunuh dan menyiksa jendral, dan kemudian mengambilalih kekuasaan (Rossa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, 2008). Dengan kata lain aspek kedua yakni “propaganda besar tentang gerakan 30 September

oleh pihak angkatan Darat” adalah propaganda campuran berdasarkan realitas dan imajinasi yang direkasaya untuk kepentingan politis sang pembuat propaganda, dalam hal ini Soeharto. Kesimpulannya peristiwa 30 September berhasil ditunggangi sedemikian rupa oleh TNI AD di bawah komando Soeharto sehingga memungkinkan memuluskan ambisinya untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan “secara merangkak” dalam skema konstitusional.

Pembacaan ala Rossa tersebut menjadi penting untuk menerapkannya dalam merekonstruksi aksi kudeta. Di mana memang benar Gulen merencanakan kudeta namun rencana tersebut telah ditunggangi sedemikian rupa sehingga bukannya menghabisi rezim Erdogan, namun justru menggulung Gulen berserta paralel *statenya*. Namun tentunya jika dalam narasi Rossa Soeharto hanya menunggangi dalam hal wacana, tanpa mencampuri jalannya aksi 30 September hal yang berbeda terjadi di Turki.

Upaya kudeta itu sendiri yang ditunggangi sehingga posisinya bagaikan virus yang telah dilemahkan sebagaimana dipergunakan untuk imunisasi. “Virus” Gulenis yang telah “dilemahkan sedemikian rupa” diberi ruang untuk disuntukkan dalam “tubuh” negara Turki. Hasilnya tentu saja bukan “tubuh” negara Turki –di bawah kendali rezim Erdogan- yang terserang penyakit mematikan, tetapi “virus” yang “lemah” tersebut yang justru dipecundangi “antibodi” tubuh. Hasilnya “virus” tersebut lenyap dan “tubuh” negara Turki –di bawah kendali Erdogan- tetap sehat bahkan semakin kuat.

## **KUDETA (YANG DIRANCANG) GAGAL**

Kudeta gagal 2016 tidaklah dapat dilepaskan dari pembacaan relasi masa lalu yang dijalin oleh dua tokoh besar yang saling beroposisi dalam kudeta yakni Erdogan dan Gulen. Jika merujuk pada sejarah Turki akan ditemukan sebuah masa “romantis” di antara kedua tokoh tersebut, namun akhirnya masa “romantis” itu berkahir dan digantikan masa “permusuhan”. Tentu saja puncak dari masa

“permusuhan” itu terjadi pada kudeta Turki, di mana Erdogan dengan keras mengecam Gulen sebagai aktor di balik kudeta berikut jaringan *paralel state nya*, sebaliknya Gulen mengecam balik Erdogan sebagai sandiwara Erdogan untuk menjadikan Turki di bawah kontrol total dirinya.

Perjumpaan Gulen dan Erdogan sebenarnya didasari oleh adanya musuh bersama, yakni negara sekuler warisan Ataturk. Kedua tokoh tersebut memiliki prinsip yang sama yakni tidak senang dengan wajah Turki yang sekuler. Alasannya sangat rasional, jika ditilik dari latar belakang kedua tokoh tersebut sama-sama bermuara pada identitas islam yang kuat. Erdogan diasosiasikan dengan kelompok Milli Gorus sedangkan Gulen dengan kelompok Nurcu (Gunter, 2003).

Sebagaimana ditegaskan sebelumnya, Erdogan diasosiasikan berafiliasi ke kelompok *Milli gorus*. Membicarakan *Milli Gorus* sendiri tidak dapat dipisahkan dari tokoh penting bernama Erbakan. *Milli Gorus* sendiri berakar kuat dari tradisi tariqah sufi Nanqsabandi aliran Khalidi. Tradisi Naqsabandi-Khalidi ini dalam sejarah Turki memiliki sentimen kuat pada politik dan syariah (Center, 2015).

Tentu saja tradisi kuat Naqsabandi-Khalidi ini tercermin dari sejarah kelompok Milli Gorus sendiri sejak dicanangkan secara terbuka oleh Erbakan selalu berupaya berkiprah dalam dunia politik. Tercatat gerakan Milli Gorus terus berupaya menghadirkan partai Islam bahkan sejak tahun 1969 sebagai kendaraannya untuk mentransformasikan Turki sesuai visi Islam ala Milli Gorus.

Partai pertama yang didirikan bernama *Milli Nizam Partisi (National Order Party)*. Namun partai ini harus gulung tikar setelah di tahun 1971 dilarang oleh mahkamah konstitusi Turki (Friedrichs, 2012). Ditutupnya *Milli Nizam Partisi* tidak membuat kelompok Milli Gorus menyerah. Tercatat tahun 1972 didirikan kembali partai Islam bernama *Milli Selamet partisi (National Order Party)* yang bertahan sampai tahun 1980 karena ditutup paska oleh rezim militer (Friedrichs, 2012). Kembali Milli Gorus menampakkan militansinya di tahun 1983 mendirikan *Refah partisi (welfare Party)*

(Friedrichs, 2012). Di masa partai Refah inilah karir politik Erdogan dimulai.

Sebagaimana strategi politik ala Atatürk yang berusaha menjadikan dirinya *Hero* di mata masyarakat untuk memperkuat kedudukan politiknya, saat karir politik Erdogan dimulai ia juga berupaya menjadi “hero” di kalangan masyarakat. Cita-cita untuk membangun citra tersebut mendapatkan jalan ketika ia terpilih menjadi walikota Istanbul. Saat menjabat Erdogan menggunakan prinsip “pro wong cilik”, yang dilakukannya seperti turun langsung membersihkan jalan dengan baru pekerja sama seperti rakyat Istanbul pada umumnya (Basyar H. M., 2015). Erdogan juga membuta berbagai kebijakan “pro wong cilik” selama ia menjabat sebagai walikota (Basyar H. M., 2015). Strategi politik Erdogan tersebut terbilang berhasil, dimana warga seringkali menyatakan “*he’s just like us*” (Basyar H.M, 2002). Sebuah pernyataan yang sangat penting dari sisi politik karena warga menanggapi Erdogan adalah bagian dari dirinya.

Perubahan Politik terjadi ketika partai Rafah yang menaungi karis politiknya kembali menjadi target rezim sekular. Alasannya refah yang muncul sebagai kekuatan besar politik rentan “menyalahgunakan kekuasaan” untuk “membunuh demokrasi” (Wetlesen, 2010). Erdogan sendiri termasuk anggota partai yang ditangkap oleh rezim (Bayat, 2013). Ia ditangkap karena tuduhan menyulut kebencian religius karena membacakan puisi dari Zia Gokkap (Powell, 2016).

Satu pelajaran penting dari penangkapan ini ialah citra sebagai *hero* di mata rakyat saja tidak cukup. Buktinya diri Erdogan dan partainya tetap dapat dilumpuhkan rezim sedemikian rupa. Inilah titik balik Erdogan menyusun strategi politik baru yang menggabungkan antara penciptaan citra positif baik pada rakyat dan rezim sembari menjalin aliansi dengan pihak yang dirasa bisa menjadi kawan seperjuangan dalam memuluskan ambisi Erdogan untuk menguasai Turki dan membentuk sesuai visinya. Disinilah jalinan “harmonis” dengan Gulen dimulai dengan satu tujuan melemahkan rezim sekuler Turki.

Sebagaimana Erdogan, Gulen juga punya sejarah tidak mengenakkan berurusan dengan rezim sekuler Turki. Sejarah pahit Gulensejatiannya ini dapat dilacak dari sejarah panjang eksistensi kelompok Nurcu di Turki. Kelompok Nurcu sendiri dinisbatkan kepada tokoh Sufi kenamaan Turki Said Nursi. Said Nursi sendiri memiliki jejak perseteruan panjang dengan rezim sekuler Turki. Sejak pendirian negara modern oleh Atatürk, Nursi telah dipenjarakan dengan tuduhan ikut sera dalam pemberontakan kaum Kurdi. Setelah dibebaskan ia kembali merasakan jeruji besi ketika menentang kebijakan sekularisasi Atatürk (Basyar M. H., 2015).

Semangat anti sekularisme yang menjadi ruh perjuangan Nursi inilah yang juga merasuk ke dalam diri Gulen, sebagai salah satu fraksi yang berkembang dalam gerakan Nurcu<sup>6</sup>. Sebagai salah satu fraksi Nurcu dengan gerakan Hizmetnya yang diinisiasi pada tahun 70an, Gulen juga mengalami masa-masa pahit menghindari sensor dari rezim yang berkuasa. Sehingga Gulen memilih tiarap hingga masa keterbukaan di tahun 1983 (Djavadi, *The Gulen Movement’s Collision Course With The Turkish State*, 2016). Masa keterbukaan seakan menjadi musim semi bagi gerakan Hizmet, dimana gerakan tersebut berhasil menarik banyak pengikut, termasuk dari kalangan pebisnis. Masuknya kalangan pebisnis ke jaringan Hizmet memungkinkan gerakan tersebut semakin membesar sedemikian rupa (Djavadi, 2016).

Pengalaman buruk di bawah rezim yang memaksa gerakan Gulen harus tiarap tentu membuat Gulen merancang strategi sedemikian rupa agar di masa depan rezim tidak lagi menganggap Gulen sebagai musuh. Namun disisi lain Gulen yang tentunya mewarisi jiwa Nursi juga tidak tinggal diam untuk mengubah keadaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan –meskipun tidak dapat dipastikan- sejak tahun 1983 Gulen mulai merancang strategi *parallel state*. Hal ini dimudahkan dengan tergabungnya makin banyak

---

<sup>6</sup> Dalam situs resmi Gulen, dinyatakan bahwa Gulen pernah menimba ilmu pada salah seorang murid Said Nursi –meskipun tidak disebutkan namanya- dan mengaku begitu terpengaruh pada pemikiran Said Nursi. Bahkan menurut situs resmi tersebut Gulen mengembangkan gerakan Hizmet dengan prinsip-prinsip Said Nursi (Yücel, 2015)

kalangan ke gerakan hizmet, termasuk dari kalangan berpunya.

Bagaimana detail strategi *paralel state* ini berhasil sedemikian rupa hingga menginfiltrasi militer dan jabatan penting negara seperti kehakiman? Setidaknya ada dua strategi besar yang telah diketahui dirancang Gulen. Rancangan besar ini kesemuanya melibatkan dunia pendidikan.

*Pertama*, melalui sekolah yang dimiliki oleh Gulenis. Dengan jaringan sekolahnya yang mencapai ratusan, berbagai alumnus sekolah Gulen dengan mudah memasuki berbagai lini pekerjaan, termasuk jabatan-jabatan publik termasuk instansi militer.

Melalui strategi pendidikan inilah Gulen potensial merekrut banyak kader yang loyal untuk turut bergabung dan membaktikan hidupnya dalam *paralel state* ketika telah menduduki jabatan publiknya (Amsterdam, 2016) Sebagaimana kampus atau institusi pendidikan di negeri ini yang seringkali memanfaatkan jaringan alumnusnya untuk kepentingan institusi maka langkah yang sama amat mudah untuk ditempuh Gulen dengan jaringan pendidikannya<sup>7</sup>.

*Kedua*, sebagaimana dinyatakan oleh peneliti Gulenis Ahmed Zeki Ucok (Kozok, 2016). Ucok sendiri sempat ditangkap rezim Erdogan (saat belum pecah kongsi dengan Gulen) karena hasil penelitiannya yang kontroversial membongkar salah satu rahasia besar *paralel state* Gulen, yakni strategi sistematis dalam upaya pencurian jawaban ujian negara di Turki. Turki sendiri mengenal sistem ujian negara (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi/ÖSYS) yang diperlukan sebagai prasyarat memasuki jenjang pendidikan universitas di negara tersebut.

Dengan adanya pencurian jawaban tersebut, pihak Gulen memanfaatkannya secara baik dengan memberikannya ke kader-kader/kalangan dekat Gulenis yang sedang menempuh pendidikan. Dengan cara itu kader-kader Gulenis

dengan mudah membanjiri universitas kenamaan Turki dan akademi militer dalam waktu singkat dan menyisihkan kalangan non Gulen dengan mudah.

Membanjirinya kalangan Gulen di institusi pendidikan terkemuka memudahkan mereka mendapatkan jabatan yang bergengsi pula –baik di militer atau jabatan publik lain. Menurut Ucok strategi ini sudah dimulai di tahun 80an dan diperkirakan 40.000 orang telah “diuntungkan” dengan strategi tersebut (Kozok, 2016).

Sebagai tambahan, sangat dimungkinkan kalangan yang memegang jabatan penting di militer atau institusi publik juga melakukan praktik kolusi dan nepotisme untuk menambah jumlah kader *paralel state* Gulenis di institusinya masing-masing. Termasuk pula ada kemungkinan anggota *paralel state* mempengaruhi kalangan awam non Gulenis untuk ikut bergabung dengan mereka –tentunya ketika mereka sudah dipercaya- sehingga jumlah anggota *paralel state* lebih banyak dari yang diperkirakan Ucok.

Dengan makin banyaknya pihak yang bergabung dengan Hizmet, tercatat di tahun 1990an gerakan Gulen telah berkembang sedemikian pesat dan dapat disandingkan dengan kekuatan Erbakan dengan partai refahnya. Namun berbeda dengan Refah yang terus terang dengan visi Islamnya. Gulen memilih sikap yang pro rezim sekuler di permukaan. Sikap ini menjadikannya dekat dengan politisi terkemukanya saat itu semisal tansu Ciller (Kramer, A Changing Turkey: The Challenge to Europe and the United States, 2000).

Tentu saja sikap Gulen menghadirkan kritik keras dari sebageian kalangan muslim Turki sebagai seorang pengkhianat (Kramer, A Changing Turkey: The Challenge to Europe and the United States, 2000). Namun sikap ramah tersebut mestilah dibaca sebagai isyarat seorang Gulen, karena meskipun pada satu sisi ia menampilkan sikap “ramah” terhadap rezim, namun pada sisi yang lain Gulen terus mengembangkan *paralel statenya* secara diam-diam guna menguatkan cengkramannya pada negara sekuler. Dalam konteks ini ada benarnya jika ada sebagian kalangan bahwa strategi yang

<sup>7</sup> Namun perlu ditegaskan pula meskipun jaringan alumni ini potensial dimuati politik *paralel statenya* Gulen, namun tidak menegasikan adanya alumnus sekolah Gulen yang tidak terlibat jaringan *paralel state*. Tentunya hanya kader yang dipercaya saja yang akan ditugaskan dalam misi rahasia tersebut. Sehingga tetap tidak ada alasan bagi aparat untuk sewenang-wenang pada alumnus sekolah gulen secara umum.

ditempuh gulen adalah strategi *taqiyah* (Kramer,, 2000).

Meskipun berupaya menampilkan didi sebagai kelompok yang tidak membahayakan rezim namun kenyataannya ketika pemberangusan terhadap partai refah terjadi, kelompok Gulen juga terkena dampaknya. Guna menghindari kemungkinan terburuk, Gulen memilih mengungsi ke AS agar tidak terjangkau rezim. Intuisi Gulen ternyata tepat karena rezim akhirnya membongkar *paralel state* yang dibangun Gulen selama ini. Terbongkarnya jaringan rahasia Gulen bersamaan dengan diemukannya video kaset yang mengindikasikan pendirian *paralel state* oleh Gulen (Tittensor, 2014).

Meksipun rencana rahasianya terbongkar namun tidak menjadi ajal bagi *paralel state* bentukan Gulen. Hal ini dapat terjadi karena anggota *paralel state* memegang teguh taktik ala Gulen sebagaimana disebutkan dalam video kaset yang berhasil disita aparat, dimana para anggota *paralel state* dituntut harus bisa memposisikan diri sedemikian rupa “hingga waktu yang tepat” (Tittensor, 2014).

Dalam kaitannya dengan ambisi Erdogan, eksistensi *paralel state* Gulen tersebut tentunya sangat menarik dari sisi politik untuk membantu Erdogan melangkahhkan kaki menuju tampuk kekuasaan tertinggi di Turki. Pada akhirnya Erdogan mampu membujuk Gulen untuk bekerjasama dengannya dan memebentuk aliansi dua kekuatan besar guna melawan rezim sekuler Turki.

Dikarenakan keterbatasan ruang maka pembahasan mendetail mengenai dinamika koalisi Erdogan dan Gulen tidak akan dibahas. Tapi intisarinya kedua tokoh tersebut berbagi peran masing-masing, dimana Erdogan dan AKP bermain di ranah formal-politik praktis, sementara Gulen bekerja di ranah informal dengan *paralel statenya* untuk mendukung kinerja Erdogan agar tidak kembali bernasib sama layaknya partai islam pendahulunya yang diberangus rezim.

Aliansi Erdogan-Gulen terbukti mampu melemahkan sedemikian rupa rezim sekuler di Turki. Salah satunya dengan membuka tabir dan mempercundangi organisasi rahasia *Ergenekon*

dan operasi *Sledgehammer*. Ergenekon sendiri merujuk pada gerakan bawah tanah (klandestein) yang berideologi ultra nasionalis. Pengikut gerakan ini mengaku sebagai pembela sekularisme dan kedaulatan nasional. Mereka beranggapan bahwa sebagai pembela sekularisme dan kedaulatan nasional mereka berhak meyingkirkan pemerintahan yang dianggapnya menyimpang, sekalipun pemerintahan itu dipilih secara demokratis (Koc, 2012).

Dengan keanggotan Ergenekon yang juga berasal dari kalangan militer dan aparat keamanan tentunya semakin menambah kekuatan dari organisasi tersebut (Elver, 2012). Ergenekon sendiri mempunyai misi menyulut berbagai aksi kekerasan di Turki, seperti pembunuhan dan serangan terhadap institusi publik. Tujuannya agar menjadikan situasi *chaos*. Tentunya dengan kondisi semacam ini menurut bayangan Ergenekon akan membuka jalan militer untuk mengambil alih pemerintahan (Elver, 2012).

Senada dengan Ergenekon, Sledgehammer juga terkait dengan kaum sekuler. Bedanya Sledgehammer adalah nama bagi operasi kudeta yang sekiranya akan dilancarkan oleh fraksi militer Turki yang setia pada prinsip sekularisme untuk menggulingkan rezim AKP. Terungkapnya operasi Sledgehammer sendiri ketika dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah komputer milik salah satu kolonel Turki. Tentu saja kolonel tersebut merupakan jaringan Sledgehammer. Dari komputer tersebut didapatkan berbagai nama tokoh militer top, politisi, hingga insan media (Howard, 2016).

Arti penting pengungkapan kedua kasus diatas merupakan kemenangan besar bagi aliansi Gulen-Erdogan. Mereka berhasil membalikkan keadaan dimana sebelumnya kalangan Islam yang dihabisi, namun dengan persekutuan mereka jaringan sekuler berhasil dinetralisir sebelum menjalankan aksinya. Arti penting lain dari kasus tersebut termanifestasi dalam dua hal: (1). menjadi dalih untuk menyingkirkan oposisi pemerintahan Erdogan, khususnya di kalangan kaum sekular dan memperkuat cengkraman rezim Erdogan. Manuver ini nampak jelas ketika skandal Sledgehammer terbongkar, Pemerintah Erdogan segera mengintervensi internal militer

turki, semisal dalam hal transfer dan promosi anggota militer (paker, 2013). (2). Menciptakan citra positif bagi rezim Erdogan dimana mereka adalah korban dari permufakatan jahat sekuler yang “antidemokrasi”.

Sukses melemahkan rezim sekuler sebenarnya merupakan pertanda alamiah bahwa jalinan aliansi Erdogan-Gulen diujung tanduk. Sebab sebagaimana kasus Ataturk, adanya tokoh yang sama-sama kuat berpotensi menciptakan pemerintahan dualistis. Hal ini tentunya bertentangan dengan ide Ataturk tentang kuasa penuh di tangan seorang kuat yang dengannya ia dapat menginjeksikan visi besarnya ke dalam masyarakat Turki. Erdogan yang notabene merupakan Ataturk kedua tentunya menyadari hal ini, dan menganggap Gulen sebagai ancaman berikutnya yang harus diseingkirkan pasca melemahnya kaum sekuler. Disinilah kudeta (yang dirancang) gagal menjadi panggung utama untuk menghabisi Gulen dan sekutunya yang merupakan kawan lamanya.

Sebelum meletusnya kudeta, pertentangan dua tokoh tersebut sudah begitu nyata dan berupaya mengeliminasi atau setidaknya melemahkan satu sama lain. Erdogan berupaya melemahkan Gulen dengan upaya menutup Dershane. Institusi tutor yang kebanyakannya di Turki adalah milik jaringan Hizmet Gulen (Balci, 2014).

Penutupan tersebut tentunya diharapkan memutus pendanaan dan sumber rekrutmen anggota yang terus mengalir ke jaringan Gulen. Gulen sendiri dengan bantuan *parallel statenya* di kehakiman dan aparat keamanan membuka skandal korupsi di tubuh AKP. Termasuk di kalangan orang dekat Erdogan seperti anak laki-laki dan ketiga menteri (Balci, 2014).

Perseteruan tersebut sangat jelas membuktikan bahwa opsi kudeta merupakan salah satu pilihan rasional yang dapat ditempuh Gulen untuk mengakhiri rezim Erdogan yang berupaya menghancurkan gerakan Hizmet dan *parallel statenya*. Opsi tersebut masuk akal, sebab sebagaimana analisis Sitaresmi Soekanto bahwa upaya *blow up* kasus korupsi di tubuh AKP sejatinya adalah bentuk upaya kudeta juga, yakni

mendorong terjadinya kudeta sipil (Soekanto S. S., 2016).

Terkait dengan upaya kudeta yang dimotori gerakan Gulen sendiri beserta bukti yang mengarah kepada tesis bahwa kudeta ditunggangi sedemikian rupa setidaknya dapat dipilah berdasarkan kronologi waktu, yakni pra kudeta, saat kudeta, dan pasca kudeta.

Fase Pertama, pra kudeta. Pada fase ini setidaknya ada 3 bukti yang mengarah kepada Gulenis sebagai otak dibalik kudeta namun disisi lain meegaskan upaya menunggangi oleh rezim:

(1). Perceraian mendadak sekitar 3000 anggota Militer turki pro gulen sebelum terjadinya kudeta. Perceraian tersebut dilakukan berdasarkan fatwa dari Gulen (Soekanto S. S., 2016). Menurut Soekanto kasus perceraian tersebut merupakan dalil tidak terbantahkan bahwa Gulen merupakan otak di balik kudeta. Para tentara pengikut Gulen tersebut diharuskan menceraikan istrinya agar jika terjadi apa-apa pada diri mereka saat menjalankan tugas maka keluarga dan aset mereka tidak terusik (Soekanto S. S., 2016).

Analisis dan bukti yang diberikan oleh Soekanto tersebut sangat menarik karena menegaskan Gulen dan kelompok *parallel statenya* di balik kudeta Turki. Namun permasalahannya muncul ketika perceraian itu sama sekali tidak terendus oleh rezim. Tentu sangat mustahil jika ada keanehan cerai masal secara tiba-tiba, terlebih di kalangan militer. Sebab perceraian secara sah semestinya membutuhkan persyaratan legal formal tertentu.

Fakta bahwa perceraian massal tersebut berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun sejatinya menyiratkan potensi besar negara –khususnya intelejen- dan institusi militer harusnya sudah mendeteksi keanehan tersebut dan melacakinya dengan seksama. Kecuali memang ketiadaan tindakan dari pemerintah merupakan hal yang disengaja, yakni untuk membuka ruang terjadinya kudeta berdarah yang meletus pada 15 Juli. Jika hal itu yang terjadi tentunya pemerintah telah memikirkan strategi khusus untuk “menyambut” aksi kudeta tersebut dengan “kado” spesial bagi para pengkudeta.

(2). Daftar nama pejabat militer yang akan disingkirkan oleh Erdogan di bulan Agustus. Zeynep Gambetti menyebutkan hal ini dalam analisisnya, dimana dengan adanya dugaan telah tersebar bocoran daftar nama pejabat militer yang akan disingkirkan tentunya memberikan rasa ketakutan tersendiri di tubuh *paralel state* Gulen dalam struktur militer. Mereka yang takut akan mendekam dipenjara akan mengambil langkah preventif untuk menyelamatkan diri (Gambetti, 2016). Hal ini tentunya merujuk pada upaya mendahului penyingkiran oleh rezim dengan kudeta pada bulan Juli.

Analisa Gambetti ini juga didukung oleh Suraj Sharma. Bahkan Sharma menukil adanya kepercayaan pada banyak pengamat, termasuk menukil Ibrahim Kiras, yang menjabat sebagai editor Koran Karar, yang merupakan sayap liberal dari AKP (Sharma, 2016). Sebagaimana kasus perceraian massal, bocornya daftar nama pejabat militer yang akan disingkirkan ini apakah murni dari intelejensi di kalangan *paralel state* gulen ataukah rezim yang sengaja membocorkannya?

Kedua kemungkinan tersebut sah, namun jika memandang bocornya daftar ini satu rangkaian dengan keanehan “pembiaran” kejadian aneh cerai massal nampak bahwa rezim sendiri yang membocorkan daftar ini lebih kuat. Tujuannya memicu kepanikan di kalangan militer Gulenis dan melancarkan kudeta. Kudeta itulah yang nantinya sudah siap diambil oleh rezim, sehingga yang terjadi sebagaimana istilah Sharma yakni *suicidal attack* (serangan bunuh diri). Pasukan gulen terbunuh akibat kepanikan mereka sendiri sehingga masuk perangkap.

(3). Bocoran Wikileaks. Menurut Andy Greenberg Wikileaks mendapatkan ribuan dokumen tentang AKP dan Erdogan sekitar seminggu sebelum kudeta (Greenberg, 2016). Bocoran dokumen itu tentunya mengundang kecurigaan tersendiri, terkait siapa pihak yang membocorkannya kepada Wikileaks.

Jika merujuk pada sejarah masa lalu dimana jaringan *paralel state* Gulen mampu mengungkap skandal korupsi Erdogan yang mem *blow up* nya ke masyarakat, sangat dimungkinkan sumber data wikileaks tersebut berasal dari sana. Namun apa fungsi data tersebut dikirimkan ke

wikileaks? Paling tidak ada dua fungsi yang dapat dipetik oleh kalangan Gulenis.

Jika kudeta berhasil maka publikasi Wikileaks akan menjadi pembenaran tersendiri bagi aksi kudeta, dimana militer pro Gulen dapat berkilah pihaknya melakukan tindakan yang tepat untuk mengukudeta rezim yang tidak bersih. Namun jika gagal, maka setidaknya data “aib” AKP dan Erdogan telah tersimpan di arsip wikileaks dan dapat dibuka sewaktu-waktu oleh wikileaks yang dikenal “garang” dengan rezim manapun sehingga setidaknya kembali mencoreng citra Erdogan dan AKP di mata rakyat.

Jika tesis ini dipakai maka semakin menguatkan tuduhan bahwa Gulenis di balik aksi kudeta Turki. Namun ada juga kemungkinan kedua, di mana pihak Erdogan sendiri yang membocorkan dokumen “aib” tersebut. Ini juga adalah tindakan “nekad” yang ditempuh kubu Erdogan. Taruhannya dengan bocoran tersebut akan semakin menguatkan tekad kubu Gulenis untuk memberontak, karena merasa ada pijakan yang dapat mereka gunakan.

Tindakan inilah yang ditunggu-tunggu pihak Erdogan untuk kemudian menghabisi mereka. Namun jika gagal, alias pemberontak tidak terpancing maka dengan mudah Erdogan akan memblokir akses pada Wikileaks sehingga sulit diakses oleh masyarakat Turki. Pilihan ini berisiko karena kalangan yang mengerti dunia komputer bisa menembus blokir rezim, tetapi perlu diingat rezim punya kuasa legal untuk menghukum pihak yang menyebarkan berita tersebut di dalam negeri. Sehingga secara hitung-hitungan politis tidak merugikan rezim Erdogan secara serius jika diambil pilihan tersebut.

Jika mencermati strategi gerak cepat rezim Erdogan menutup Wikileaks tidak lama berselang pasca kudeta terjadi, bersamaan pula dengan rilis resmi dokumen AKP dan Erdogan oleh Wikileaks (Shaheen, 2016), nampaknya hipotesis kedua –bahwa kubu Erdogan sendiri yang membocorkan- lebih kuat.

Paska mencermati fase pra kudeta -di mana hipotesis yang diangkat adalah militer dan kubu pro Erdogan sudah siap dengan aksi kudeta Gulenis- maka pembahasan dilanjutkan kepada

fase Kedua, yakni saat kudeta. Dalam kudeta satu hal yang tidak boleh luput ialah melumpuhkan elit-elit lama sehingga situasi transisi kekuasaan akan berjalan dengan lancar. Dalam hal ini tertangkap/tewasnya Erdogan dan Bilal Yildirim yang merupakan pimpinan AKP dan negara Turki merupakan kemestian jika ingin kudeta sukses. Jika “kepala” elit lama ini sirna maka dengan mudah militer Gulenis mengklaim kemenangan dalam kudeta. Ternyata tidak tanggung-tanggung pemberontak berupaya melenyapkan mereka selamanya –alias dibunuh-.

Uniknya rencana pembunuhan dua pemimpin Turki ini gagal secara mengejutkan. Erdogan berhasil lolos dari maut dengan cara tidak lazim. Hanya dalam hitungan menit hotel yang dia diami selama liburan diserang oleh pengkudeta. Erdogan sendiri dengan tegas menyatakan jika 10-15 menit saya masih di sana mungkin saya tidak akan selamat (Sales, 2016).

Hal yang sama juga terjadi pada diri perdana menteri Binali Yıldırım. Pasukan kudeta sebenarnya telah melancarkan serangan tepat pada kantornya di parlemen Turki. Akan tetapi uniknya sang perdana menteri ternyata sedang berlibur sehingga secara “ajaib” lolos dari serangan (Linning, 2016).

Lolosnya dua pimpinan penting Turki, terlebih Erdogan di saat-saat kritis ini sejatinya dapat ditafsirkan dua hal. Mereka benar-benar orang yang beruntung -meminjam istilah Erdogan “hadiah Tuhan”-, atau mereka sudah menyadari adanya kudeta sehingga dapat meloloskan diri dengan aman.

Berdasarkan bukti yang ada nampaknya hipotesa kedua lebih kuat, dimana jika merujuk pada fakta bahwa Hakan Fidan –kepala intelejen Turki- terbukti sudah memberitahu jenderal Hulusi Akar satu jam sebelum kudeta dimulai (*News, Turkish Intel Informed Top Generals Hours Before Coup Attempt, Says Army, 2016*), tentunya bukan hal yang mustahil jika Erdogan dan Yildirim juga diberitahu akan hal ini. Tetapi dalam berbagai kesempatan terbuka Erdogan menyangkal dirinya telah mendapatkan informasi dari Hakan Fidan tetapi dari iparnya yang bernama Ziya Ilgen. Itupun ditambah dengan pengakuan Erdogan yang tidak mempercayai

berita Ilgen (*News, No Change In Top Army, Intel Seats After Failed Coup Attempt: Erdoğan, 2016*). Bahkan Erdogan sendiri sempat mengaku tidak bisa menghubungi Hakan Fidan untuk mengkonfirmasi berita tersebut (*Jazeera, 2016*). Akan tetapi lucunya dalam kesempatan yang lain ia mengaku dapat menghubungi Hakan Fidan untuk merencanakan rencana pelariannya dengan selamat dari tempat berlibur ke Istanbul. Meskipun tetap menyangkal mendapat informasi kudeta pertama kali dari Hakan Fidan (*News, Erdoğan Says He Learned Of Coup Attempt From His Brother-In-Law, 2016*).

Dari dua pernyataan yang berbeda ini saja kita sudah dapat menemukan kejanggalan yang signifikan. Bagaimana sang ipar bisa lebih mengetahui kudeta daripada intelejen Turki? Dalam sebuah kesempatan sang ipar menolak untuk bersaksi lebih lanjut dalam komisi yang dibentuk oleh parlemen Turki untuk menginvestigasi kasus kudeta yang gagal. Dia hanya menyatakan melihat adanya tank di jalan (*Minute, 2016*). Jika yang dikatakan ipar benar dan Erdogan tidak percaya bagaimana mungkin ia tiba-tiba merencanakan pelarian dari hotel dengan sigap sehingga lolos dari menit-menit yang menentukan hidupnya tersebut? Jika Fidan adalah saksi kunci dari selamatnya sang presiden mengapa ia tidak mau bersaksi di parlemen.

Uniknya lagi sang pimpinan MIT Hakan Fidan juga tidak diizinkan bersaksi seputar kudeta tersebut oleh AKP –partai pemerintah- (*Minute, 2016*). Lebih jauh jika benar apa yang dikatakan Erdogan bahwa ia kesulitan menghubungi Fidan dalam situasi darurat tersebut seharusnya Fidan dikenakan hukuman yang berat. Apalagi Fidan hanya mengabari Hulusi Akar –pimpinan militer- dan bukannya Erdogan. Akan tetapi ternyata Erdogan tidak menghukum Fidan, hanya sekedar “mencelanya” saja dan tetap mempertahankan posisinya (*News, No Change In Top Army, Intel Seats After Failed Coup Attempt: Erdoğan, 2016*). Sebuah pilihan yang sangat aneh mengingat begitu gembangnya rezim Erdogan menangkap dan memecat berbagai kalangan pasca kudeta yang dituduh terlibat Gulenis.

Hipotesis yang masuk akal disini ialah Erdogan sudah mengetahui rencana kudeta sejak lama. Informasi dari iparnya –jika benar itu pertama kali masuk- bukan informasi mengenai Tank tetapi kode bahwa rencana sudah jalan dan pemberontak sudah masuk perangkap besar rezim Erdogan. Tank di jalan adalah kode dimulainya rencana kudeta kelompok Gulenis dan kode bagi Erdogan untuk bersiap-siap meninggalkan tempat liburannya. Pembicaraan dengan Fidan –jika dianggap sebagai pembicaraan kedua- ialah pembicaraan mengenai kesiapan penerbangannya ke Istanbul dan tentunya konfirmasi mengenai kesiapan kounter kudeta yang dirancang pihaknya.

Sebuah pertanyaan muncul mengapa Hakan Fidan harus memberitahu Hulusi Akar secara terbuka? Hal ini menjadi penting sebab Hulusi Akar tidak termasuk klik dalam Erdogan yang memahani rencana kudeta, bahkan posisinya di militer tergolong bukan loyalis Erdogan. Dengan pemberitaan informasi seputar kudeta kepada Akar diharapkan akan meembuat dirinya berubah haluan dan mendukung rezim Erdogan serta memusuhi Gulen. Harapan itu tercapai ketika pasukan pemberontak menahan Akar dan memaksanya untuk berbai'at (sumpah setia) kepada Gulen untuk mendukung kudeta (Sabah, Chief Of Staff Akar Confirms In Testimony Putschists Wanted Him To Speak To Gulen, 2016).

Dengan kata lain Akar adalah “saksi kunci” yang dimanfaatkan Erdogan untuk *memback up* narasi dirinya bahwa Gulen benar-benar melakukan pemberontakan. Posisinya yang netral tentunya membuat kesaksian Akar bahwa Gulen di balik kudeta menjadi pemicu rakyat mendukung serangan balik pemerintah Erdogan pada Gulen.

Perlu ditambahkan selain Erdogan, perdana menteri Yildirim sebagai tangan kanan Erdogan tentu sudah mengantisipasi kudeta dari informasi sebelumnya, sehingga ia memilih cuti. Tentunya ia tidak akan berperan sebagai “hero” layaknya Erdogan yang bagai film laga, dapat lolos dari maut hanya dalam hitungan menit.

Akan tetapi satu hal yang menarik dari penyerangan pemberontak ke parlemen –tempat

kerja Yildirim- membuahkan hasil yang semakin diharapkan oleh rezim Erdogan. Militer kudeta gagal membunuh Yildirim itu satu kegagalan, namun kegagalan yang lebih besar ialah justru dengan serangan ke parlemen terkesan militer ingin menghabisi anggota parlemens secara pandang bulu. Segera saja oposisi memilih berdiri di belakang rezim Erdogan dan tidak memihak militer (Sabah, Turkey's Opposition Parties Take Unified Stance Against Coup Attempt, 2016). Realitas politik ini semakin menguntungkan Erdogan, namun sebaliknya semakin memperlemah posisi pemberontak.

Terkahir pembahasan faseketiga, yakni pasca kudeta. Terkait fase ini ada satu hal yang mengindikasikan bahwa kudeta Turki memang kudeta yang telah ditunggangi, yakni pembersihan “virus” yang dicanangkan oleh Erdogan. Adalah Johannes Hahn, komisioner Eropa yang merasa janggal dengan upaya pembersihan tersebut. Tepatnya pada satu hari pasca kudeta pemerintah Turki telah menangkap lebih dari 3000 tersangka, yang terdiri dari elit militer hingga prajurit. Termasuk pula pemerintah menangkap banyak hakim dan jaksa (Osborne, Turkey Coup Attempt: Government Had List Of Arrests Prepared Before Rebellion, EU Commissioner Says, 2016).

Pertanyaan Hahn sangat masuk akal. Bagaimana mungkin dalam waktu singkat terdeteksi pihak yang terlibat dalam jumlah yang sangat besar, apalagi di luar tubuh militer. Karena aksi yang terjadi pada malam kudeta sama sekali tidak melibatkan atau adanya indikasi pihak non militer. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Erdogan paham akan terjadinya kudeta, dan paham bahwa kudeta tersebut telah direkayasa sehingga tidak akan menyebabkan kerusakan berarti. Ketika aksi tersebut usai, daftar nama orang-orang yang dianggap musuh negara –bisa jadi di luar anggota hizmet pula- segera ditangkap. Jikalau pemerintah Turki tetap menyangkal, maka pilihannya hanya satu yang masuk akal, bahwa penangkapan dilaksanakan secara tidak terencana alias “ngawur”. Siapa saja tanpa alasan yang jelas bisa ditangkap. Jika opsi ini yang dipilih, tentu menjadi sebuah aib yang besar bagaimana Erdogan sang pemimpin

“pro rakyat” seenaknya menangkap rakyatnya tanpa alasan.

## PENUTUP

Akankah kudeta gagal 2016 disusul dengan pembersihan “virus” yang sampai saat ini dilakukan Erogan merupakan akhir dari “kegaduhan” politik di Turki? Jawabannya tidak sebab Erdogan belum menguasai sepenuhnya negara Turki. Memang benar kaum sekular sudah melemah, dan saat ini kaum Gulenis Hizmet sedang “dihabisi”, termasuk pula kemungkinan oposisi lain yang tidak terkiat Gulen dapat disingkirkan dengan tuduhan jaringan FETO.

Satu kekuatan yang masih layak diperhitungkan adalah Kurdi, yang hingga kini menjadi duri dalam daging bagi setiap rezim yang memerintah di Turki sejak masa Ataturk. Terlebih lagi dengan perkembangan kondisi Suriah yang memungkinkan kaum Kurdi mendapatkan tambahan kekuatan dari kaum Kurdi Suriah yang notabene memiliki persenjataan kuat pemberian AS sebagai bagian dari aliansi melawan ISIS.

Tidak hanya Kurdi, sejauh mana Erogan tidak mengulangi kesalahan pendahulunya rezim militer yang faktanya tidak bisa menghapus *parallel state* sampai tuntas? Apakah mereka dapat bangkit dengan kekuatan baru, misal bersekutu dengan kalangan sekuler untuk membentuk neo Ergenekon atau neo Sledgehammer? Tentu hal ini meskipun kecil kemungkinannya dalam waktu dekat, namun bukan berarti tidak mungkin sama sekali. Sehingga sulit untuk mengatakan “kegaduhan” politik sebagai bagian dari upaya konsolidasi rezim neo Ataturk akan berakhir dengan kudeta gagal tersebut. Sangat mungkin berbagai turbulensi lain dapat terjadi, tentunya sejauh mana rezim Erdogan mampu mengantisipasinya.

## PUSTAKA ACUAN

*A Changing Turkey: The Challenge to Europe and the United States* 2000 Washington D.C. Brookings Institution Press

Adam, A. W. (2009). *Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku Dan Peristiwa*. Jakarta: Kompas.

Amsterdam, R. R. (2016). *Why should Turkish cleric Fethullah Gülen operate charter schools on U.S. Military bases?* Retrieved from <http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/274675-why-should-turkish-cleric-fethullah-gulen-operate-charter>

*ANALYSIS: Turkey Watches Death Throes Of A Faction Facing Its End* 2016

Applebay, R. S. (2015). *Dueling Narratives: The Gulenist of The Hizmet Movement*. In M. E. Marty (Ed.), *Hizmet Means Service: Perspectives on an Alternative Path Within Islam*. Oakland: California University Press.

B, J. (2002). *Islamist Mobilization in Turkey: A Study in Vernacular Politics*. Washington D.C.: University of Washington Press.

Balci, B. (2014). *What Are the Consequences of the Split Between Erdogan and Gülen on Turkey's Foreign Policy?* Retrieved from <http://www.foreignpolicyjournal.com/2014/01/17/what-are-the-consequences-of-the-split-between-erdogan-and-gulen-on-turkeys-foreign-policy/>

Basyar, H. M. (2015). *Demokrasi dan Fundamentalisme Islam di Turki*. In I. Kartini (Ed.), *Demokrasi Dan Fundamentalisme Agama*. Yogyakarta: CV Andi & P2P LIPI.

Basyar, M. H. (2015). *Pertarungan dalam Berdemokrasi Politik di Mesri, Turki, dan Israel*. Jakarta: UI Press.

Bayat, A. (2013). *Post-Islamism: The Many Faces of Political Islam*. Oxford: Oxford University Press.

Beck, H. (2010). *The Fateful Alliance: German Conservatives and Nazis in 1933*. New York: Berghahn Books.

*Blown Apart By Bombs: Rubble And Debris Fill The Corridors Of Turkey's Parliament Building After It Was Blasted In Coup Attack That Left The Prime Minister's Office In Ruin* 2016

Çelik, G. (2010). *The Gülen Movement: Building Social Cohesion Through Dialogue and Education*. Delft: Eburon.

Center, B. P. (2015). *Turkey Transformed: The Origins and Evolution of Authoritarianism and Islamization Under the AKP*. Washington D.C.: Bipartisan Polity Center.

*Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* 2008 Jakarta Hasta Mitra & Institut Sejarah Sosial Indonesia

2015 Demokrasi dan Fundamentalisme Islam di Turki Yogyakarta CV Andi & P2P LIPI

Djamaluddin, D. (1998). *Jenderal TNI Anumerta Basoeki Rachmat Dan Supersemar*. Jakarta: Grasindo.

- Djamhari, S. A. (2012). Demokrasi Terpimpin 1959-1965. In T. S. Abdullah (Ed.), *Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis nasional Bagian I: Rekonstruksi dalam Perdebatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Djavadi, A. (2016). *The Gulen Movement's Collision Course With The Turkish State*. Retrieved from <http://www.rferl.org/a/turkey-gulen-erdogan-collision-course/27877830.html>
- Economist, T. (2016). *Most Turks Believe A Secretive Muslim Sect Was Behind The Failed Coup*. Retrieved from <http://www.economist.com/news/europe/21703186-president-erdogan-blames-gulenists-putsch-and-has-launched-massive-purges-most-turks?zid=307&ah=5e80419d1bc9821ebe173f4f0f060a07>
- Elver, H. (2012). *The Headscarf Controversy: Secularism and Freedom of Religion*. Oxford: Oxford University Press.
- Force, T. T. (2014). *Diminishing Press Freedom In Turkey*. Washington D.C.: Rethink Institute.
- Frank, M. J. (2008). *The Holocaust*. New York: Palgrave Macmillan.
- Friedrichs, J. J. (2012). Turkish Islamic Organization: A Comparative Study in Germany, The Netherland, and Turkey. In J. & Cloke (Ed.), *Faith-based Organisations and Exclusion in European Cities*. Bristol: Polity Press.
- Ganbetti, Z. (2016). *Failed Coup Attempt In Turkey: The Victory Of Democracy?* . Retrieved from <https://www.opendemocracy.net/zeynep-gambetti/failed-coup-attempt-in-turkey-victory-of-democracy>
- Gunter, M. M. (2003). *The A to Z of the Kurds*. Lanham: Scarecrow Press.
- Herlambang, W. (2013). *Kekerasan Budaya Pasca 1965*. Serpong: Marjin Kiri.
- Howard, D. A. (2016). *The History of Turkey (2nd Edition)*. California: ABC CLIO.
- Jazeera, A. (2016). *Erdogan: Turkish Democracy Is Not Under Threat*. Retrieved from Al Jazeera: <http://www.aljazeera.com/news/2016/07/erdogan-turkish-democracy-threat-160720200310739.html>
- Kasdi, A. &. (2012). PKI di Balik Gerakan 30 September 1965. In T. S. Abdullah (Ed.), *Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis nasional Bagian I: Rekonstruksi dalam Perdebatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kerr, J. (2003). *Germany, 1919-39*. Oxford: Heinemann.
- Koc, D. (2012). *Strategic Defamation of Fethullah Gülen: English Vs. Turkish*. Lanham: University Press of America.
- Kozok, F. (2016). *Gulen Infiltrated Turkey's Military for Decades, Uçok Says*. Retrieved from Bloomberg: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-02/gulen-infiltrated-turkey-military-for-decades-prosecutor-says>
- Kramer, H. (2000). *A Changing Turkey: The Challenge to Europe and the United States*. Washington D.C.: Brookings Institution Press.
- Louis, F. (2016). *Why We'll Never Get a Full Accounting of Turkey's Failed Coup*. Retrieved from <http://www.haaretz.com/middle-east-news/turkey/.premium-1.731539>
- Minute, T. (2016). *Erdogan's brother-in-law excused from testifying to commission*. Retrieved from Turkish Minute: <https://www.turkishminute.com/2016/10/27/erdogans-brother-law-excused-testifying-commission/>
- News, D. (2016). *Erdogan Says He Learned Of Coup Attempt From His Brother-In-Law*. Retrieved from Daily News: <http://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-says-he-learned-of-coup-attempt-from-his-brother-in-law.aspx?pageID=238&NID=101898&NewsCatID=338>
- News, D. (2016). *No Change In Top Army, Intel Seats After Failed Coup Attempt: Erdogan*. Retrieved from Daily News: <http://www.hurriyetdailynews.com/no-change-in-top-army-intel-seats-after-failed-coup-attempt-erdogan-.aspx?pageID=238&NID=102019&NewsCatID=341>
- News, D. (2016). *Turkish Intel Informed Top Generals Hours Before Coup Attempt, Says Army*. Retrieved from Daily News: <http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-intel-informed-top-generals-hours-before-coup-attempt-says-army.aspx?pageID=238&NID=101805&NewsCatID=341>
- Osborne, S. (2016). *Turkey Coup Attempt: Government Had List Of Arrests Prepared Before Rebellion, EU Commissioner Says*. Retrieved from <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-coup-attempt-erdogan-government-arrests-military-uprising-eu-commissioner-a7142426.html>
- paker, I. A. (2013). Beyond Military Tutelage? Turkish Military Politics and the AKP government. In E. Canan-Sokullu (Ed.), *Debating Security in Turkey: Challenges and Changes in the Twenty-First Century*. Plymouth: Lexington Books.
- Poesponegoro, M. D. (2008). *Sejarah nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Powell, R. (2016). *Shari'ah in the Secular State: Evolving Meanings of Islamic Jurisprudence in Turkey*. Abingdon: Routledge.

- Publications, I. B. (2015). *Recent Economic and Political Developments Yearbook (Volume 1)*. Washington, D.C.: International Business Publications.
- Rossa, J. (2008). *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Hasta Mitra & Institut Sejarah Sosial Indonesia.
- Sabah, D. (2016). *Chief Of Staff Akar Confirms In Testimony Putschists Wanted Him To Speak To Gülen*. Retrieved from Daily Sabah: <https://www.dailysabah.com/investigations/2016/07/25/chief-of-staff-akar-confirms-in-testimony-putschists-wanted-him-to-speak-to-gulen>
- Sabah, D. (2015). *Gülenist MP İdris Bal Resigns From The Party He Established*. Retrieved from <https://www.dailysabah.com/politics/2015/03/31/gulenist-mp-idris-bal-resigns-from-the-party-he-established>
- Sabah, D. (2016). *Turkey's Opposition Parties Take Unified Stance Against Coup Attempt*. Retrieved from Daily Sabah: <https://www.dailysabah.com/politics/2016/07/16/turkeys-opposition-parties-take-unified-stance-against-coup-attempt>
- Sejarah nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia* 2008 Jakarta PT Balai Pustaka
- Shaheen, K. (2016). *Turkey Blocks Access To Wikileaks After Erdoğan Party Emails Go Online*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/20/turkey-blocks-access-to-wikileaks-after-erdogan-party-emails-go-online>
- Site, F. G. (2013). *What is Fethullah Gülen's stance on political issues?* Retrieved from Fethullah Gülen's Official Web Site: <http://fgulen.com/en/questions-about-gulen-movement/35668-what-is-fethullah-gulens-stance-on-political-issues>
- Soekanto, S. S. (2016). *Standar Ganda Para Penganjur Demokrasi*. Retrieved from <http://dokter-politik-ui.net/2016/08/standar-ganda-para-penganjur-demokrasi/>
- Susan, R. (2015). *Hitler's Art Thief*. New York: S.t. Martin Press.
- Tempo, T. B. (2015). *Aidit Dua Wajah Dipo Nusantara*. Jakarta: KPG.
- Tempo, T. B. (2010). *Syam Lelaki dengan Lima Alias*. Jakarta: KPG.
- The Gulen Movement's Collision Course With The Turkish State* 2016
- The Headscarf Controversy: Secularism and Freedom of Religion* 2012 Oxford Oxford University Press
- The House of Service: The Gulen Movement and Islam's Third Way* 2014 Oxford Oxford University Press
- Tittensor, D. (2014). *The House of Service: The Gulen Movement and Islam's Third Way*. Oxford: Oxford University Press.
- Turkey'S President Erdogan 'Minutes Away From Death' After Coup Plotters Stormed Hotel* 2016
- Wetlesen, N. I. (Ed.). (2010). *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?* Yogyakarta: Kanisius.
- What Are the Consequences of the Split Between Erdogan and Gülen on Turkey's Foreign Policy?* 2014
- WikiLeaks Dumps 'Erdogan Emails' After Turkey's Failed Coup* 2016
- Yücel, S. (2015). *Fethullah Gülen as a Spiritual Leader in a Global Islamic Context*. Retrieved from <https://www.fgulen.com/en/gulen-movement/on-the-movement/the-art-of-coexistence-pioneering-role-of-fethullah-gulen-and-hizmet-movement/48119-fethullah-gulen-as-a-spiritual-leader-in-a-global-islamic-context>



**REPRODUKSI KULTURAL MITOS “PEREMPUAN IDEAL” JEPANG  
MELALUI SERIAL TV *OSHIN* KARYA SUGAKO HASHIDA  
TAHUN 1983**

***REPRODUCTION OF CULTURAL MYTH ON JAPANESE “IDEAL  
WOMAN’ THROUGH OSHIN TV SERIES BY SUGAKO HASHIDA 1983***

**Yusnida Eka Puteri**

*Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA*

*Email: yusnida.naira@yahoo.com*

**Yusy Widarahesty**

*Universitas Al Azhar*

*Email:yusy\_widarahesty@uai.ac.id*

Diterima: 07-4-2017

Direvisi: 03-5-2017

Disetujui: 31-5-2017

**ABSTRAK**

Jepang merupakan masyarakat matriarkal yang cukup sejajar hingga datangnya pemikiran Konfusian dari China. Pemikiran ini mendefinisikan masyarakat Jepang sampai akhir Perang Dunia II. Integrasi struktur hierarkis Konfusian dengan dominasi peran gender laki-laki mengalihkan ke dalam sistem patriarki. Peran gender ditentukan oleh budaya dan bukan perbedaan fisik antara pria dan wanita. Nilai tradisional Jepang yang membentuk idealisme wanita Jepang berlanjut hingga masa modern awal. Nilai itu dikenal sebagai “ryousai kenbo” (istri yang baik dan ibu yang bijak). Isu gender ini juga banyak terlihat dalam budaya populer manga Jepang, anime hingga drama, dengan salah satu drama populer dan legendaris adalah Oshin. Oshin adalah nama pahlawan drama televisi yang keluar dua kali sehari di Waku-waku Channel selama setahun. Oshin lebih dari sekadar lambang istri yang baik dan ibu yang bijak, dia pemberani, pekerja keras dan penjaga. Penelitian ini secara khusus dilakukan dengan melihat dinamika isu gender Jepang melalui serial drama drama Oshin dengan menggunakan reproduksi budaya oleh Pierre Bourdieu.

Kata Kunci: Reproduksi Budaya, Wanita Ideal, Oshin, Jepang

**ABSTRACT**

*Japan was a fairly equitable matriarchal society until Confucian ideas immigrated from China. These ideas defined Japanese society up until the end of World War II. The integration of Confucian hierarchical structures where male domination shifted gender roles into a patriarchal system. Gender roles are defined by culture rather than physical differences between men and women. Japan traditional values that form the idealism of Japanese women continued until the early modern period. Those values known as “ryousai kenbo” (good wife and wise mother). This gender issues also widely seen in popular culture of the Japanese manga, anime to drama, one of the legendary popular drama is Oshin. Oshin is the name of the heroine of television drama that went out twice a day in Waku-waku Channel for a year . Oshin is much more than the epitome of the good wife and wise mother, she is courageous, hard working and preserving. This research is specifically conducted by looking at the dynamic of Japan gender issues through the serial movie of drama Oshin using cultural reproduction by Pierre Bourdieu.*

**Key Words:** Cultural Reproduction, Ideal Women, Oshin, Japan

## PENDAHULUAN

Jepang merupakan negara di kawasan Asia yang secara ekonomi termasuk ke dalam negara-negara maju. Kontribusinya dalam kancan internasional juga menyebabkan Jepang mampu disejajarkan menjadi salah satu negara yang diperhitungkan sebagai negara *core* (maju).<sup>1</sup> Keberhasilan ekonomi yang menempatkan Jepang mampu sejajar dengan negara-negara Barat tentunya tidak terlepas dari kontribusi dan peranan sumber daya manusia Jepang yang dikenal sebagai pekerja-pekerja yang gigih dan disiplin, yang salah satunya terlihat dalam budaya jam kerja yang panjang hingga menyaingi jam kerja negara Amerika dan Eropa yang dimiliki Jepang semenjak pasca Perang Dunia II.<sup>2</sup>

Laki-laki Jepang dikonstruksikan sebagai penanggung jawab ekonomi baik keluarga maupun negaranya. Di sisi lain, perempuan Jepang dikonstruksikan sebagai penanggung jawab ranah domestik, termasuk pendidikan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat. Namun dengan berjalannya waktu, konstruksi sosial terhadap peran gender tersebut pun lambat laun bergeser. Perempuan Jepang tidak lagi hanya mengisi ranah-ranah domestik saja. Peralihan tersebut terjadi di zaman Meiji. Pada zaman modern tersebut, segala aspek kehidupan di Jepang banyak mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Barat baik dalam bidang pendidikan dan juga sosial budaya yang dikenal sebagai tahapan awal modernisasi Jepang. Akan tetapi perubahan terhadap peran gender belum dapat dikatakan berdampak secara signifikan atau berpengaruh secara menyeluruh, terutama yang terkait dengan hak-hak perempuan Jepang itu sendiri. Hal tersebut tergambar pada masa Perang Dunia II, dimana lebih dari 2,5 juta laki-laki pekerja Jepang ditarik dari dunia industri untuk mengabdikan diri mereka dalam angkatan militer Jepang (<http://www2.gol.com/users/fridman/writings/p1.html>). Pada kondisi tersebut, posisi laki-laki di sector industri digantikan oleh perempuan yang menyumbang

63% dari industri tenaga kerja (Robins-Moury, 1983: 36). Sayangnya, mereka diupah dengan sangat rendah, tinggal di asrama yang penuh sesak, dan tanpa jaminan kesehatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan Jepang sebagai negara maju, belum sejalan dalam upayanya dalam menerapkan demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan.

Persoalan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Jepang ini memang merupakan sebuah cerita panjang yang tidak terlepas dari budaya dan sejarahnya. Menurut sejarah Jepang menempatkan laki-laki sebagai kelompok dominan dan perempuan sebagai kelompok yang terpinggirkan. Namun demikian, kesetaraan gender tersebut sebenarnya sudah diupayakan melalui sebuah dekrit yang dikenal sebagai *Charter Oath* yang diproklamasikan tanggal 6 April 1868 pada masa konstitusi Meiji. Dekrit tersebut mencakup:

1. Akan dibentuk parlemen
2. Seluruh bangsa harus bersatu untuk mencapai kesejahteraan bangsa
3. Adat istiadat yang kolot dan yang menghalangi kemajuan Jepang harus dihapuskan
4. Semua jabatan terbuka untuk siapa saja
5. Semua berhak mendapatkan ilmu pengetahuan sebanyak mungkin untuk pembangunan bangsa dan negara (Surajaya, 2001: 109).

Dekrit tersebut memberikan angin segar pada kesetaraan dan persamaan hak untuk semua golongan. Namun pada praktiknya hal tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. Misalnya dalam ruang kerja yang masih menempatkan perempuan masih sebagai kelas nomor dua dengan jenjang karir yang masih sulit untuk menduduki posisi teratas. Idealisasi peranan perempuan Jepang tersebut juga terekam secara apik dan fenomenal dalam sebuah kisah yang sangat terkenal dalam sejarah sinema Jepang, dengan judul "*Oshin*". Serial TV *Oshin* ini merupakan sebuah cerita yang menggambarkan bagaimana idealisasi seorang perempuan Jepang yang tangguh dan berperan ganda, sebagai

<sup>1</sup> Carlos A. Martínez-Vela, "World System Core and Pheriphery Theory", <http://web.mit.edu/esd.83/www/notebook/WorldSystem.pdf>

<sup>2</sup> Sugimoto, Yoshio, *An Introduction To Japanese Society*, Cambridge, 2004.

istri, menantu dan ibu yang terjadi dari zaman Meiji, Taisho sampai Showa. Zaman tersebut merupakan masa di mana nilai-nilai “Ryousai Kenbo” diberlakukan.

*Ryousai kenbo* merupakan nilai yang menjadi tujuan tertinggi perempuan Jepang pada masa itu, yang akan mungkin akan terdengar sangat asing bagi perempuan modern saat ini. Secara terminologi, *ryousai* bermakna “istri yang cerdas”, sedangkan *kenbo* bermakna “ibu yang bijaksana”.<sup>3</sup> Sebuah nilai ideal yang disematkan kepada perempuan Jepang yang rela mengabdikan hidupnya untuk mengurus suami dan anak-anaknya. Ia membantu pekerjaan suami dan memberikan dukungan sepenuhnya dengan cara mengurus seluruh kebutuhan rumah tangga. Selain itu juga memikirkan pendidikan serta tumbuh kembang anak-anaknya dengan memberikan asupan bergizi yang baik agar mereka kelak menjadi generasi penerus yang dapat diandalkan oleh negaranya.

*Ryousai kenbo* menjadi pilar yang menopang sistem hierarki laki-laki berdasarkan konfusianisme. Pada tahun 1899, pemerintahan Jepang membuat regulasi yang memerintahkan setiap prefektur agar mendirikan sebuah sekolah menengah atas untuk perempuan dengan standar kurikulum yang bertujuan mencetak “good wives and wise mothers” yang mempunyai kemampuan dalam mendidik dan mengasuh anak-anak. (Cherry, 2002; 48-49).

## REPRODUKSI KULTURAL

Pendekatan teoritis Bourdieu sebagian besar adalah upaya untuk menggambarkan bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan orang pada dasarnya adalah sesuatu yang lebih dari sekadar produk dari struktur sosial dan struktur material (Edkins: 2010). Reproduksi kultural menurut Bourdieu adalah sesuatu yang terdiri dari pola-pola perilaku yang dilakukan baik secara sadar ataupun tidak oleh para pelaku sosial di ranah-ranah tertentu (seperti ranah pendidikan, sosial dan budaya) yang dilakukan secara terus

menerus dan berulang-ulang dan bertujuan untuk reproduksi budaya. “*Cultural reproduction contributes to maintaining the power of dominant groups*” (Bourdieu and Passeron, 2000[1970]).

Berdasarkan pemahaman Bourdieu tentang teori reproduksi kultural dan konsep-konsepnya yang mendukung teori tersebut dirasakan peneliti dapat digunakan untuk memahami interaksi antara agen dan struktur dalam memaparkan nilai tradisional masyarakat Jepang terkait nilai “*ryousai kenbo*” yang diinternalisasikan secara konstruktif melalui serial televisi Oshin kepada masyarakat Jepang. Nilai tersebut berupaya untuk menanamkan nilai ideal perempuan Jepang dan terus dipertahankan hingga kini. Habitus yang diasumsikan sebagai orientasi semi sadar individu yang menjadi landasan sikap dan kecenderungan yang dibentuk oleh keseharian, dan *misrecognised* (pengenalan yang keliru) individu terhadap dunia, stigma-stigma, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang sebenarnya *socially constructed* terus direproduksi untuk menjamin dominasi dari kekuasaan laki-laki di Jepang di mana mereka berperan sebagai kelompok dominan.

Berdasarkan pemikiran Bourdieu tersebut, untuk menginternalisasikan suatu nilai maka pelaku dari ranah-ranah tertentu (pemerintah, sosial, budaya, atau pendidikan) akan melakukan sesuatu secara terus-menerus dan berulang-ulang yang bertujuan agar tercipta kemapanan nilai atau dominasi dari kelompok tertentu. Pertarungan tersebut memerlukan suatu arena (*fields*), dalam hal ini adalah arena sosial yaitu masyarakat, dimana para aktor tersebut berlomba membangun kesadaran dari masyarakatnya sehingga tercipta habitus yang kemudian dipercaya dan dianggap sebagai kebenaran yang universal. Dalam hal ini adalah fenomena serial televisi Oshin yang melegenda diputar kembali lalu dihadirkan sebagai instrumen “mesin aksi budaya” yang coba disajikan ke dalam ruang-ruang di setiap sudut-sudut rumah masyarakat Jepang sebagai tontonan secara simultan selama bertahun-tahun melalui instrumen bernama televisi. Instrumen tersebut berperan untuk merubah atau mempertahankan reproduksi budaya.

<sup>3</sup> Tatsuro Sakamoto, *Ryousai Kenbo: The Educational Ideal of ‘Good Wife, Wise Mother in Modern Japan (The Intimate and the Public in Asian and Global Perspectives)*, Educational Studies in Japan: International Yearbook, No.8, 2014, diakses di <http://www.jstage.jst.go.jp>

## MEDIA

G. Lopovetsky mengatakan bahwa dalam reproduksi budaya, tekanannya harus selalu bergerak karena diarahkan oleh efektifitas dan tuntutan agar bisa bertahan hidup (Haryatmoko, 2007; 26). Salah satu bentuk reproduksi budaya melalui media dapat dilihat dari CNN dengan slogannya

“Good News is Fast News”.

*“The mass media have unquestionably affected many aspects of human life. They influence the way we perceive others and interact with one another, and shape our perspective of the world. At times, the mass media play a crucial role in image formation of others in many situations. Thus, the mass media can be seen not only as a driving force behind cultural and social value judgment but also as an index for image-shaping of other people (Tan & Suarchavarat, 1988; Mowlana, 1995)”*.<sup>4</sup>

Selain media informasi seperti CNN, media film juga termasuk media komunikasi yang mampu menyampaikan pesan secara efektif kepada penontonnya. *“like literature and theater, film is in principles capable of saying anything”*.<sup>5</sup> Untuk itu film mampu menyampaikan pesan dari pembuat film kepada penontonnya. Film hadir seiring dengan perkembangan masyarakat dan industri. Oleh karena itu, film menjadi bagian dari media budaya populer saat ini.

Pada akhir abad 19, film muncul dan berperan sebagai sarana baru dalam menyebarkan hiburan, menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, lawak dan program lainnya kepada masyarakat umum. (McQuail, 1994; 13). Film merupakan media yang sangat unik untuk mengkomunikasikan pesan, karena film dapat mereproduksi gambar, gerakan, dan suara hampir seperti aslinya (Walter, 2001; 1). Oleh karena itu, film memiliki kemampuan yang kuat dalam menciptakan ilusi.

<sup>4</sup> Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communication (82nd, New Orleans, Louisiana, August 3-8, 1999): International Communication, Part 2.

<sup>5</sup> Winfried Noth, Handbook of Semiotics, Indiana University Press, 1995, hal. 467

Selain film, ada televisi yang memiliki kekuatan yang hampir sama dengan film terkait penyampaian pesan. Potensi dari suatu program acara televisi adalah secara langsung masuk ke dalam ruang-ruang pikir masyarakat secara simultan. Sehingga, televisi merupakan media yang cukup ampuh dalam membentuk suatu pesan atau propaganda tertentu yang ingin diciptakan oleh pembuatnya. Seperti dalam tayangan serial Oshin yang tentunya dibuat oleh pembuatnya tidak terlepas dari situasi, dan kondisi yang menggambarkan budaya masyarakat setempat.

*“It may seem like romanticizing to consider television offerings like Oshin part of ‘the intangible heritage of humanity’, but to reserve that designation only for works that have acquired the veneer of venerability that antiquity provides would be to overlook the continuity of ‘popular culture’ with ‘cultural heritage’.*

*While a teleseries like Oshin is indeed committed to reels and records, every retelecast and viewing of it is an opportunity for acknowledging the triumphs and tribulations of the human condition, and hopefully, an opportunity thereby to cultivate a degree of empathy in human affairs. In our times in history which are uncertain for most and troubled for many, such creations of popular culture that reaffirm faith in humanity are no less worth cherishing and passing on, than other human creations from deep antiquity enjoying an institutional seal of approval as deserving of posterity.”*<sup>6</sup>

Melalui tayangan ulang serial tersebut, nilai-nilai ideal seorang perempuan Jepang disuguhkan setiap hari secara simultan selama 15 menit per-episode. Karena setiap medium adalah pesan maka TV memiliki kemampuan yang efektif dalam menyampaikan pesan secara simultan kepada setiap penontonnya, dalam hal kaitannya dengan serial Oshin maka, gambaran ideal mengenai idealisasi perempuan Jepang mampu terekam dalam masyarakat Jepang yang menontonnya pada saat itu.<sup>7</sup> Serial TV ini

<sup>6</sup> <http://nirmukta.com/2012/10/01/growing-up-with-oshin-lessons-in-sustainability-and-solidarity/>

<sup>7</sup> Clyde Haberman, In Japan, ‘Oshin’ Means Its Time For A Good Cry, <http://www.nytimes.com/1984/03/11/arts/in-japan->

diputar kembali dengan harapan masih relevan untuk diputar kembali pada generasi saat ini.

## SEJARAH RYOUSAI KENBO

Setelah meratifikasi hak asasi manusia terutama yang berkenaan dengan perempuan maka muncul adanya tuntutan-tuntutan terhadap Pemerintah Jepang untuk pemenuhan hak asasi perempuan seperti yang terkandung di dalam 12 fokus kritis yang terdapat dalam Konferensi Wanita Internasional Beijing tahun 1995. Akhirnya, Pemerintah Jepang berbenah diri dengan mengeluarkan kebijakan *Bunmei Kaika* sebagai sistem pendidikan baru (Murakami, 1977; 12). *Bunmei Kaika* adalah suatu proses pembangunan bangsa yang terjadi dalam berbagai aspek meliputi politik, sosial, ekonomi dan budaya. Kebijakan ini diadopsi dari peradaban Barat dengan menghapus kelas dalam masyarakat I serta memberikan kesempatan kepada kaum wanita untuk mengembangkan diri secara terbatas dengan akses penuh pada pendidikan (Askew, 2004; 134).

Sebelumnya, pendidikan hanya dapat diakses oleh laki-laki dan mereka yang menyandang status sosial tinggi namun Pemerintah Jepang menerapkan sebuah sistem baru yakni memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk mendapat akses pendidikan yang setara dengan laki-laki dan kelas sosial tinggi. Hal ini bertujuan untuk menghapus kebiasaan lama bahwa tentang perbedaan dalam serta penghapusan terhadap perbedaan kelas sosial manusia. (Murakami, 1977; 12)

Meski begitu, di sisi lain Pemerintah Jepang berpendapat bahwa hal-hal yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia tidak seluruhnya dapat diterapkan, sehingga Pemerintah Jepang harus menyaring dan menerapkan kebijakan hak asasi manusia yang sesuai dengan tradisi Jepang seperti bentuk keluarga ideal. Tradisi Jepang dalam menjalankan nilai-nilai keluarga memang sudah mengakar, dan sudah dianggap sebagai ideologi yang dijalankan oleh para leluhur masyarakat Jepang dari zaman kemonarkian, feodal hingga masa peralihan modern.

Nilai tradisional yang terkait dengan prinsip-prinsip keluarga khususnya landasan bagi moral dan perilaku kaum perempuan masa lalu tersebut dikenal dengan istilah *Ryousai Kenbo*. Istilah bahasa Jepang *Ryousai Kenbo* terdiri dari 2 frase, yaitu *ryousai* dan *kenbo*. Terbentuk dari penggabungan 4 karakter kanji, 良 (*yoi*) "baik" dan 妻 (*tsuma*) "isteri"; 賢 (*kashikoi*) "bijaksana" dan 母 (*haha*) "ibu". Dengan memperhatikan komponen pembentuk kanji yang digunakan, akan langsung dapat ditebak bahwa makna dari istilah *ryousai kenbo* adalah "isteri yang baik dan ibu yang bijaksana". Tidak mudah menjadi seorang *ryousai kenbo* sehingga pemerintah merasa perlu mendirikan universitas untuk mencetak seorang ibu rumah tangga yang terdidik, salah satunya adalah Otsuma Joshi Daigaku (Otsuma Women University). Di universitas ini, para perempuan dididik untuk mencapai gambaran ideal perempuan Jepang. Mereka diharapkan mendedikasikan seluruh waktunya untuk mengurus keluarga termasuk mendidik anak-anaknya.

## Reproduksi Kultural Mitos *Ryousai Kenbo* Jepang Melalui Serial TV *Oshin* 1983

Modernisasi berkontribusi pada lahirnya beragam fenomena-fenomena sosial. Perubahan dan ragam fenomena sosial juga dialami Jepang, sebagai negara yang telah berhasil bertransformasi dari negara agraris menjadi negara industrialis banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Jepang. Kebijakan pemerintah Jepang dalam mengejar ketertinggalannya dengan Barat tidak hanya di level makro atau Pemerintah saja, namun juga sampai ke level bawah atau masyarakat.

Pendidikan berperan penting dalam menginternalisasi prinsip-prinsip kecintaan kepada negara dan kaisar, selain itu pendidikan juga digunakan untuk menginternalisasikan prinsip *Ryousai Kenbo* (*good wives and wise mothers*) kepada perempuan di Jepang. Pada tahun 1879, pemerintah Jepang mengeluarkan sebuah kebijakan yang mewajibkan setiap wilayah untuk mendukung setidaknya satu Sekolah Menengah Atas khusus perempuan dan memiliki kurikulum

---

[oshin-means-it-s-time-for-a-good-cry.html](#)

untuk mencetak “*good wives and wise mothers*”. (Vera, Mackie. 2003; 25). Kurikulum tersebut berisi mengenai berbagai pengetahuan menjadi ibu rumah tangga dan ibu yang bijaksana, yang meliputi efisiensi pengaturan rumah tangga, kebersihan, akuntansi rumah tangga, menabung, memasak dan merangkai bunga serta mendidik mereka melalui praktik menjaga anak. (Miyako, Inoue, 2006; 46)

*“Ryosai Kenbo had been the essence of Japanese women education until the end of World War II in 1945. This education for “Good wife and wise mother” aimed to train girls to have the thoughts that they regard nation state as family and to do her best for the family members. The premise was no an equal couple but a patriarchal family that a wife was more low position than a husband.”*<sup>8</sup>

*Ryosai Kenbo* menjadi pilar yang mendukung hierarki dominasi laki-laki berdasarkan paham konfusius.<sup>9</sup> Karena dalam mewujudkan negara industri modern yang sesuai dengan motto Jepang pada saat itu yakni *fukoku kyohei (wealthy country and strong army)* perempuan Jepang sangat diperlukan peranannya dalam menopang terciptanya pendidikan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai tradisional Jepang.<sup>10</sup> Wanita dibentuk dengan peran sebagai “istri yang baik dan ibu yang bijak” di mana peran utamanya adalah reproduksi dan pendidikan anak serta sebagai objek pasif dari sistem patriarki.

Hal tersebut dapat dilihat pada sebuah teks “moral” yang dibawa oleh Kaibara Ekken (1630-1714) yaitu *Onna daigaku (Greater Learning for Women)* yang menyarankan wanita untuk

<sup>8</sup> “Kiguchi Junko in Japanese Women’s rights during Meiji Restoration” - [http://daigakuin.soka.ac.jp/assets/files/pdf/major/kiyou/17\\_syakai2.pdf](http://daigakuin.soka.ac.jp/assets/files/pdf/major/kiyou/17_syakai2.pdf) (diakses pada 26 Januari 2014)

<sup>9</sup> Cherry, Kittredge. *Womansword: What Japanese Words Say About Women*, dalam Yusy Widarhesty & Rindu Ayu, “Fenomena Penurunan Angka Kelahiran di Jepang”, Jurnal Pranata Sosial Universitas Al azhar Indonesia, <http://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/viewFile/168/157> (diakses 7 desember 2016)

<sup>10</sup> Cherry, Kittredge. *Womansword: What Japanese Words Say About Women*, (Tokyo, Kodansha International, 2002) hal. 49

“Tidak pergi keluar rumah untuk urusan yang bukan kebutuhan, tapi tetap tinggal dirumah, menjahit pakaian untuk mertua mereka, memasak makanan, melayani suami, mencuci dan melipat pakaian, menyapu lantai dan membesarkan anak”<sup>11</sup> bahkan wanita harus dapat menerima keabsahan 7 alasan pria menceraikan mereka, meliputi ketidakpatuhan, banyak bicara (cerewet) dan kemandulan, boros, mencuri uang suami, melawan mertua dll.<sup>12</sup>

Gambaran ideal perempuan Jepang ini juga dapat dilihat dari potret perempuan ideal Jepang pada zaman Edo dan Meiji yang dikenal dengan sebutan “Edo Mama” dan “Meiji Mama”. Dalam sebuah ajaran *Bushido (the code of Samurai)*, dijelaskan secara terperinci apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban dari seorang perempuan khususnya setelah menikah. Dalam ajaran tersebut dijelaskan bahwa ketika sudah menikah dan menjadi seorang ibu maka ia akan menjadi mulia apabila dalam kesehariannya, dia yang paling awal bangun daripada anggota keluarga lainnya dan yang paling akhir tidur dari anggota keluarga lainnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa idealisasi perempuan Jepang yang dikonstruksi oleh pemerintah Jepang pada masa lalu tersebut mampu dan berhasil menjadi sebuah landasan (habitus) bagi hampir sebagian perempuan Jepang pada masa itu. Gambaran ideal tentang perempuan Jepang tersebut terekam sangat baik melalui sebuah serial TV drama yang fenomenal yaitu *Oshin*. Hirai Nobuyoshi menjelaskan bahwa kesuksesan yang luar biasa yang diraih dari drama “*Oshin*” ini dikarenakan “*Oshin*” telah berhasil menggambarkan perempuan ideal yang telah menjadi *doxa* yang dibentuk sesuai budaya patriarki Jepang di masa sebelum perang. Pengorbanan perempuan yang didedikasikan kepada suami, ibu dari suami dan anaknya adalah simbol perjuangan yang menjadikannya sebagai “good wife” dan “wise mother”.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Atsuharu, Sakai. “Kaibara Ekken and Onna Daigaku”, (Cultural Nippon 1939), hal. 43-56.

<sup>12</sup> Women in World History, “Early Modern Period: Confucian Doctrine”, <http://chnm.gmu.edu/wwh/p/84.html> (diakses pada 7 Desember 2015)

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 108

Prinsip *Ryousai Kenbo* atau “good wife and wise mother” ini tentunya hari ini sudah terkikis oleh perkembangan waktu dan zaman. Arus globalisasi telah merubah berbagai tradisi di Jepang. Perubahan jaman juga menginspirasi gerakan kelompok perempuan feminis Jepang untuk berjuang menolak nilai-nilai lama tersebut. Nilai kepatuhan dan penempatan akan status perempuan Jepang yang terpinggirkan terus diperjuangkan oleh kelompok feminis Jepang.

Hingga, muncullah sebuah prinsip baru di kalangan perempuan-perempuan Jepang sekarang ini, yaitu *Jibun rashiku ikiru (live for themselves)* yaitu kebebasan bagi perempuan Jepang dalam menjalani apa yang menjadi pilihan hidupnya, seperti bebas melanjutkan sekolah, memilih untuk tidak menikah, memilih mengejar karir dan lainnya. Prinsip ini menjadi ide dasar perempuan Jepang modern saat ini dalam mengejar mimpinya dibandingkan terpaku pada nilai-nilai konvensional. Perempuan Jepang saat ini menganggap pernikahan sebagai sebuah pilihan bukan lagi sebagai tuntutan seperti yang terjadi pada generasi sebelumnya. Namun pergeseran makna pada pernikahan di Jepang ini dituding sebagai bentuk egoisme perempuan dalam mengejar impiannya di masa modern yang penuh kebebasan ini.<sup>14</sup>

Hal ini pun menyebabkan terjadinya *gap generation* di Jepang. Permasalahan penundaan pernikahan ini muncul sebagai masalah sosial di Jepang pada awal tahun 1990-an, yang kemudian dikaitkan dengan menurunnya angka kelahiran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Economic Planning Agency bahwa hal yang menyebabkan Jepang menjadi negara yang “*shoshika*” (lebih banyak penduduk tua) yaitu disebabkan oleh munculnya tren *bankonka (delayed marriage)* dan “*hikonka*” (*non-marriage*).<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Lynne Nakano and Moeko Wagatsuma, *Japan's Changing Generation; Mothers and Their Unmarried Daughters An Intimate Look At Generational Change*, (London, RoutledgeCurzon, 2004) hal. 138

<sup>15</sup> Lynne Nakano and Moeko Wagatsuma, *Japan's Changing Generation; Mothers and Their Unmarried Daughters An Intimate Look At Generational Change*, (London, RoutledgeCurzon, 2004) hal. 138

Rasionalitas yang ditawarkan oleh modernisasi inilah yang kemudian menempatkan perempuan-perempuan Jepang untuk lebih mandiri dan bebas dalam menentukan pilihannya. Antara “good mother” atau “career women” menjadi pilihan yang ditemui oleh perempuan Jepang sekarang ini. Mereka mengalami benturan budaya yang merupakan peninggalan dari tradisi Jepang, khususnya budaya patriarki.

Tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip rasionalitas yang dianut oleh perempuan Jepang hari ini seringkali ditenggarai sebagai penyebab dari berkurangnya angka kelahiran. Sehingga menjadi menarik kemudian ketika gambaran idealisasi perempuan Jepang yang tergambar dalam film *Oshin* kemudian ditayangkan kembali pada masa sekarang dan diharapkan penayangan ulang tersebut masih relevan dengan generasi saat ini. Kemunculan film *Oshin* yang ditayangkan melalui channel TV *Waku-Waku Japan* pada tahun 2013, telah menarik banyak perhatian bukan hanya di Jepang sendiri tetapi juga di luar Jepang. Hal tersebut tentu saja karena cerita *Oshin* yang memang ditayangkan di 196 negara telah membangkitkan kembali kenangan masa lalu para generasi yang hidup dan tumbuh dengan tayangan *Oshin* tersebut.

Sesuai dengan pendekatan Bourdieu yang menyatakan, bahwa pola yang dibentuk secara sistematis pada akhirnya akan mampu membentuk suatu pola atau pemahaman yang universal terhadap dunia. Dalam hal ini prinsip “*ryousai kenbo*” yang diinternalisasikan secara konstruktif untuk menanamkan nilai ideal perempuan Jepang melalui serial televisi *Oshin* kepada masyarakat Jepang pada akhirnya membentuk kesadaran yang dianggap sebagai kebenaran yang universal tentang apa yang ideal bagi perempuan Jepang. Reproduksi kultural yang disajikan melalui serial TV *Oshin* tersebut merupakan upaya individu atau kelompok yang terdiri dari pola-pola perilaku yang dilakukan baik secara sadar ataupun tidak oleh para pelaku sosial di ranah-ranah tertentu (seperti ranah pendidikan, sosial dan budaya) yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang dan bertujuan untuk mempertahankan posisi dominasi kelompok sosial tertentu, dan juga untuk menunjukkan apa

yang menjadi budaya asli (tradisional) suatu kelompok terhadap tempat atau waktu yang baru.

Media itu sendiri merupakan suatu instrumen yang dapat berperan untuk merubah atau mempertahankan reproduksi budaya. Serial TV merupakan instrumen yang ampuh untuk mereproduksi nilai-nilai kultural tersebut. Di dalam sebuah arena atau “arena pertempuran” seperti istilah yang diungkapkan oleh Bourdieu, bahwa reproduksi kultural dilakukan untuk mempertahankan posisi kelas dominan. Dalam konteks modernisasi yang dialami Jepang hari ini, melihat resistensi nilai-nilai tradisional perempuan Jepang untuk kembali kepada nilai lamanya tentunya untuk sebagian kalangan menjadi sebuah ancaman.

Dalam drama Oshin, kepatuhan seorang wanita dituntut atas tiga laki-laki (yaitu ayah, suami dan anak laki-lakinya) dalam hidupnya sesuai dengan nilai “Ryousai kenbo” yang dipercayai oleh perempuan generasi Oshin, sehingga kepercayaan tersebut menjadi *habitus* yang dianggap menjadi sebuah *doxa* (kebenaran universal) yang tak terbantahkan pada waktu itu. Namun sekali lagi tentunya relevansi nilai-nilai tersebut sulit untuk dapat diterima hari ini, di mana globalisasi dan perubahan yang membawa kepada nilai-nilai modernisme pastinya telah merubah dan mengikis nilai-nilai tradisi tersebut. Walaupun dalam sejarahnya, pemerintah Jepang telah menolak untuk menerima secara total modernisasi, namun tentunya perubahan zaman tidak dapat dihindari. Maka melalui berbagai instrumen pemerintah dan berbagai pelaku sosial yang memiliki otoritas berlomba untuk merebut *arena* agar dapat membentuk *habitus*.

Melalui serial TV Oshin, arena pertarungan tersebut coba dikonstruksikan. Pada awal kemunculannya sendiri pada tahun 1983 serial Oshin yang dibuat oleh Sugako Hashida ditayangkan dalam stasiun TV milik pemerintah yaitu NHK dari tanggal 4 April 1983 sampai 31 Maret 1984. Kemudian, di tengah-tengah penayangannya pada tahun 1983, tayangan ini juga mendapatkan dukungan dari *The Japan Foundation*. Saat ini, serial tersebut ditayangkan kembali oleh saluran TV NHK Jepang yang kemudian ditayangkan juga pada saluran TV

berbayar *Waku Waku Japan* yang dapat diakses oleh banyak negara mulai tanggal 29 Februari 2016. Kemunculan serial Oshin ini menjadi perbincangan yang hangat bukan hanya di Jepang namun juga negara-negara di luar Jepang.

### **“Ryousai Kenbo” dalam Serial Drama Oshin**

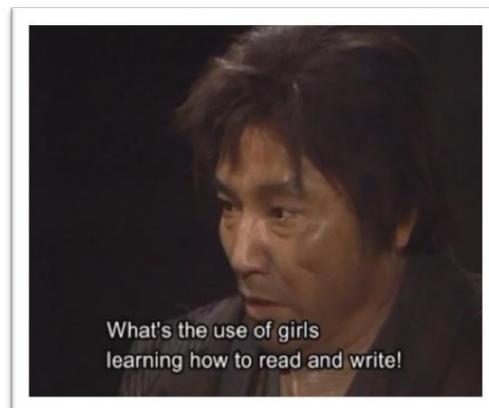
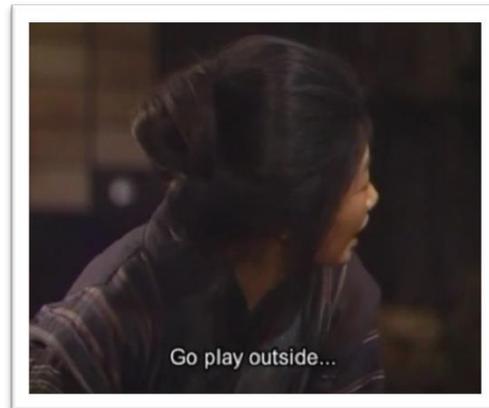
Beberapa cuplikan adegan serial Oshin berikut ini menunjukkan nilai-nilai ryousai kenbo yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat Jepang dengan latar tahun 1900-an. Nilai-nilai ideal seorang perempuan Jepang digambarkan melalui perilaku yang mengandung nilai-nilai kesopanan, keberanian, kesederhanaan, melek aksara, pekerja keras, dan produktif. Perilaku-perilaku tersebut direproduksi melalui peran-peran yang dimainkan oleh para tokoh, terutama Oshin.

Keluarga Sakuzo Tanimura adalah gambaran keluarga petani miskin di wilayah Yamagata pada era Meiji tahun 1907 hingga awal tahun 1980-an. Dengan mata pencaharian sebagai petani penggarap pada saat itu, sangat tidak memungkinkan untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi anggota keluarga yang berjumlah 9 orang itu, apalagi pendidikan. Akhirnya satu persatu anak-anak perempuan dari keluarga Tanimura dikirim untuk bekerja dan meninggalkan rumah. Namun kondisi itu tetap saja tidak dapat membantu kehidupan keluarga menjadi lebih baik sehingga akhirnya Oshin yang saat itu berumur 7 tahun pun ditukar dengan sekarung beras untuk bekerja sebagai pembantu. Sejak saat itulah, kehidupan Oshin yang penuh perjuangan dimulai.

### Adegan 1.



### Adegan 2.



Dalam *scene* 1 dan 2 ditampilkan adegan suasana makan malam keluarga Tanimura. Fuji (ibu dari Oshin) menyiapkan makanan dan melayani kebutuhan keluarga pada saat makan, tetapi tidak ikut makan bersama.

Walaupun hanya makan nasi yang dicampur lobak, semua keluarga sangat menikmati makan malam tersebut. Fuji selalu melayani anak-anak dan suaminya dengan gembira, menawarkan bantuan untuk menyendokkan nasi dengan tersenyum. Tidak terlihat kesedihan walaupun dia tahu bahwa anak-anak dan keluarganya tidak makan dengan cukup. Seorang ibu akan makan ketika seluruh anggota keluarganya telah menyelesaikan makan mereka.

Sesuai kondisi masa itu seorang ibu atau istri harus bangun paling pagi dan tidur paling larut, demikian juga ketika jam makan tiba. Tidak ada ibu yang makan bersama keluarga, melainkan setelah acara makan selesai. Hal tersebut merupakan bentuk pengabdian seorang istri terhadap suami dan kasih sayang terhadap anak-anaknya.

*Scene* 1 dan 2 memperlihatkan perdebatan antara ibu dan ayah Oshin karena sang ibu merasa sangat keberatan apabila Oshin harus dipaksa bekerja di usia sekecil itu. Fuji tetap mempertahankan keberadaan Oshin di rumah. Tapi Ayahnya tidak mau merubah keputusan dan tetap mengirim Oshin kepada keluarga Nakagawa untuk bekerja sebagai pengasuh bayi disana.

Agar Oshin tidak mendengar perdebatan kedua orang tuanya, maka Fuji menyuruhnya untuk bermain di luar. Sebagai seorang ibu yang melahirkan anak-anaknya, Fuji menentang keputusan suaminya yang ingin menyuruh Oshin keluar dari rumah untuk bekerja. Fuji bersedia melakukan apa saja dan bersedia kekurangan makanan asalkan mereka semua bisa berkumpul di rumah sebagai sebuah keluarga.

### Adegan 3.



*Scene 1 dan 2* memperlihatkan suasana di sebuah Sekolah Dasar. Anak laki-laki dan perempuan sedang belajar di dalam kelas yang sama dengan seorang guru yang sangat peduli terhadap pendidikan, yang bernama Matsuda *sensei*.

Seluruh warga masyarakat mendapat kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Tidak ada perbedaan atas hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak laki-laki dan anak perempuan

Konstitusi Meiji melalui *Charter Oath* telah menghapuskan ketimpangan-ketimpangan terhadap jender yang terjadi di dalam masyarakat. Semua masyarakat berhak mendapatkan ilmu pengetahuan sebanyak mungkin untuk pembangunan negaranya.

### Adegan 4.



*Scene 1 dan 2* memperlihatkan Bapak Guru Matsuda yang mendatangi rumah keluarga Nakagawa untuk meminta izin agar Oshin diperbolehkan belajar di sekolah. Bapak Guru juga menjelaskan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama untuk bersekolah walaupun statusnya hanya sebagai pengasuh bayi seperti Oshin. Mendengar penjelasan dari guru Matsuda, Tuan Nakagawa mengizinkan Oshin untuk belajar di sekolah sambil menggendong Takeshi, bayi yang diasuhnya.

Sebagai seorang anak yang berumur 7 tahun Oshin harus bersekolah, karena pemerintah menjamin hak tersebut. Tuan Nakagawa pun mengerti hal tersebut dan mengatakan kepada isterinya bahwa Oshin bekerja pada kita sehingga menjadi suatu keharusan bagi kita untuk memperhatikan pendidikannya'.

Seorang anak perempuan harus bersekolah agar kelak dapat memberikan pengasuhan dan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya.

## PENUTUP

Seperti dalam penjelasan G. Lipovetsky yang menyatakan bahwa media televisi merupakan media yang ampuh dalam mereproduksi sebuah budaya, hal tersebut dikarenakan adanya penekanan pada sesuatu yang terus bergerak, berubah agar dapat bertahan lama. Dalam pandangan Bourdieu, Reproduksi kultural dilakukan baik secara sadar ataupun tidak oleh para pelaku sosial di ranah-ranah tertentu (seperti ranah pendidikan, sosial dan budaya) Serial TV Oshin dibuat oleh pekerja seni pembuat film yaitu Shin Togashi yang kemudian dalam penayangan pertamanya didukung oleh Japan Foundation dan ditayangkan di stasiun TV NHK dan kemudian ditayangkan ulang bukan hanya di Jepang tetapi juga di berbagai negara. Dengan demikian sebuah konotasi yang terus menerus ditanamkan dan diulang-ulang melalui media TV tersebut mampu memberi keyakinan akan kebenaran suatu hal. Dalam serial Oshin perempuan yang ideal dapat menjadi sebuah mitos bagi masyarakat Jepang, bahwa idealisasi yang tergambar dalam serial Oshin mampu mengesankan bagaimana seorang perempuan yang baik dalam budaya masyarakat Jepang, yaitu seorang perempuan yang mandiri, ulet, tegar, pemberani, mengasuh dengan baik, patuh dan tunduk dan dia adalah Oshin. .

*”Like literature and theater, film is in principles capable of saying anything”*, film sebagai sebuah kajian merupakan sebuah model kedua yang merepresentasikan ”dunia”, artinya film sebagai sebuah ikon dan merupakan tanda-tanda yang bersifat konvensional di mana strukturnya terbentuk dari berbagai elemen yang ditandai oleh film melalui kesan-kesan realita dan juga kesadaran ilusi, dengan demikian media film yang ditayangkan secara simultan melalui Televisi merupakan reproduksi kultural yang efektif yang mampu terekam lama dalam memori penontonnya.

## PUSTAKA ACUAN

- Askew, K. Rei, *The Cultural Paradox of Modern Japan; Japan and Its Three Others*, New Zealand Journal of Asian Studies 6, Vol.1, (Monas University, 2004), hal 134-137
- Atsuharu, Sakai. “Kaibara Ekken and Onna Daigaku”, (Cultural Nippon 1939), hal. 43-56.
- Barker Chris, *Cultural Studies, Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta, PT. Bentang Pustaka 2005) hal. 178
- Chealsea Szendi Schieder, “*Womenomics vs Women: Neoliberal Cooptatio of Feminism in Japan*”, “Meiji Journal of Political Science and Economics vol.3,53
- Cherry, Kittredge. (2002). *Womansword: What Japanese Words say About Women*
- Dennis McQuail, (1994). *Teori Komunikasi Massa; Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta
- Edkins, Jenny dan Vaughan, Nick. Williams. (2010). *Teori-teori kritis: Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*, Baca. Yogyakarta
- Field, Malcolm. H. (2000). *Human Right in Japan; Intriguing, Progressing but Still Lacking*, Waseda Global Forum
- Fumiko, Horimoto. (1999). *Pioneers of The Womens Movement in Japan; Hiratsuka Raicho and Fukuda Hideko Seen Through Their Journals, Seito and Sekai Fujin*, (University of Toronto; Canada, 1999), hal 15
- Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, Kanisius, Yogyakarta, 2007. Hal.26
- Inoue, Miyako. (2006). *Vicarious Language: Gender and Linguistic Modernity in Japan*. (University of California Press.
- Lynne Nakano and Moeko Wagatsuma. (2004). *Japan’s Changing Generation; Mothers and Their Unmarried Doughters An Intimate Look At Generational Change*, London: RoutldgeCurzon.
- Murakami, Nobuhiko. (1977). *Meiji Joseishi*; Bunmei Keika, Tokyo: Kodansa.
- McQuail, Dennis. (1994). *Teori Komunikasi Massa; Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga
- Robins-Mowry, Dorothy. (1983). *The Hidden Sun: Women of Modern Japan*. Boulder: Westview Press.
- Sugimoto, Yoshio, *An Introduction To Japanese Society*, Cambridge, 2004.

Vera, Mackie. (2003). *Feminism in Modern Japan: Citizenship, Embodiment and Sexuality*, Cambridge: Cambridge University Press.

Walter, Benjamin.(2001) "*The Work of Art in The Age of Mechanical Reproductiona*", New York, Olive Branch Press.

Winfried Noth, *Handbook of Semiotics*, Indiana University Press, 1995, hal. 467

#### Website:

Emely S. Chen, "*When Womenomics Meet Reality*," *The Diplomat*, <http://thediplomat.com/2015/10/when-womenomics-meets-reality/>, (diakses 4 September 2016)

Giovanni Ganelli dan Naoko Miake, "Foreign Help Wanted: Easing Japan's labor Shortages", IMF Working Paper, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15181.pdf> (maret 2016)

Carlos A. Martínez-Vela, "World System Core and Periphery Theory", <http://web.mit.edu/esd.83/www/notebook/WorldSystem.pdf>

Clyde Haberman, In Japan, 'Oshin' Means Its Time For A Good Cry, <http://www.nytimes.com/1984/03/11/arts/in-japan-oshin-means-its-time-for-a-good-cry.html>

Kiguchi Junko, In Japanese Women's rights during Meiji Restoration"[http://daigakuin.soka.ac.jp/assets/files/pdf/major/kiyou/17\\_syakai2.pdf](http://daigakuin.soka.ac.jp/assets/files/pdf/major/kiyou/17_syakai2.pdf) (diakses pada 26 Januari 2014)

Nicholas Eberstadt, "*Japan Shrinks*," *Spring, The Wilson Quarterly*, (2012), [http://www.mauldineconomics.com/images/uploads/overmyshoulder/Feat\\_EberstadtFNL,.pdf](http://www.mauldineconomics.com/images/uploads/overmyshoulder/Feat_EberstadtFNL,.pdf), (diakses 15 maret 2016)

Rachel Ferguson, Opting out: "Exploring reasons behind the corporate gendergap in Japan through the experiences of bicultural women", <https://www.scribd.com/document/128090763/Opting-out-exploring-reasons-behind-the-corporate-gender-gap-in-Japan-through-the-experiences-of-bicultural-women> (diakses 15 Maret 2015)

Seth Friedman, "Women in Japanese Society: Their Changing Roles" <http://www2.gol.com/users/fridman/writings/p1.html>. (diakses 4 September 2016)

Tatsuro Sakamoto, Ryou Sai Kenbo: The Educational Ideal of 'Good Wife, Wise Mother in Modern Japan (The Intimate and the Public in Asian and Global Perspectives), *Educational Studies in Japan: International Yearbook*, No.8, 2014, diakses di <http://www.jstage.jst.go.jp>

Yusy Widarahesty & Rindu Ayu, "Fenomena Penurunan Angka Kelahiran di Jepang", *Jurnal Pranata Sosial Universitas Al Azhar Indonesia*, <http://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/viewFile/168/157> (diakses 15 maret 2015)

<http://www.republika.co.id/berita/trendtek/sains/12/05/11/m3v2a1-bayi-makin-sedikit-orang-jepang-bakal-punah>. diakses 17 Januari 2016

<http://www.globalpost.com/dispatch/japan/090915/pay-procreate-cash-kids> diakses 17 Januari 2016

<http://nirmukta.com/2012/10/01/growing-up-with-oshin-lessons-in-sustainability-and-solidarity/> diakses 17 Januari 2016

Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communication (82nd, New Orleans, Louisiana, August 3-8, 1999):*International Communication*, Part 2.

**RINGKASAN HASIL PENELITIAN  
MIGRASI TRANSNASIONAL DAN IDENTITAS DIASPORA DI KOTA-  
KOTA PERBATASAN DI ASIA TENGGARA  
STUDI KASUS THAILAND DENGAN MYANMAR DAN LAOS**

**RESEARCH SUMMARY  
TRANSNATIONAL MIGRATION AND DIASPORA IDENTITY IN  
BORDER CITIES IN SOUTHEAST ASIA: CASE STUDY OF THAILAND  
WITH MYANMAR AND LAO PDR**

**Amorisa Wiratri, Betty Rosita Sari, Yekti Maunati, Lamijo**  
Pusat Penelitian Sumber Daya Regional – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Email: [sevencupid7@gmail.com](mailto:sevencupid7@gmail.com)

Diterima: 6-4-2017

Direvisi: 2-5-2017

Disetujui: 5-5-2017

**ABSTRACT**

*This research has done in the border cities in Southeast Asia, namely Thailand, Lao PDR and Myanmar that straight bordered with China. Border cities are strategic locations for transnational migration, including the mobility of human, goods, information and transfer of ideas, where at the same time also contributed as bridge that linked between two or three different countries in Southeast Asia. China's economic expansion and people migration from neighbouring countries has influenced the dynamic of economic, social and culture for people who live in border areas, especially in North Thailand. This research focus on the process of transnational migration, the identity of diaspora, and small scale economic activity among diaspora groups in border areas between north Thailand and Myanmar and also Lao PDR.*

**Keywords:** *transnational migration, diaspora identity, border cities*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan di kota-kota perbatasan Asia Tenggara, yaitu Thailand, Laos, dan Myanmar yang berbatasan langsung dengan China. Kota perbatasan merupakan lokasi strategis bagi pergerakan transnasional baik manusia, barang, informasi, dan ide-ide, sekaligus sebagai wilayah yang menghubungkan antara dua atau tiga negara yang berbeda di Asia Tenggara. Ekspansi ekonomi China dan pergerakan manusia dari negara-negara tetangga mempengaruhi dinamika ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di perbatasan. Fokus penelitian ini adalah menggali proses migrasi transnasional, identitas budaya diaspora, dan aktivitas ekonomi skala kecil kelompok diaspora di wilayah perbatasan Thailand utara dengan Myanmar dan Laos.

**Kata Kunci:** migrasi transnasional, identitas budaya diaspora, kota perbatasan

**PENDAHULUAN**

Persoalan migrasi transnasional di Asia Tenggara merupakan masalah yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir serta mengemuka

begitu intens. Ihwal ini bukan saja bersumber dari persoalan perbatasan di Asia Tenggara yang tidak bisa dilepaskan dari konstruksi kolonial, namun juga berkaitan dengan globalisasi.

Dalam perkembangan era pasar global, sumber daya manusia merupakan salah satu komoditas transnasional yang jumlahnya cukup besar dan karena itu memicu naiknya angka perpindahan penduduk antar negara. Kota-kota perbatasan di Asia Tenggara sering dijadikan lokasi transit bagi migran (antara lain pengungsi, pedagang, dan pelajar) ataupun menjadi terminal akhir bagi para migran untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di sana. Penelitian ini mengambil fokus pada perkembangan kota-kota perbatasan di Asia Tenggara yang secara langsung atau tidak langsung berbatasan dengan negara China. Isu-isu perbatasan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain migrasi transnasional, perdagangan lintas batas, dan kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan tersebut.

Perkembangan kota-kota perbatasan di Asia Tenggara juga didukung oleh China yang sangat agresif melakukan ekspansi di kawasan perbatasan di negara-negara Sungai Mekong (*Greater Mekong Subregion-GMS*), seperti Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. China dengan dukungan Bank Pembangunan Asia membangun jalan raya trans-internasional yang menghubungkan Bangkok dan provinsi Yunan. China juga membangun jalan darat sepanjang 1.800 km dari Kunming-China menuju Bangkok, Thailand. Selain faktor kedekatan wilayah, keenam negara juga memiliki ikatan sejarah, emosional, kekerabatan, dan persamaan bahasa serta kultural. Faktor pendorong lainnya yakni rata-rata provinsi bagian selatan sebelah barat China, seperti provinsi Yunan belum merasakan pembangunan yang setara dengan provinsi di bagian utara. Potret ini sama halnya dengan masyarakat yang ada di perbatasan Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Selain faktor di atas, dalam hal energi dan sumber daya alam China memiliki keterbatasan sehingga China memilih menyimpan mineralnya sebagai cadangan energi nasional dan melakukan eksplorasi di negara-negara sekitar kawasan.

Infrastruktur yang dibangun oleh China yang menghubungkan Provinsi Yunan dengan negara-negara di Asia Tenggara tidak hanya meningkatkan arus keluar masuk barang, tetapi

juga pergerakan manusia secara transnasional. Dengan semakin banyaknya migrasi orang China dan juga pendatang dari negara sekitar di kawasan perbatasan tersebut akan membuat interaksi dengan masyarakat lokal menjadi berbeda. Perubahan sosial budaya masyarakat perbatasan menjadi menarik untuk diteliti karena wilayah perbatasan yang sebelumnya memiliki masyarakat yang homogen berubah menjadi daerah di mana masyarakat yang terdiri dari berbagai negara saling berhubungan dan berinteraksi atau bisa juga disebut dengan masyarakat multikultur. Menilik dari berbagai persoalan di atas, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan, yang meliputi bagaimana dinamika migrasi transnasional di perbatasan Thailand-Myanmar dan Thailand-Laos? Apa saja kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan dan siapa pelaku kegiatan ekonomi tersebut? Bagaimana dinamika isu identitas dan etnisitas, status kewarganegaraan, dan proses adaptasi masyarakat di wilayah perbatasan? Sejauh mana kebijakan pemerintah Thailand untuk wilayah perbatasan dalam menghadapi ekspansi dari China, terutama kebijakan imigrasi dan permasalahan sosial ekonomi dan budaya yang muncul sebagai akibat dari masuknya pendatang dari China dan negara sekitarnya?

## **SEJARAH DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH THAILAND DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN**

Secara formal, Thailand tidak pernah mengalami penjajahan sebagaimana negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada saat bangsa Barat menjajah kawasan Asia Tenggara, Thailand, yang sampai 11 Mei 1949 masih bernama Siam, menjadi wilayah “pemisah” antara wilayah kekuasaan Perancis yang menguasai Indochina dan Inggris yang menguasai Myanmar. Sebagai sebuah negara yang memiliki sejarah berbeda dari negara Asia Tenggara lainnya, sudah tentu Thailand memiliki cara dan kebijakan tersendiri dalam pengelolaan perbatasannya. Pembangunan dan pengelolaan perbatasan menjadi semakin penting terutama setelah munculnya kesadaran akan arti pentingnya perbatasan bagi negara, tidak hanya sebagai simbol kedaulatan wilayah, tetapi

juga sebagai salah satu indikasi keberhasilan pembangunan sebuah negara.

Mengingat perbatasan memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai ujung tombak hubungan antarnegara berbatasan, tidak mengherankan sejak dekade 1990an banyak negara Asia Tenggara memberikan perhatian lebih dan memposisikan perbatasan sebagai beranda depan negara (*front yard of the country*), tidak lagi menganggapnya sebagai beranda belakang (*backyard of the country*). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perbatasan, dalam beberapa hal, menjadi alasan dan *locus* utama penerapan kebijakan pembangunan beberapa negara di Asia Tenggara (Chuthatip Maneepon dan Chung-Tong Wu, 2004, 135). Hal ini terutama ditandai dengan munculnya kesadaran dan keinginan di antara negara-negara Asia Tenggara untuk membangun perbatasan tidak hanya dalam konteks resolusi konflik, tetapi juga penegakan hukum, penguatan hubungan sosial budaya, serta pembangunan dan kerja sama ekonomi di perbatasan.

Membicarakan tentang kewarganegaraan (*citizenship*) di Thailand tidak bisa dilepaskan dari sejarah gagasan "*Thainess*" yang telah digaungkan sejak masa Raja Rama VI. Definisi warganegara yang dimaksud Raja Rama VI itu adalah setiap orang yang berbicara bahasa Thai, menghormati Budha, dan menghormati raja. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1913 disebutkan bahwa warga negara Thailand (Siam) adalah mereka yang pada dasarnya memiliki garis keturunan ayah orang Thai dan turun-tenurun. Dalam konteks undang-undang ini, orang-orang dari suku minoritas yang tinggal di hutan dan bukit (*hill tribes*) tidak dianggap sebagai warga negara Thailand.

Ketika persoalan perbatasan terutama terkait dengan kewarganegaraan menjadi isu yang mengemuka pada tahun 1995, pemerintah Thailand mengubah kebijakan tentang kewarganegaraan, *Thai policy of national integration*, dengan memberikan kewarganegaraan Thailand kepada *hill tribe* yang tinggal di perbatasan Thailand utara dengan mengelompokkan mereka ke dalam tiga kelompok utama berdasarkan periode masuk mereka ke Thailand, yaitu: 1) Orang-orang yang telah lama

berimigrasi ke wilayah Thailand; 2) Orang-orang yang datang ke Thailand sebelum Oktober 1985, dan 3) Orang-orang yang datang setelah tahun 1985. Mereka yang termasuk ke dalam kelompok yang pertama secara otomatis dianggap sebagai warganegara Thailand. Mereka yang masuk kategori kedua dianggap sebagai imigran legal (*legal immigrants*). Sedangkan mereka yang termasuk kategori ketiga, berdasarkan Alien Act, dicatat sebagai kelompok "orang asing" dengan tujuan memperoleh status legal sebelum mereka bisa melakukan naturalisasi untuk menjadi warga negara Thailand lima tahun kemudian.

### **DINAMIKA MIGRASI TRANSNATIONAL DI KOTA PERBATASAN THAILAND**

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan penjelasan dari masyarakat setempat, migrasi transnasional terkini di Mae Sai didominasi oleh warga Burma. Sebagai pendukung, Wille (2001, 19) menyatakan bahwa orang Burma bermigrasi ke Thailand karena mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik dan minimnya lapangan pekerjaan di negara mereka sendiri. Mereka percaya bahwa kehidupan di Thailand lebih baik dan kesempatan kerja pun banyak tersedia. Pandangan ini diperoleh dari media-media di Burma dan ajakan dari saudara-ataupun kenalan mereka yang telah bekerja dan menetap di Thailand.

Selain itu, banyak pula para pelintas batas yang ulang-alik dari Thailand ke Myanmar dan sebaliknya setiap hari. Banyak di antara mereka datang ke Mae Sai pada pagi hari dan pulang ke Tachilek pada sore hari. Mereka ini kebanyakan bekerja di sekitar pasar Mae Sai. Para pelaku komuter ini memiliki pas batas sementara dan kartu kontrol imigrasi untuk melintas batas setiap hari. Kartu kontrol dari imigrasi tersebut berlaku untuk satu tahun, sementara pas batas sementara berlaku untuk satu minggu.

Jaringan menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam migrasi transnasional di Mae Sai. Banyak pendatang dari Yunnan, China yang masih menjaga relasi dengan saudara mereka di China. Sebelumnya, para pendatang Yunnan yang beragama muslim banyak mengirim

uang kepada sanak saudara mereka di Yunnan untuk membantu pembangunan daerah dan pembangunan masjid di sana. Namun, seiring dengan semakin membaiknya perekonomian di China, kondisi berbalik di mana muslim di Mae Sai banyak mendapat bantuan dari saudara mereka di Yunnan untuk membangun masjid dan membangun sekolah muslim.

Selain itu, peningkatan ekonomi yang pesat di China juga mendorong laju investasi mereka di Thailand, salah satunya Mae Sai. Mereka menggunakan jaringan kekerabatan untuk membangun bisnis di Thailand. Investor dari Yunnan mengirim modal ke sanak saudara mereka di Mae Sai untuk membuka restoran, hotel, travel agen dan sebagainya. Kemudahan akses dengan makin banyaknya rute penerbangan dari Chiang Mai ke Yunann dan sebaliknya semakin mendorong masuknya investasi di Mae Sai. Temuan lain yang tak kalah menarik yaitu kemudahan akses transportasi ini juga mendorong masyarakat muslim di Yunnan untuk melakukan ibadah haji dari Thailand, di mana pada masa lampau, mereka kesulitan untuk melakukannya dari Yunnan.

Kondisi perbatasan di Chiang Khong yang berada di antara Thailand dan Laos sedikit berbeda dengan di Mae Sai. Sebelum dibangun jembatan antara Laos dan Thailand, Chiang Khong merupakan kota transit yang ramai oleh para wisatawan. Hotel dan restoran banyak ditemukan di sepanjang jalan di sisi sungai Mekong. Pada saat itu, Pasar Chiang Khong juga sangat ramai oleh pembeli dan pedagang dari Laos karena barang-barang dari Laos dikenal lebih murah dari Thailand (Wawancara dengan penjual souvenir di Pelabuhan Sungai Chiang Khong pada 16 Mei 2016). Kondisi berubah ketika jembatan persahabatan yang menghubungkan Chiang Rai di Thailand dan Huay Xay di Laos mulai dibangun pada tahun 2013 atas bantuan dana dari Pemerintah China. Jembatan persahabatan tersebut menghubungkan tiga negara, yaitu Thailand, Laos dan China. Sementara itu, Chiang Khong adalah salah satu dari tiga spesial *economic zone* yang dipromosikan di Chiang Rai (Chiang Rai Times, 2016). Jembatan ini sangat memudahkan alur perdagangan dan mobilitas warga yang sering

melakukan lintas batas. Dari Chiang Rai ke jembatan persahabatan hanya membutuhkan waktu tempuh 3 jam sehingga banyak wisatawan yang datang langsung dari Chiang Rai dan tidak lagi transit dan menginap di Chiang Khong. Para wisatawan dapat langsung menuju pusat kota Huay Xay atau langsung menuju terminal bus Bokeo atau terminal bis Luang Namta untuk melanjutkan perjalanan ke Yunnan yang membutuhkan 3-4 jam waktu tempuh.

Pembangunan jembatan persahabatan tersebut juga membawa dampak baik dari Thailand, khususnya provinsi Chiang Rai. Semenjak jembatan dioperasikan, arus perdagangan dan wisatawan dari China meningkat drastis. Banyak truk-truk yang datang dari China maupun Laos membawa sayuran, buah-buahan, bunga, mesin-mesin, dan lain sebagainya untuk diperdagangkan di Thailand. Vixay Homsombath, supervisor Boten Dankham Special Economic Zone (SEZ) menyatakan bahwa volume ekspor ke Laos meningkat tiga kali lipat semenjak dibukanya jembatan. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada masyarakat Thailand yang berkunjung ke Laos maupun China sekitar 30% (Chiang Rai Times, 2014). Menteri Perdagangan menyatakan bahwa berkat pembangunan jembatan, perdagangan bilateral antara Thailand dan Laos meningkat lebih dari 13 % pada tahun 2014 (Chiang Rai Times, 2015).

Sayangnya peningkatan jumlah ekspor, perdagangan, wisatawan ini lebih banyak dinikmati oleh provinsi Chiang Rai dibanding kota Chiang Khong itu sendiri. Kota Chiang Khong sekarang ini sering disebut sebagai kota hantu karena rendahnya pengunjung. Para wisatawan tidak lagi transit dan memilih melanjutkan perjalanan ke Chiang Mai ataupun Bangkok. Terlebih pada musim kemarau, di mana tinggi air sungai Mekong mengalami penyusutan sehingga kapal besar tidak dapat lewati maka hampir tidak ada wisatawan yang datang menginap ke daerah tersebut (wawancara T pada tanggal 16 Mei 2016). Sekarang ini, pendatang tetap di Chiang Khong adalah warga Laos yang menyeberang pada akhir pekan untuk mengunjungi *supermarket* terbesar di Chiang Khong dan berbelanja di sana serta supir truk

yang menunggu muatan mereka diangkut ke Laos melalui sungai.

## **DIASPORA DAN IDENTITAS ETNIK DI PERBATASAN THAILAND- MYANMAR DAN THAILAND-LAOS**

Perbatasan merupakan tempat yang strategis baik sebagai tempat transit bagi pergerakan manusia maupun sebagai tempat untuk menetap meskipun tujuan sebelumnya hanya sekedar transit. Kita sudah menyaksikan pergerakan manusia secara transnasional yakni dari berbagai negara yang melewati perbatasan Thailand-Myanmar dan Thailand-Laos ini dari waktu ke waktu baik yang resmi maupun tidak resmi. Sejak dulu kelompok minoritas dari Myanmar (dulunya Birma) sering bergerak dari Myanmar ke Thailand dan bahkan bolak-balik dalam jangka waktu yang lama, seperti orang Akha, Padaung, Shan, dan lain sebagainya. Persoalan politik di Myanmar menjadi alasan yang kuat mengapa terjadi pergerakan kelompok minoritas dari Myanmar ke Thailand ini.

Seperti kelompok etnik lainnya, Hmong juga memiliki hubungan sosial secara adat. Komunitas tradisional Hmong merupakan keluarga patriarkal yang menyembah roh leluhur (Quang, 2004, 325). Pada dasarnya orang Hmong memiliki keunikan tersendiri. Tidak mengherankan jika di berbagai negara Hmong menjadi kelompok etnik yang dipromosikan untuk pariwisata budaya/etnik. Di perbatasan Thailand-Laos, orang Hmong yang kita kunjungi berada di perbukitan dan dijadikan desa wisata. Orang Thai sendiri masih menganggap mereka banyak terlibat di dunia opium.

Berbeda dengan orang Hmong di desa itu, orang Thai Lue memiliki imaji yang tidak ada kaitannya dengan opium meskipun kedua kelompok sama-sama kelompok minoritas dan dijadikan daerah tujuan wisata di perbatasan Thailand-Laos. Seperti orang Hmong, orang Thai Lue juga berada di berbagai negara, seperti Tingkok, Laos, dan Thailand (lihat Kang, 2015 untuk orang Lue). Kondisi di desa Thai Lue memang jauh lebih terbuka seperti desa-desa Thailand lainnya yang berada di pinggir sungai. Ketika masuk ke desa, kita bisa melihat beberapa

warung yang menyediakan makanan khas Thai Lue, seperti mie yang khas dengan sambal. Selain itu juga bisa kita temukan warung yang lebih lengkap di seberang jalan yang juga menyediakan makanan khas Thai Lue.

Berdasarkan observasi dan wawancara di desa perbatasan Thailand-Laos, orang Thai Lue mempertahankan budaya materinya, yaitu kain tenun Thai Lue yang menjadi bagian utama sebagai penanda identitasnya yaitu pemilik kain tenun tradisional. Kain tenun Thai Lue ini sangat dikenal dan memiliki warna warni yang sangat memikat dan indah. Berdasarkan wawancara dengan para perempuan Thai Lue yang mengelola perkumpulan penenun, semacam koperasi di desa Thai Lue ini, aslinya mereka menggunakan warna natural karena memang bahannya dari bahan natural untuk pewarnaan, yaitu warna kecoklatan. Tetapi bantuan dari pemerintah adalah dengan pemberian warna-warni yang cerah sehingga para wisatawan lebih tertarik karena keindahan warna tersebut. Selain itu, mereka tetap juga membuat tenun dengan warna natural hanya untuk kepentingan tertentu, seperti upacara.

Di Thailand, berkenaan dengan identitas nasional, tidak semua kelompok memiliki status yang sama. Bagi orang Hmong yang masih memiliki status sebagai “*hill tribe*” mereka memiliki status yang berbeda dengan orang Thai. Toyota (2004) juga menemukan isu yang serupa minoritas yang berstatus “*hill tribe*” memiliki berbagai keterbatasan. Seperti dikemukakan oleh Sakboon (2013) kelompok minoritas, terutama yang dapat label sebagai *hill tribe*, memang masih belum memiliki status kewarganegaraan yang penuh. Dombroski (2014) lebih lanjut menjelaskan bahwa ketidaktahuan akan hak mereka untuk mendapatkan hak kewarganegaraan, juga karena mereka tinggal terpisah dari masyarakat Thai, serta kurang bisa berbahasa Thai menyebabkan orang-orang dari etnik minoritas tidak melakukan upaya untuk mendaftar sebagai warga negara penuh.

## **DINAMIKA EKONOMI DAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS DI PERBATASAN THAILAND-MYANMAR DAN THAILAND-LAOS**

Sejarah perbatasan lintas batas di perbatasan Chiang Khong dan Huay Xai juga tidak lepas dari peranan Sungai Mekong di mana banyak pedagang yang menggunakan jalur sungai Mekong sebagai jalur perdagangannya (*long distance traders in the Mekong River*). Perdagangan jarak jauh ini dimulai dari daerah hulu sungai Mekong, yaitu pedagang dari etnis China di Yunnan kemudian turun ke bawah ke Chiang Saen dan Chiang Khong di Thailand, dan berakhir di Luang Prabang di Laos (Walker, 1999). Namun, perdagangan tradisional melalui jalur sungai Mekong ini sangat jauh berkurang sejak dibukanya Jembatan (Friendship Bridge IV) yang menghubungkan kota Chiang Khong dan Huay Xai pada tahun 2013.

Perdagangan sungai Mekong yang biasanya dilakukan secara formal dan informal sekarang beralih menjadi perdagangan formal karena barang-barang yang diperdagangkan tidak bisa dibawa melalui jalur Sungai Mekong, tetapi harus melalui custom house yang berada di jembatan tersebut. *Long distance trading activities* di Sungai Mekong yang melibatkan berbagai aktor dengan berbagai jaringan dan multi etnis sekarang menjadi perdagangan dalam volume besar dengan menggunakan truk dan melibatkan pedagang besar. Penjelasan mengenai pola perdagangan lintas batas ini akan dipaparkan lebih lanjut dalam paragraf selanjutnya.

Melalui kerjasama GMS, pembangunan infrastruktur yang menghubungkan keempat negara terus digenjot dalam rangka peningkatan arus perdagangan dan akselerasi pembangunan ekonomi. *North-South Economic Corridor* (NSEC) sepanjang 1.855 km yang menghubungkan Bangkok dan Kunming dibangun. Dua bagian dari NSEC, yaitu R3A dan R3B berperan penting dalam perdagangan lintas batas dan jalur transportasi cargo di wilayah GMS. R3 dibagi menjadi R3A dan R3B di Xiamengyang, di Xishuanbanna, di China yang langsung menuju Propinsi Chiang Rai di Thailand melalui Laos, yaitu ke Chiang Khong

dengan R3A dan melalui Myanmar ke Mae Sai dengan R3B (Supatn, 2012). Keberadaan 2 jalan tol ini semakin mempermudah transportasi barang sehingga perdagangan lintas batas dan volume export-import meningkat signifikan. Pada akhirnya perdagangan lintas batas menjadi semakin penting sejalan dengan membaiknya hubungan politik dan infrastruktur di antara negara GMS (He Shengda, 2005).

## **KESIMPULAN**

Daerah perbatasan di Thailand dikenal sebagai jalur perdagangan di masa lampau. Banyak warga yang hilir mudik untuk mempertukarkan barang dari daerah asalnya ke Thailand. Thailand menjadi destinasi utama, selain secara ekonomi lebih stabil, kondisi politiknya pun dianggap paling stabil dibandingkan dengan China pada masa lampau, serta negara tetangga lain seperti Laos dan Myanmar. Pendatang dari China di Mae Sai menggunakan identitas agama dan dualitas nama sebagai strategi untuk menjaga identitas komunitas dan agar dapat berbaur dengan masyarakat Thailand. Sementara itu, pendatang dari China di Chiang Khong yang juga menggunakan dualitas nama, terlihat belum dapat berbaur sempurna dengan masyarakat Thailand karena mereka hidup berkelompok dan masih menggunakan bahasa Mandarin dalam percakapan di antara mereka.

Sekarang ini Mae Sai sangat berkembang dengan ditetapkannya Zona Ekonomi Khusus, sementara Chiang Khong justru mengalami kemunduran dengan dibukanya Jembatan Persahabatan yang menghubungkan kota Chiang Khong dengan Huay Xay di Laos. Di satu sisi, jembatan telah berdampak kenaikan ekspor import serta naiknya jumlah wisatawan, namun jarak tempuh yang pendek justru menjadikan mereka tidak lagi transit dan menginap di Chiang Khong tapi lebih memilih meneruskan ke Kota Chiang Mai. Selain itu, banyak pula wisatawan China yang membawa caravan dan mobil sendiri untuk berkunjung ke Thailand sehingga mereka tidak menginap di hotel dan tidak berkontribusi pada sektor pariwisata di Chiang Khong. Hal ini sedang menjadi perhatian

bagi Pemerintah Thailand, khususnya terkait pengelolaan perbatasan di Chiang Khong.

Kota perbatasan di Asia Tenggara seperti Mae Sai dan Chiang Khong jelas memiliki peran yang sangat strategis, terutama bagi Thailand karena di sanalah letak lokasi pertama yang menjadi penentu dari berbagai kebijakan yang terkait hubungan ekonomi dengan negara lain. Di sana pulalah kompleksitas persoalan masyarakat yang multikultural memerlukan pengelolaan yang bijak karena menyangkut berbagai kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sendiri. Penelitian tentang perbatasan ini masih perlu digali lebih lanjut mengingat derasnya arus globalisasi yang menuntut berbagai strategi untuk berkolaborasi dengan negara tetangga.

## PUSTAKA ACUAN

- Chiang Rai Times. (2014). "Chiang Rai a Gateway for Trade and Tourism in the Greater Mekong Subregion", available at <http://www.chiangraitimes.com/chaing-rai-a-gateway-for-trade-and-tourism-in-the-greater-mekong-subregion.html>, accessed on October 2016.
- Chiang Rai Times. (2015). "Customs Officials Open Newly Renovated Facility in Chiang Khong", available at <http://www.chiangraitimes.com/customs-officials-open-newly-renovated-facility-in-chiang-khong.html>, accessed on October 2016.
- Chiang Rai Times. (2016). "Chiang Rai Businesses Await Surge in Visitors from China and Laos" in Chiang Rai Times, available at <http://www.chiangraitimes.com/chiang-rai-businesses-await-surge-in-visitors-from-china-and-laos.html>, accessed on October 2016.
- Culas, Christian and Jean Michaud. (2004) "A contribution to the study of Hmong (Miao) migrations and history", in Nicholas Tapp, Jean Michaud, Christian Culas and Gary Yia Lee (eds.). *Hmong/Miao in Asia*. Chiang Mai: Silkworm Books.
- Dombroski, Katja. 21-8-2014, Minorities: Stateless and without rights. <https://www.dandc.eu/en/article/many-ethnic-minorities-thailand-are-stateless-and-thereby-without-rights>
- He Shengda. (2003). "Sino-Myanmar Economic Relation after 1988: Development, Problems and Prospects", paper presented at the Asian Dialogue Society Workshop, Kunming, 28-30 April.
- Kang, Nanshan. (2015). "Tai Lue Traditions in Transnational World: a Study of Tai Lue Communities in the United States of America". In Wasan Panyagaew and Bai Zhihong (eds.), *Uncertain Lives: Changing Borders and Mobility in the Borderlands of the Upper Mekong*. Chiang Mai, Thailand: The Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD), Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University.
- Quang, VuongDuy. (2004). 'The Hmong and forest management in Northern Vietnam's mountainous areas', in Nicholas Tapp, Jean Michaud, Christian Culas and Gary Yia Lee (eds.), *Hmong/Miao in Asia*. Chiang Mai: Silkworm Books.
- Sakboon, Mukdawan. (2013). "Controlling Bad Drugs, Creating Good Citizens: Citizenship and Social Immobility for Thailand's Highland Ethnic Minorities". In Coeli Barry (ed.) *Rights to Culture: Heritage, Language, and Community in Thailand*. Ching Mai: Silkworm Books.
- Supatn, Nucharee. (2012). "Regional Development of the Golder and Emerald Triangle Areas: Thai Perspective. "In Five Triangle Areas in the Greater Mekong Subregion, edited by Masami Ishida, BRC Research Report No 11, Bangkok Research Center. Bangkok, Thailand: IDE-JETRO.
- Toyota, Mika. (2004). 'Who are the "illegal migrants" at the Thai-Myanmar Border?' in *2<sup>nd</sup> SEASREP Workshop on 'Borders and Borderlands in Southeast Asia'*, Research Center for Regional Resources, The Indonesian Institute of Sciences in cooperation with Southeast Asian Studies Regional Exchange Program (SEASREP) and the Toyota Foundation, 25-26 March.
- Walker. A. (1999). *The legend of the Golden Boat: Regulation, Trade and Traders in the Borderlands of Laos, Thailand, China and Burma*. Hawaii: University of Hawaii Press
- Wille, Christina. (2001). *Trafficking in Children into the Worst Forms of Child Labor: A Rapid Assessment*. Geneva: ILO International Programme on the Elimination of Child Labor, International Labor Office.
- , (2014). Chiang Rai Provincial Land Transport Service, available at [http://chiangraidlt.go.th/index.php?option=com\\_content&task=view&id=101&Itemid=1](http://chiangraidlt.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=1), accessed on 16 May 2016.



**BOOK REVIEW**  
**ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT IN AFRICA,**  
**UNDERSTANDINGS TRENDS AND PROSPECTS**

**TINJAUAN BUKU**  
**PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DI AFRIKA,**  
**MEMAHAMI TREND DAN PROSPEK**

Chitonge, H. 2015. *Economic Growth and Development in Africa, Understanding trends and prospects*. New York, NY: Routledge. 294 pages+ xv

**Muzzar Kresna**

Research Center for Regional Resources (P2SDR)  
Indonesian Institute of Sciences (LIPI)  
*Email: kresnamuzzar@gmail.com*

Diterima: 5-4-2017

Direvisi: 29-4-2017

Disetujui: 5-5-2017

In the last ten years Sub-Saharan Africa countries have undergone the longest period of sustained economic growth in the continent's history. This condition, capturing the attention of the multilateral organization, international media and academics community. The book *Economic Growth and Development in Africa, understanding trends and prospects* offers analysis of the Africa Rising narrative (ARN) from multidisciplinary perspectives. It's also offering a critical judgment of the explanations given for the poor economic growth and development performance in Sub-Saharan Africa.

In this book, the author starts with the politics of nomenclature of economic growth and economic development. A discourse on economic growth and development needs to make a clear distinction between the two terms. Economic growth is used here to refer to the increase in various economic indicators (mainly Gross National Product (GNP), Gross National Income (GNI), Gross Domestic Product (GDP), and GNP/GNI or GDP per capita). These indicators are popularly viewed as prerequisites for the broader process of development which includes economic, social, political, and cultural

transformation. Therefore, it is important from the start to note that economic growth is not equal with development. Sen (1988) argues, the social, political, economic and cultural transformation which the term 'development' embraces are not limited to how many kilometers of roads or railway have been built, or how many people have access to clean water, but it also includes changes relating to how many people are able to live lives which they value.

The book discusses development in the broader sense. The author argues a good example of this, in recent times, is the Chinese narrative. The societal wide transformation that the rapid and sustained economic growth experienced in China over the last three decades has occasioned, increased self-confidence, self-belief and self-assertion among most Chinese nationals, especially the younger generations. Economic growth has played an important role in this transformation, but it has also contributed to a broader process of social, cultural and political transformation. This is the sort of rounded transformation that the concept of development entails and goes way beyond the mere counting of goods was produced in a country.

From this perspective, Chitonge's claims that while economic growth is essential for development, but economic growth does not automatically translate into development. As has become apparent over the years, it is "possible for a country to have an expansion of GNP or income per capita, while its distribution becomes more unequal, possibly even the poorest groups going down absolutely in terms of their own real incomes" (Sen, 1988). In the chapter 7 of this book shows that a sustained economic growth averaging more than 5% per year in Sub-Saharan Africa countries over the last 15 years has not resulted in a significant reduction in poverty rate and, much less, the narrowing of the inequality gap (Gini coefficient). For instance, it is a well-known fact that a country's GDP per capita can increase without an increase in the number of people having access to basic education or clean water. Thus, while economic growth is essential for the broader transformation of society, it does not automatically translate into the wider social transformation implied by the term development. The author argues notions of transformation implied by the term development are here not given the non-linear evolutionary meaning as in the post-World War Two modernization paradigm. Therefore, the book found that Sub-Saharan African growth and development experience need not conform to any growth and development norm because the continent can develop in unique ways.

### **THE MARKET-ORIENTED APPROACH**

One of the dominant approaches used to explain Sub-Saharan Africa's growth experience is a set of neoclassical growth theories, here referred to generally as the Market Oriented Approach (MOA). Empirical growth studies form the mainstay of this approach, and most of the explanations and findings from these studies are used as a basis for policy prescription by international donors and the development community. Though not all of the studies are conducted by the World Bank's or the IMF's staff, a majority of the studies are commissioned by these two institutions. The findings of these studies and the resulting literature have had a

big impact in academia and on policymakers and public opinion. Its conclusions have to some extent been coherent with the policy agenda as set by the Bretton Woods institutions (Jerven, 2009). As discussed in Chapter 4, Sub-Saharan Africa's growth and development experiences have been assessed primarily through this approach by mainstream economists and policy advisors. Empirical growth studies have been mostly built around the belief that cross-national time series data can reveal some unique African characteristics, which can in turn account for the puny economic growth and development trends observed in Africa. This is a popular view that justified the implementation of Structural Adjustment Programs (SAPs) during the 1980s, based as it was on the thinking that if the problems were largely caused by internal factors, then we should restructure and fix those internal conditions. Within the Market-Oriented Approach, although external factors are acknowledged, emphasis has been put on the internal causes of the crisis, hence its policy recommendations are focused on restructuring African economies and states (Brown, 1995).

### **THE POLITICAL ECONOMY APPROACH**

Apart from the empirical growth studies, other analysts have explained the Sub-Saharan Africa's economic growth and development experience in terms of the way they relate with the rest of the world. In this thought, external factors such as terms of trade, unequal exchange, imperialism (old and new paradigm) are seen as decisive factors in understanding Sub-Saharan Africa's growth and development challenges. Broadly, within the Political Economy Approach, although there is an acknowledgement of domestic factors that contribute to an economic and development malaise in Africa, the emphasis is directed towards the external forces which undermine the continent's ability to recover and embark on sustainable growth. In this view, factors such as high inflation, a Balance of Payment (BoP) deficit, fiscal deficit, escalating debt, low productivity, overvalued currencies, high interest rates, failure to diversify the production

structure, low physical and human capital, and low technology, are seen as inescapable outcomes of Sub-Saharan Africa countries position in the global economy. Within the Political Economy framework, Africa has experienced weak growth not because the existence of any features unique to Africa, but principally because of the asymmetrical power relations between the 'core' (industrialized) countries and the periphery (less developed) countries.

### **THE STATE-ORIENTED APPROACH**

The third dominant approach to explaining Sub-Saharan Africa's growth and development challenges is the analysis of the nature of states, public institutions and leadership in Africa. In this approach, the African crisis is largely regarded as a crisis of leadership and inadequate state institutionalization or the poor development of an effective bureaucratic state.

The book analyzed the trends of Sub-Saharan Africa's economic growth and development over the years. It looks at two institutions that play a critical role in Sub-Saharan Africa development, providing a detailed explanation of how the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) have interpreted and dealt with the African challenges and experiences. The insightful analysis reveals that if Sub-Saharan Africa countries are rising, only 20 until 30 per cent of Africans are aboard the rising ship, and the main challenge facing the continent today is to get on board the majority of Africans who have been excluded from growth. This book is essential reading for students and researchers in African Studies, and will be of great interest to scholars in International Development Studies, Political Economy, and Development Economics.

### **REFERENCES**

- Brown, B. Michael. (1995). *Africa's Choices: After Thirty Years of the World Bank*. London: Pluto Press.
- Jerven, M. (2009). "The Quest for African Dummy: Explaining African Post-colonial Economic Performance Revisited." *Journal of International Development*, DOI: 10.1002/jid.1603.
- Sen, Amartya (1988). "The Concept of Development" in H. Chenery, T. Srinivasan and P. Streeten (eds), *Handbook of Development Economics* Volume 1. The Hague: Elsevier.



## TENTANG PARA PENULIS

- **Betty Rosita Sari** adalah peneliti bidang kajian Asia Tenggara di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - LIPI. Dapat dihubungi melalui *betty.rositasari@gmail.com*.
- **Achmad Sunjayadi** adalah peneliti dan dosen Program Studi Belanda dan anggota Departemen Sejarah FIB UI. Dapat dihubungi melalui *achmad.sunjayadi@ui.ac.id* atau *achmad.sunjayadi@gmail.com*.
- **Gusnelly** adalah peneliti bidang kajian Eropa di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - LIPI. Dapat dihubungi melalui *nellylipi@yahoo.com*.
- **Nuruddin Al Akbar** adalah mahasiswa pascasarjana Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada. Dapat dihubungi melalui *nuruddin.alakbar@gmail.com*.
- **Yusnida Eka Puteri** adalah dosen di Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA, dan **Yusy Widarahesty** adalah dosen di Prodi. Ilmu Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia. Dapat dihubungi melalui *yusnida.naira@yahoo.com* dan *yusy\_widarahesty@uai.ac.id*.
- **Amorisa Wiratri, Betty Rosita Sari, Yekti Maunati, Lamijo** adalah peneliti bidang kajian Asia Tenggara di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - LIPI. Dapat dihubungi melalui *sevencupid7@gmail.com*.
- **Muzzar Kresna** adalah peneliti bidang kajian Eropa dan Afrika di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - LIPI. Dapat dihubungi melalui *kresnamuzzar@gmail.com*.

## INDEKS

- Africa 83  
Asia Tenggara 75  
Ataturk 45
- Belanda 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
- Cham 1, 2, 4, 8
- Development 2, 5, 12, 83, 84, 85  
Diaspora 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 33, 35, 37, 40,  
41, 42, 43, 75
- Economic Growth 83  
Eksil 33  
Entrepreneurship 1  
Erdogan 45  
Ethnic 1, 8
- Hindia-Belanda 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29,  
30
- Identitas 33, 75, 79  
Indonesia 17, 24, 33
- Jaringan etnik 1  
Jepang 25, 27, 28, 29, 37, 61, 63, 64, 65, 66,  
67, 68, 69, 70, 73, 74
- Kewarganegaraan 33, 34, 35, 37, 42, 76, 77,  
79  
Komunitas 1, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41,  
42, 43, 80
- Kudeta 45, 46, 51
- Laos 75, 79, 80
- Malaysia 1, 2, 4, 8  
Migrasi 1, 35, 75, 77  
Migration 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 33, 37, 43, 75  
Mitos 63
- Netherlands 17, 33
- Oshin 63
- Paralel State 45  
Pariwisata 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,  
27, 28, 29, 30, 31, 79, 80  
Perbatasan 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81  
Perempuan 41, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72,  
73, 79
- Reproduksi Budaya 63, 65, 66, 70
- Suaka 33, 35, 38, 39, 42  
Sugako Hashida 63
- Thailand 75, 76, 77, 79, 80  
Transnasional 1, 35, 41, 75, 76, 77, 79